

# INEE

Inter-Agency Network for Education in Emergencies  
Réseau Inter-Agences pour l'Éducation en Situations d'Urgence  
La Red Inter-Agencial para la Educación en Situaciones de Emergencia  
Rede Inter-Institucional para a Educação em Situação de Emergência  
الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ

## STANDAR-STANDAR MINIMUM UNTUK PENDIDIKAN: Kesiapsiagaan, Respon, Pemulihan



## **Pernyataan Misi**

INEE adalah sebuah jaringan global terbuka para praktisi dan pembuat kebijakan yang bekerja sama untuk memastikan hak atas semua orang terhadap pendidikan berkualitas dan lingkungan belajar yang aman dalam situasi darurat dan pemulihan pasca-krisis.

***[www.ineesite.org](http://www.ineesite.org)***

INEE Coordinator for Minimum Standards  
UNICEF – Education Section  
3 United Nations Plaza  
New York, NY 10017  
USA

***[minimumstandards@ineesite.org](mailto:minimumstandards@ineesite.org)***  
***[www.ineesite.org](http://www.ineesite.org)***

# INEE

Inter-Agency Network for Education in Emergencies  
Réseau Inter-Agences pour l'Éducation en Situations d'Urgence  
La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia  
Rede Inter-Institucional para a Educação em Situação de Emergência  
الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ

## **STANDAR-STANDAR MINIMUM UNTUK PENDIDIKAN: Kesiapsiagaan, Respon, Pemulihan**

**INEE** (*Inter-Agency Network for Education in Emergencies*) adalah sebuah jaringan global terbuka para praktisi dan pembuat kebijakan yang bekerja sama untuk memastikan hak atas semua orang terhadap pendidikan berkualitas dan lingkungan belajar yang aman dalam situasi darurat dan pemulihan pasca krisis. Kelompok pengarah INEE memimpin dan memberikan arahan secara menyeluruh untuk jaringan. Anggota Kelompok Pengarah saat ini adalah CARE, ChildFund International, International Rescue Committee (IRC), Refugee Education Trust (RET), Save The Children, Open Society Institute (OSI), UNESCO, UNHCR, UNICEF, dan Bank Dunia.

Kelompok Kerja INEE untuk Standar-Standar Minimum bertugas memfasilitasi pelaksanaan global Standar Minimum Pendidikan: Kesiapsiagaan, Respon, Pemulihan.

Kelompok Kerja INEE (2009-2011) terdiri dari 19 organisasi dengan keahlian pendidikan dalam situasi konflik dan bencana: Academy for Educational Development (AED), Action Aid, American Institute of Research (AIR), Basic Education for Afghan Refugees (BEFARe), The Forum for African Woman Educationalists (FAWE), Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), The International Rescue Committee (IRC), Mavikalem Social Assistance and Charity Association, Norwegian Agency for Development (NORAD), Norwegian Refugee Council (NRC), Oxfam Novib, Plan International, Save The Children, UNESCO, UNHCR, UNICEF, USAID, War Child Holland, World Education, ZOA Refugee Care.

INEE berterima kasih kepada lebih dari 41 agensi lembaga dan organisasi atas dukungan mereka terhadap jaringan sejak awal. Untuk daftar lengkapnya silakan kunjungi situs INEE: **[www.ineesite.org](http://www.ineesite.org)**

INEE terbuka bagi semua individu dan organisasi yang tertarik melaksanakan, mendukung, dan mengadvokasi pendidikan dalam situasi darurat. Individu yang tertarik dapat mendaftarkan diri sebagai anggota melalui website INEE: **[www.ineesite.org/join](http://www.ineesite.org/join)**

Keanggotaan ini tidak menuntut kewajiban tertentu, juga tidak dipungut biaya.

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi [www.ineesite.org](http://www.ineesite.org) atau hubungi Koordinator INEE untuk Standar-Standar Minimum di **[minimumstandard@ineesite.org](mailto:minimumstandard@ineesite.org)**.

# STANDAR-STANDAR MINIMUM UNTUK PENDIDIKAN: Kesiapsiagaan, Respon, Pemulihan



ISBN 978-602-99003-0-9

INEE Edisi Pertama, 2004

INEE Edisi Cetak Ulang, 2006

INEE Edisi Cetak Ulang, 2009

INEE Edisi Cetak Ulang, 2010

INEE Edisi Kedua, 2010

INEE Edisi Cetak Ulang, 2010

INEE Edisi Cetak Ketiga, 2010

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Bahan ini merupakan hak cipta tetapi bisa direproduksi dengan berbagai metode untuk tujuan pendidikan. Izin resmi diperlukan untuk semua tujuan tersebut, tetapi biasanya akan diberikan segera. Untuk menyalin dalam bentuk lain, digunakan kembali dalam publikasi lain, terjemahan atau adaptasi, izin tertulis harus diperoleh terlebih dahulu dari pemilik Hak Cipta.

Edisi versi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) dan didanai oleh Plan Indonesia, serta diterbitkan oleh MOC Publishing, Jakarta, 2011.

Foto sampul: Plan Indonesia

# DAFTAR ISI

<b>Pendahuluan atas Standar Minimum untuk Pendidikan:</b>	
Kesiapsiagaan, Respon, Pemulihan	1
<b>Domain Satu: Standar-standar Dasar</b>	<b>23</b>
Partisipasi Masyarakat	
Standar 1: Partisipasi	28
Standar 2: Sumber Daya	36
Koordinasi	
Standar 1: Koordinasi	40
Analisis	
Standar 1: Pengkajian	45
Standar 2: Strategi Respon	53
Standar 3: Pemantauan	59
Standar 4: Evaluasi	63
<b>Domain Dua: Akses dan Lingkungan Belajar</b>	<b>67</b>
Standar 1: Kesetaraan Akses	71
Standar 2: Perlindungan dan Kesejahteraan	78
Standar 3: Fasilitas dan Layanan	86
<b>Domain Tiga: Belajar-Mengajar</b>	<b>93</b>
Standar 1: Kurikulum	97
Standar 2: Pelatihan, Dukungan dan Pengembangan Profesional	104
Standar 3: Instruksi dan Proses Belajar	108
Standar 4: Penilaian Hasil Pembelajaran	111
<b>Domain Empat: Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya</b>	<b>115</b>
Standar 1: Rekrutmen dan Seleksi	119
Standar 2: Kondisi Kerja	122
Standar 3: Dukungan dan Pengawasan	125
<b>Domain Lima: Kebijakan Pendidikan</b>	<b>129</b>
Standar 1: Perumusan Hukum dan Kebijakan	132
Standar 2: Perencanaan dan Implementasi	138
<b>Lampiran-lampiran</b>	<b>141</b>
Lampiran 1: Daftar Istilah	141
Lampiran 2: Singkatan	153
Lampiran 3: Indeks	154
Lampiran 4: Form Umpan-Balik	163

# PENDAHULUAN ATAS STANDAR MINIMUM UNTUK PENDIDIKAN: Kesiapsiagaan, Respon, Pemulihan

## **Apa itu pendidikan dalam situasi darurat?**

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar bagi semua orang. Pendidikan ini sangat penting bagi puluhan juta anak-anak dan pemuda yang terkena dampak konflik dan bencana, namun sering secara signifikan terganggu dalam situasi darurat, mengganggu persepsi pelajar tentang efek transformatif dari pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan dalam situasi darurat terdiri dari kesempatan belajar untuk segala usia. Ini meliputi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, non-formal, teknis, kejuruan, perguruan tinggi dan orang dewasa. Dalam situasi darurat sampai pemulihan, pendidikan yang berkualitas menyediakan perlindungan fisik, psikososial dan kognitif, yang dapat mempertahankan dan menyelamatkan nyawa.

Pendidikan dalam situasi darurat menjamin martabat dan menopang kehidupan dengan menawarkan tempat yang aman untuk belajar, dimana anak-anak dan pemuda yang membutuhkan bantuan lain dapat diidentifikasi dan didukung. Pendidikan yang berkualitas menyelamatkan nyawa dengan memberikan perlindungan fisik dari bahaya dan eksploitasi krisis lingkungan. Ketika pelajar berada dalam lingkungan belajar yang aman, risiko mereka terhadap eksploitasi seksual maupun ekonomi atau paparan risiko-risiko lainnya seperti pernikahan dini atau pernikahan paksa, perekrutan ke dalam angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata atau kejahatan terorganisir akan berkurang. Selain itu, pendidikan dapat menyampaikan informasi penyelamatan kehidupan untuk memperkuat keterampilan bertahan hidup yang kritis dan mekanisme-mekanisme untuk bertahan. Contohnya termasuk informasi tentang cara

untuk menghindari ranjau darat, bagaimana melindungi diri dari pelecehan seksual, bagaimana untuk menghindari infeksi HIV dan cara mengakses pelayanan kesehatan dan makanan.

Peluang-peluang untuk pendidikan juga mengurangi dampak psikososial dari konflik dan bencana dengan memberikan rasa rutin, stabilitas, struktur dan harapan masa depan. Dengan memperkuat keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan bertahan, pendidikan memungkinkan pelajar untuk membuat keputusan tentang bagaimana bertahan hidup dan menjaga diri mereka sendiri serta orang lain dalam lingkungan yang berbahaya. Ini dapat membantu orang berpikir kritis tentang pesan-pesan politik atau sumber informasi yang saling bertentangan.

Sekolah dan ruang belajar lainnya dapat bertindak sebagai pintu masuk untuk penyediaan dukungan penting di luar sektor pendidikan seperti perlindungan, nutrisi, air dan sanitasi dan pelayanan kesehatan.

Koordinasi antara pekerja dalam sektor pendidikan, perlindungan, penampungan, air dan sanitasi, kesehatan dan psikososial penting dalam membangun ruang yang aman dan ramah-pelajar. Pendidikan yang berkualitas berdampak langsung kepada stabilitas sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Selain itu, pendidikan yang berkualitas juga membantu mengurangi risiko akibat konflik kekerasan dengan meningkatkan kohesi sosial dan mendukung resolusi konflik serta pembangunan perdamaian.

Namun, meskipun peluang menciptakan perdamaian jangka panjang semakin besar jika penduduk yang terkena dampak konflik adalah masyarakat terdidik, pendidikan juga dapat berdampak negatif pada perdamaian dan stabilitas. Pendidikan dapat mendukung konflik jika memperkuat ketidakadilan dan diskriminasi sosial dengan membatasi akses pendidikan bagi beberapa pelajar, atau jika kurikulum atau pengajaran praktik bersifat bias. Selama konflik fasilitas pendidikan bisa menjadi target sasaran pelajar dan tenaga kependidikan dapat diserang dalam perjalanan ke dan dari sekolah. Reformasi pendidikan yang dirancang dengan baik, yang dapat dimulai segera setelah situasi darurat, diperlukan untuk membantu menjamin perlindungan sistem pendidikan dan masyarakat

yang terkena dampak konflik dalam menuju perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Krisis dapat memberikan kesempatan bagi otoritas nasional, masyarakat dan pemangku kepentingan internasional untuk bekerja bersama menuju transformasi sosial dengan menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan terstruktur. Kelompok yang sering diabaikan, seperti anak-anak, perempuan, pemuda, anak-anak berkebutuhan khusus, pengungsi dan pengungsi internal (IDP / penyintas), dapat memperoleh manfaat dari kesempatan itu untuk pencapaian pendidikan. Ini bisa menjadi bonus dari krisis, yang meningkatkan akses pada pendidikan berkualitas dan pendidikan yang berkualitas itu sendiri.

Krisis memberikan kesempatan untuk mengajar semua anggota komunitas tentang keterampilan dan nilai-nilai baru: misalnya, pentingnya pendidikan inklusi, partisipasi dan toleransi, resolusi konflik, hak asasi manusia, pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana. Sangat penting bahwa pendidikan dalam situasi darurat hingga pemulihan adalah sesuai dan relevan. Pendidikan harus mengajarkan kemampuan baca tulis dan keterampilan berhitung, menyediakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan mendorong berpikir kritis. Pendidikan dapat membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan melalui pengajaran tentang bahaya, mempromosikan sekolah sebagai pusat pengurangan risiko bencana masyarakat dan pemberdayaan anak-anak dan pemuda sebagai pemimpin dalam pencegahan bencana.

### **Bagaimana pendidikan dalam tanggap kemanusiaan?**

Masyarakat memprioritaskan pendidikan di masa krisis. Sekolah dan ruang belajar lainnya sering sebagai pusat komunitas dan melambangkan peluang masyarakat untuk generasi masa depan dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Pelajar dan keluarga mereka memiliki aspirasi, dan pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan setiap orang untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat mereka - ekonomi, sosial dan politik.

Sampai saat ini, bantuan kemanusiaan akan berujung pada penyediaan makanan, tempat tinggal, air dan sanitasi dan perawatan kesehatan. Pendidikan dilihat sebagai bagian dari pekerjaan pembangunan jangka panjang dan bukan sebagai respon yang diperlukan untuk situasi darurat.

Namun, peran pendidikan dalam mempertahankan hidup dan penyelamatan kehidupan telah diakui dan masuknya pendidikan dalam tanggapan kemanusiaan kini dianggap penting.

Pendidikan merupakan bagian integral dari perencanaan dan penyediaan respon kemanusiaan, setelah pemberian bantuan langsung. Koordinasi dan kolaborasi antara sektor pendidikan dan sektor darurat lainnya penting bagi suatu respon yang efektif yang membahas hak-hak dan kebutuhan semua peserta didik. Hal ini tercermin dalam Perjanjian persahabatan *Sphere-INEE* dan cara kerja dari *Inter-Agency Standing Committee (IASC)'s Education Cluster* (lihat bagian mengenai hubungan strategis pada halaman 19-21).

Respon kemanusiaan digambarkan sebagai kontinum yang melibatkan kesiapsiagaan bencana sebelum krisis dan tanggap dalam situasi darurat, meluas ke pemulihan awal. Dalam situasi ketidakstabilan kronis, perkembangan linear sering tidak sesuai dengan kenyataan. Namun, situasi ini dapat menawarkan kerangka kerja yang bermanfaat untuk analisis dan perencanaan.

## **Apa yang dimaksud dengan Standar Minimum INEE?**

Buku Pegangan Standar-standar Minimum INEE berisi 19 standar, masing-masing disertai aksi kunci dan catatan panduan. Buku ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan, meningkatkan akses ke kesempatan belajar yang relevan dan aman serta menjamin akuntabilitas dalam memberikan layanan ini.

*The Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE)* memfasilitasi proses konsultasi yang melibatkan otoritas nasional, praktisi, pembuat kebijakan, akademisi dan pendidik lain di seluruh dunia dalam pengembangan buku ini pada tahun 2004 dan diperbarui pada tahun 2010 (lihat di bawah untuk informasi lebih lanjut). Panduan dalam Buku Panduan

Standar Minimum INEE ini dirancang untuk digunakan dalam menanggapi krisis dalam berbagai situasi, termasuk bencana yang disebabkan oleh bencana alam dan konflik, dan situasi bencana yang datangnya lambat atau cepat dan situasi darurat di lingkungan pedesaan dan perkotaan.

Fokus dari Buku Panduan Standar Minimum INEE adalah untuk memastikan respon kemanusiaan yang terkoordinasi dan berkualitas: terpenuhinya hak-hak pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang terkena bencana melalui proses yang menegaskan martabat mereka. Adalah penting untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan dengan sektor pendidikan. Khususnya dalam konteks dampak konflik, periode stabilitas yang terganggu oleh konflik, ketidakstabilan dan krisis kemanusiaan. Dalam situasi seperti ini, organisasi-organisasi kemanusiaan dan pengembangan sering bertindak secara bersamaan dalam mendukung pendidikan. Koordinasi dan kerja sama erat antara pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung pendidikan secara efektif, termasuk selama transisi dari bantuan kemanusiaan ke bantuan pembangunan. Buku ini memberikan pedoman bagaimana mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat akut dengan cara-cara pengurangan risiko, meningkatkan kesiapsiagaan masa depan dan meletakkan dasar yang kuat untuk pendidikan yang berkualitas. Hal ini memberikan kontribusi untuk membangun kembali sistem pendidikan yang lebih kuat dalam tahap pemulihan dan pembangunan.

## **Bagaimana Standar Minimum INEE dikembangkan?**

Pada tahun 2003-2004, Standar Minimum INEE dikembangkan, diperdebatkan dan disepakati melalui proses partisipatif, konsultasi lokal, nasional dan regional, konsultasi online melalui *listserv* INEE dan proses *peer review*. Proses konsultasi yang panjang mencerminkan pedoman prinsip-prinsip INEE dalam hal kolaborasi, transparansi, efektivitas biaya dan pengambilan keputusan yang konsultatif. Lebih dari 2.250 orang dari 50 negara lebih memberikan kontribusi terhadap penyusunan edisi pertama Standar Minimum INEE. Pada tahun 2009-2010, berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi yang diterima dari pengguna standar minimum ini, jaringan memulai proses pembaruan untuk memastikan bahwa buku pedoman:

- mencerminkan perkembangan terakhir di bidang pendidikan dalam situasi darurat;
- menggabungkan pengalaman dan praktik-praktik baik dari orang yang menggunakan buku pegangan dan menyesuaikan standar dengan konteks mereka;
- lebih ramah-pengguna / *user-friendly* dibandingkan dengan buku pegangan edisi 2004.

Standar Minimum INEE 2010 dibangun melalui proses konsultasi dan dengan hubungan INEE yang kuat terhadap praktisi serta pembuat-kebijakan pendidikan, kemanusiaan dan pembangunan. Langkah-langkah kunci dalam proses ini, yang melibatkan lebih dari 1.000 orang dari seluruh dunia, termasuk analisis umpan balik pada buku panduan, konsultasi online, penguatan isu-isu berlapis-sanding melalui konsultasi kelompok ahli, konsolidasi dari setiap domain standar, sebuah *peer review* dan tinjauan online dengan anggota INEE melalui jaringan *listserv*.

## **Kerangka kerja hak asasi manusia untuk menjamin hak untuk kehidupan yang bermartabat**

Hak asasi, hukum kemanusiaan dan hukum pengungsi adalah badan perjanjian hukum internasional dan standar-standar normatif yang menjamin dan mengatur hak asasi manusia dalam waktu-damai dan selama krisis akibat konflik dan bencana. Standar Minimum INEE berasal atau diturunkan dari hak asasi manusia dan secara khusus dari hak atas pendidikan, sebagaimana diungkapkan dalam dokumen penting hak asasi manusia.

Deklarasi Jomtien tahun 1990, Kerangka Kerja Aksi Forum Pendidikan Dunia mempromosikan Pendidikan untuk Semua tahun 2000 dan *Millenium Development Goals 2000*, meskipun tidak mengikat secara hukum, telah menegaskan kembali dan dalam beberapa kasus lebih lanjut mengembangkan hak atas pendidikan. Deklarasi ini memberikan perhatian khusus untuk pendidikan dalam situasi krisis, termasuk yang menimbulkan populasi pengungsian seperti pengungsi lintas batas dan penyintas (IDP). Mereka menekankan pendidikan anak usia dini, akses ke

program pembelajaran untuk semua orang muda dan orang dewasa, dan peningkatan kualitas program pendidikan yang ada.

Standar Minimum INEE juga berasal dan diturunkan dari Piagam Kemanusiaan dalam Proyek Sphere. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip dan ketentuan hukum kemanusiaan internasional, hukum hak asasi manusia internasional, hukum pengungsi dan Kode Etik Palang Merah Internasional dan Gerakan Bulan Sabit Merah dan Organisasi Non-Pemerintah (LSM) dalam Penanggulangan Bencana.

Piagam Kemanusiaan menyatakan bahwa semua orang yang terkena bencana dan konflik bersenjata memiliki hak untuk menerima bantuan dan perlindungan untuk memastikan kondisi-kondisi dasar bagi kehidupan yang bermartabat dan aman.

Piagam kemanusiaan ini menunjukkan tanggung jawab hukum dari negara dan pihak yang berperang untuk menjamin hak atas perlindungan dan bantuan. Ketika otoritas terkait tidak mampu atau tidak mau untuk memenuhi tanggung jawab mereka, mereka berkewajiban untuk memungkinkan organisasi kemanusiaan untuk memberikan perlindungan dan bantuan (lihat [www.sphereproject.org](http://www.sphereproject.org)).

### **Instrumen hukum internasional yang mendasari Standar Minimum INEE**

*Universal Declaration of Human Rights (1948) (Pasal 2, 26)*

*Fourth Geneva Convention (1949) (Pasal 3, 24, 50) dan Additional Protocol II (1977) (Pasal 4.3 (a))*

*Convention Relating to the Status of Refugees (1951) (Pasal 3, 22)*

*International Covenant on Civil and Political Rights (1966) (Pasal 2)*

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) (Pasal 2, 13, 14)*

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979) (Pasal 10)*

*Convention on the Rights of the Child (1989) (Pasal 2, 22, 28, 29, 30, 38, 39)*

*Rome Statute of the International Criminal Court (1998) (Pasal 8(2)(b)(ix) dan 8(2)(e)(iv))*

*Guiding Principles on Internal Displacement (tidak-mengikat) (1998) (Ayat 23)*

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) (Pasal 24)*

## **Apakah ada hak atas pendidikan dalam situasi darurat?**

Ya. Hak asasi manusia adalah universal dan berlaku meskipun dalam situasi darurat. Hak untuk pendidikan adalah hak asasi manusia dan sekaligus hak pendukung. Pendidikan memberikan keterampilan bahwa orang perlu untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya dan untuk melaksanakan hak-hak mereka yang lain, seperti hak untuk hidup dan kesehatan. Sebagai contoh, sekali seseorang dapat membaca peringatan keselamatan tentang ranjau darat, dia tahu cara untuk menghindari lapangan penuh dengan ranjau. Kemampuan baca tulis juga mendukung hak atas kesehatan. Hal ini memungkinkan orang untuk membaca instruksi medis dari dokter dan dengan benar mengikuti petunjuk dosis di botol obat.

Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua merupakan tanggung jawab utama otoritas nasional, didelegasikan kepada kementerian pendidikan dan otoritas pendidikan setempat. Dalam situasi darurat, pemangku-kepentingan lain - organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), LSM nasional maupun internasional dan organisasi berbasis masyarakat - juga melakukan kegiatan pendidikan. Dalam konteks di mana pemerintah lokal dan nasional yang relevan tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya, para pemangku-kepentingan dapat memikul tanggung jawab atas penyediaan pendidikan. Buku Pegangan Standar Minimum INEE menyediakan kerangka kerja praktik yang baik bagi semua pemangku kepentingan untuk membantu mencapai pendidikan yang berkualitas.

'Pendidikan berkualitas' adalah pendidikan yang tersedia, bisa diakses, bisa diterima dan mudah diadaptasi. Standar Minimum INEE mengambil bahasa dan semangat hukum hak asasi manusia sebagai dasar perencanaan pendidikan. Standar ini membantu mencapai pendidikan berkualitas dengan membawa prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi dan perlindungan hukum.

## **MENGGUNAKAN BUKU STANDAR MINIMUM INEE**

### **Apa isi Standar Minimum INEE?**

Standar Minimum INEE diatur dalam lima domain:

*Standar dasar:* standar ini telah direvisi dan diperluas untuk mencakup koordinasi serta partisipasi dan analisis masyarakat. Standar ini harus diterapkan di semua domain untuk meningkatkan respon yang berkualitas dan menyeluruh.

Standar ini memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan untuk diagnosis yang baik pada semua tahap siklus proyek, dalam rangka untuk lebih memahami konteks dan menerapkan standar yang lebih tepat dalam domain yang mengikutinya.

*Akses dan Lingkungan Belajar:* standar dalam domain ini berfokus pada akses informasi kesempatan belajar yang relevan dan aman. Standar-standar ini menyoroti hubungan penting dengan sektor lainnya seperti kesehatan, air dan sanitasi, gizi dan tempat tinggal yang membantu untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan fisik, kognitif dan kesejahteraan psikologis.



*Belajar Mengajar:* standar-standar ini fokus pada elemen-elemen penting yang mempromosikan pengajaran efektif dan belajar, termasuk kurikulum, pelatihan, pengembangan profesional dan dukungan, instruksi dan proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.

*Guru dan Tenaga Pendidikan Lainnya:* standar dalam domain ini meliputi administrasi dan manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan, termasuk di dalamnya adalah rekrutmen dan seleksi, kondisi pelayanan, dan pengawasan dan dukungan.

*Kebijakan Pendidikan:* standar dalam domain ini berfokus pada perumusan kebijakan dan pemberlakuannya, perencanaan dan pelaksanaan.

Setiap bagian dari buku ini menggambarkan suatu domain yang spesifik kerja pendidikan. Namun, setiap standar juga saling bersinggungan dengan standar lainnya. Apabila diperlukan, catatan panduan mengidentifikasi hubungan penting dengan standar lain yang relevan atau catatan panduan dalam domain lainnya untuk memberikan pandangan yang komprehensif dari kualitas pendidikan.

### **Apa yang baru dalam Buku Pegangan Standar Minimum edisi 2010?**

Bagi mereka yang akrab dengan Buku Pegangan edisi 2004 akan mengetahui banyak isi edisi ini. Perbaikan meliputi:

- Penguatan analisis konteks dan isu-isu kunci: perlindungan, dukungan psikososial, mitigasi konflik, pengurangan risiko bencana, pendidikan anak usia dini, gender, HIV dan AIDS, hak asasi manusia, pendidikan inklusi, hubungan antar-sektoral (kesehatan, air, sanitasi dan promosi kesehatan; tempat tinggal, makanan dan nutrisi) dan pemuda. Alat-alat untuk membantu pelaksanaan isu-isu kunci, dapat dilihat dalam *toolkit* INEE: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit).
- Dimasukkannya aksi kunci, bukan indikator utama yang perlu diambil dalam rangka memenuhi standar (lihat kotak pada halaman berikutnya);
- Perubahan nama domain pertama dari 'Standar Umum untuk semua Kategori' menjadi 'Standar Dasar', untuk mencerminkan kebutuhan penggunaan standar-standar ini sebagai dasar dari semua pekerjaan pendidikan. Selain itu, mengingat kebutuhan akan koordinasi di semua pekerjaan pendidikan, standar pada Koordinasi telah dipindahkan ke domain ini dari domain Kebijakan Pendidikan.

## ***Analisis Konteks***

Penduduk yang terkena bencana harus menjadi pusat respon kemanusiaan, dan ini menjadi pusat pembaruan Standar Minimum INEE. Bencana dan konflik memiliki perbedaan dampak bagi masyarakat karena ketidaksetaraan pengendalian atas sumber daya dan kekuasaan. Kerentanan merupakan karakteristik atau situasi yang membuat orang lebih rentan terhadap kerusakan akibat bencana atau konflik. Konteks sosial, generasi, fisik, ekologis, budaya, geografis, ekonomi dan politik dimana orang hidup berperan dalam menentukan kerentanan.

Tergantung pada konteksnya, kelompok rentan termasuk perempuan, orang berkebutuhan khusus, anak-anak, anak perempuan, anak-anak sebelumnya yang berhubungan dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata, dan orang-orang yang terkena HIV. Kapasitas merupakan kombinasi dari kekuatan, atribut dan sumber daya yang tersedia dalam individu, masyarakat komunitas atau organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang disepakati.

Untuk memahami bagaimana konteks memengaruhi kerentanan dan kapasitas, pemangku-kepentingan pendidikan perlu mempertimbangkan hubungan dan dinamika antara kerentanan dan kapasitas dalam analisis mereka terhadap konteks lokal. Dalam beberapa konteks, orang mungkin menjadi lebih rentan sebagai akibat dari etnis, kelas atau kasta, pemindahan / relokasi, afiliasi politik atau keagamaan. Unsur-unsur ini dapat mempengaruhi akses kepada layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk alasan ini, analisis yang komprehensif atas kebutuhan orang, kerentanan, dan kapasitas dalam konteksnya sangat penting demi respon kemanusiaan yang efektif. Standar-standar dasar mencakup pedoman analisis konteks, juga telah diurutkan dalam keseluruhan buku pegangan ini.

Untuk mengurangi kerentanan dalam krisis, penting untuk mengenali ketahanan dan kapasitas mereka. Memahami dan mendukung respon lokal dan membangun kapasitas aktor lokal merupakan prioritas utama. Dengan memperkuat analisis konteks dalam Standar dasar dan pengarusutamaan isu-isu kunci. Buku Pegangan 2010 menyediakan kerangka kerja untuk

konteks yang lebih baik terhadap kerentanan dan kapasitas dalam pendidikan kesiapsiagaan, respon dan pemulihan secara komprehensif.

### **Apa perbedaan antara standar, aksi kunci dan catatan panduan?**

Setiap standar mengikuti format yang sama. Pertama, **standar minimal** yang ditetapkan. Standar berasal dari prinsip bahwa penduduk yang terkena bencana atau konflik memiliki hak untuk hidup bermartabat dan untuk berpendidikan yang aman, berkualitas dan relevan. Oleh karena itu, standar-standar ini bersifat kualitatif dan dimaksudkan untuk menjadi universal dan berlaku dalam konteks apapun.

Standar diikuti oleh serangkaian **aksi kunci**, yang menyarankan cara-cara untuk mencapai standar. Beberapa tindakan mungkin tidak berlaku dalam semua konteks, mereka harus disesuaikan dengan konteks tertentu. Praktisi dapat merencanakan tindakan alternatif sehingga standar dapat dipenuhi.

**Catatan Panduan** mencakup hal-hal tertentu dari praktik yang baik untuk dipertimbangkan ketika menerapkan standar minimum dan menyesuaikan aksi kunci dalam situasi yang berbeda. Catatan panduan menawarkan saran-saran tentang isu-isu prioritas dan tentang bagaimana mengatasi kesulitan praktis, sementara juga menyediakan informasi latar belakang dan definisi.

### **Siapa yang harus menggunakan Standar Minimum INEE?**

Semua pihak yang terlibat dalam pendidikan kesiapsiagaan, respon dan pemulihan, termasuk pengurangan risiko bencana dan mitigasi konflik, harus menggunakan dan mempromosikan standar-standar minimum, aksi kunci dan catatan panduan.

Standar minimum menyediakan kerangka pengetahuan teknis dan praktik yang baik untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas dan aman, untuk membawa pemangku-kepentingan bersama-sama ke tingkat negara dan global. Pemangku kepentingan mencakup:

- Otoritas pendidikan di tingkat nasional dan lokal;
- Badan-badan PBB;
- Lembaga donor bilateral dan multilateral;
- LSM dan organisasi berbasis masyarakat, termasuk komite sekolah
- Guru, tenaga kependidikan lainnya dan serikat guru;
- Komite koordinasi sektor pendidikan dan Klaster Pendidikan;
- Konsultan pendidikan;
- Peneliti dan akademisi;
- Advokasi kemanusiaan dan hak asasi manusia.

## Bagaimana cara mengadaptasi Standar Minimum INEE ke dalam konteks lokal saya?

Berdasarkan hak asasi manusia, ada ketegangan antara standar universal dengan kemampuan penerapan dalam praktiknya. Standar ini menetapkan tujuan untuk akses ke pendidikan berkualitas dalam hal universal, sedangkan aksi kunci merepresentasikan langkah khusus yang diperlukan untuk mencapai masing-masing standar. Karena setiap konteks berbeda, aksi kunci di buku pegangan harus disesuaikan dengan situasi lokal yang spesifik. Sebagai contoh, aksi kunci pada rasio murid-guru menyatakan bahwa 'sejumlah guru harus direkrut untuk menjamin rasio guru-murid yang sesuai' (lihat guru dan tenaga kependidikan lainnya standar 1, Catatan Nomer Panduan 5 pada halaman 121). Ini harus dikontekstualisasikan dengan menentukan, dalam konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, rasio guru-murid yang diterima secara lokal. Sementara 60 murid per guru mungkin rasionya bisa diterima dalam tahap akut darurat, jumlah tersebut dapat diharapkan untuk meningkat ke 30 atau 40 siswa per guru dalam krisis kronis atau konteks pemulihan.

Konteks, termasuk sumber daya yang tersedia, dan tahap situasi darurat harus dipertimbangkan dalam menentukan tindakan terkontekstualisasi yang dapat diterima secara lokal.

Idealnya, proses kontekstualisasi harus terjadi sebelum terjadinya situasi darurat sebagai bagian dari perencanaan kontingensi pendidikan dan kesiapsiagaan.

Pengalaman pengguna Standar Minimum INEE telah menunjukkan bahwa kontekstualisasi lebih efektif jika dilakukan sebagai latihan partisipatif dan kolaboratif.

Dalam pelaksanaannya, komite koordinasi sektor pendidikan atau Klaster Pendidikan merupakan forum ideal untuk mengembangkan tindakan-tindakan yang relevan, nyata dan dapat diterapkan secara local untuk memenuhi standar (untuk panduan Kontekstualisasi Standar Minimum INEE, kunjungi *Toolkit* INEE: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit)).

Dalam beberapa kasus, faktor lokal membuat realisasi standar minimum dan aksi kunci tidak tercapai dalam jangka pendek. Ketika ini terjadi, sangat penting untuk merenungkan dan memahami kesenjangan antara standar dan tindakan-aksi kunci yang tercantum di buku pegangan dan realitas dalam konteks lokal. Tantangan harus diperiksa dan strategi untuk perubahan diidentifikasi dalam rangka mewujudkan standar. Program dan kebijakan strategi kemudian dapat dikembangkan dan advokasi dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan.

Standar Minimum INEE dikembangkan untuk memperbaiki cara dimana aksi kemanusiaan bertanggung jawab atas hak-hak pendidikan dan kebutuhan orang yang terkena bencana. Tujuannya adalah untuk membuat perbedaan yang signifikan bagi kehidupan orang yang terkena krisis. Tidak ada satupun buku pegangan yang bisa mencapai ini - hanya Anda yang dapat. INEE menyambut umpan balik Anda di Standar Minimum INEE edisi 2010 ini, yang akan membantu untuk menginformasikan revisi mendatang. Harap gunakan Formulir Komentar di bagian belakang buku pegangan atau di [www.ineesite.org/feedback](http://www.ineesite.org/feedback).

## **Alat-alat untuk membantu melaksanakan dan melembagakan Standar Minimum INEE**

Bahan untuk mendukung penerapan dan pelembagaan Standar Minimum INEE tersedia di situs INEE: [www.ineesite.org/standards](http://www.ineesite.org/standards).

### **Terjemahan Standar Minimum INEE: [www.ineesite.org/translations](http://www.ineesite.org/translations)**

Buku pegangan Standar Minimum INEE edisi 2004 tersedia dalam 23 bahasa. Edisi sekarang akan diterjemahkan dalam bahasa Arab, Perancis, Spanyol, Portugis dan bahasa lainnya.

### **Toolkit INEE: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit)**

*Toolkit* INEE berisi Buku Pegangan Standar Minimum INEE, pelatihan dan materi promosi (termasuk semua terjemahan), serta sebagai alat praktis untuk menyesuaikan indikator dengan pengaturan lokal dalam rangka mewujudkan standar. Alat-alat ini dihubungkan dengan setiap domain dalam buku pegangan serta pengarus-utamaan isu-isu kunci di buku pegangan.

*Toolkit* ini juga berisi berbagai alat INEE yang telah dikembangkan untuk melengkapi dan mendukung Buku Pegangan Standar Minimum INEE: misalnya, Catatan Panduan untuk Konstruksi Sekolah yang lebih Aman, Catatan Panduan tentang Kompensasi Guru, Catatan Panduan tentang Belajar dan Mengajar, Buku Saku untuk Pendidikan Inklusi dan Buku Saku Gender.

### **Alat referensi Standar Minimum INEE: [www.ineesite.org/MSreferencetool](http://www.ineesite.org/MSreferencetool)**

Alat ini adalah panduan referensi cepat dalam bentuk pamflet 'yang sulit dirusak', daftar semua standar, aksi kunci dan catatan panduan dalam format yang mudah-untuk-membacanya.

### **Daftar-pembanding Pelembagaan Standar Minimum INEE: [www.ineesite.org/institutionalisation](http://www.ineesite.org/institutionalisation)**

Dikembangkan untuk menargetkan kebutuhan khusus dari berbagai jenis organisasi (badan-badan PBB, LSM, pemerintah, donor dan badan-badan koordinasi pendidikan dan kelompok pendidikan), daftar-pembanding ini mengartikulasikan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk mengintegrasikan standar minimum internal dan kerja-kerja bilateral dan multilateral.

## **Bagaimana saya sebaiknya menggunakan Standar Minimum INEE?**

Selalu gunakan Standar Dasar ketika menerapkan standar-standar dalam domain lainnya: Akses dan Lingkungan Belajar, Pengajaran dan Pembelajaran, Guru dan Tenaga Pendidikan Lainnya, dan Kebijakan Pendidikan. Juga bacalah pengantar singkat untuk setiap domain standar, yang menetapkan isu utama yang relevan dengan domain tersebut. Alat-alat bantu teknis untuk praktik yang baik dalam membantu menerapkan standar dapat ditemukan dalam *Toolkit* INEE: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit).

Buku Pedoman Standar Minimum INEE ini dirancang untuk digunakan pada saat tanggap kemanusiaan untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi (lihat contoh 1 di bawah). Buku Pedoman ini akan paling efektif jika para pemangku kepentingan pendidikan sudah akrab dengan buku pedoman dan telah menerima pelatihan sebelum menggunakannya selama tanggap darurat akut (lihat contoh 2 di bawah). Buku ini berharga sebagai alat bantu pelatihan untuk peningkatan kapasitas. Buku ini juga dapat digunakan sebagai alat advokasi saat bernegosiasi urusan kemanusiaan dan penyediaan sumber daya (lihat contoh 3 di bawah). Buku pedoman ini berguna untuk kesiapsiagaan bencana, perencanaan kontinjensi dan koordinasi sektor.

## **KITA BISA MEMENUHI STANDAR MINIMUM INEE**

Sejak diluncurkan pada tahun 2004, Buku Pedoman Standar Minimum INEE telah terbukti menjadi alat yang efektif di lebih dari 80 negara untuk mempromosikan pendidikan berkualitas sejak awal darurat hingga tahap pemulihan. Standar-standar ini memberikan kerangka kerja umum dan memfasilitasi pengembangan tujuan bersama antar pemangku-kepentingan yang berbeda, termasuk anggota pemerintah, masyarakat dan lembaga internasional. Pengguna Standar Minimum INEE telah melaporkan bahwa buku pedoman ini membantu untuk:

- memastikan bahwa masyarakat terlibat sepenuhnya dalam perancangan dan pelaksanaan program pendidikan dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan;
- mengoordinasikan pengkajian pendidikan dan respon yang lebih baik;
- memperkuat sistem pendidikan nasional;
- berkontribusi dalam perbaikan pelayanan;
- memonitor dan mengevaluasi kerja pendidikan dalam situasi darurat hingga pemulihan dan pembangunan;
- membangun kapasitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan program pendidikan berkualitas tinggi;
- membantu donor berinvestasi di sektor pendidikan.

Standar Minimum INEE juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas kunci untuk penyedia pendidikan. Semakin banyak lembaga donor yang menggunakannya sebagai kerangka kerja akuntabilitas dan kualitas untuk proyek-proyek pendidikan yang mereka dukung.

Berikut ini adalah contoh bagaimana standar-standar telah digunakan dalam konteks tertentu:

1. *Rehabilitasi sekolah di Irak:* Setelah pertempuran yang telah menyebabkan orang meninggalkan rumah mereka, Standar-standar Minimum INEE digunakan untuk menginformasikan rehabilitasi lima sekolah di kota Fallujah. Pada tahun 2007, siswa, orang tua dan guru, baik yang kembali dan orang-orang yang telah tinggal selama pertempuran, mengambil bagian dalam diskusi kelompok terfokus untuk mengidentifikasi wilayah prioritas dalam program rehabilitasi sekolah. Mengacu pada panduan standar domain Partisipasi Masyarakat dan Akses dan Lingkungan Belajar, air dan sanitasi dan penyiapan ruang kelas diprioritaskan, dan Komite Pendidikan Masyarakat (*Community Education Committee - CEC*) pun dibentuk. Untuk memastikan partisipasi perempuan dalam CEC, staf proyek perempuan bertemu dengan ibu dan mahasiswi muda di rumah mereka untuk mengidentifikasi alasan rendahnya partisipasi perempuan di sekolah. Kekhawatiran tentang keselamatan untuk anak perempuan pergi ke sekolah yang ditangani dengan mengatur siswa perempuan agar berjalan ke sekolah bersama-sama atau dengan pendamping. Kegelisahan tentang guru laki-laki tunggal yang bekerja di sekolah membuat CEC untuk bekerja dengan pihak administrasi sekolah demi meningkatkan transparansi prosedur perekrutan. Ini meyakinkan para keluarga bahwa guru bisa dipercaya untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka dan membantu untuk meningkatkan pendaftaran.
2. *Koordinasi antar-lembaga pasca tsunami Samudera Hindia:* Indonesia mengalami kerugian manusia dan kerusakan fisik terburuk yang berkelanjutan akibat gempa bumi dan tsunami pada Desember 2004. Di provinsi Aceh, lebih dari 44.000 siswa dan 2.500 guru dan tenaga kependidikan tewas, dan 150.000 siswa yang selamat kehilangan akses

ke fasilitas pendidikan yang layak. Menanggapi itu, Standar-standar Minimum INEE diterima secara luas sebagai sebuah rancangan dan alat penerapan yang relevan, memungkinkan tingkat koordinasi dan praktik yang lebih baik selama fase darurat. Menggunakan Standar Minimum untuk Koordinasi, pemerintah daerah dan badan-badan internasional membentuk Komite Koordinasi Pendidikan, yang bertemu secara teratur di Banda Aceh. Kelompok Kerja Standar-standar Minimum antar-lembaga melatih stafnya untuk menggunakan standar minimum, berbagi pengalaman dan praktik yang baik. Buku pedoman itu lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan digunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Sebuah pelajaran kunci yang dipelajari adalah pentingnya mempertahankan kesinambungan staf dalam penerapan dan koordinasi situasi darurat akut. Dimasukkannya Standar Minimum INEE secara sistematis dalam pelatihan orientasi staf baru memiliki dampak signifikan pada peningkatan koordinasi dalam konteks darurat.

3. *Memperkuat kebijakan donor*: Norwegia merupakan salah satu dari lima donor yang secara langsung merujuk pada pendidikan sebagai bagian dari kebijakan kemanusiaan mereka, dan telah sangat mendukung INEE dan Standar Minimum. Pada tahun 2007, *the Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad)* membentuk *Emergency Education Team*, yang berkomitmen untuk mempromosikan peningkatan kesadaran, aplikasi praktis dan pemanfaatan sistematis Standar Minimum INEE kedalam Norad serta Departemen Luar Negeri Norwegia (MFA) dan mitra-mitra mereka. *Emergency Education Team* menyarankan agar MFA dan Norad mengalokasikan hibah untuk pendidikan dan berbagi informasi yang relevan dari Buletin INEE dengan rekan-rekan yang sesuai. Mereka juga merekomendasikan bahwa organisasi yang mengajukan dukungan keuangan ke Norad harus menjelaskan penggunaan Standar Minimum INEE. Standar Minimum INEE sudah dicantumkan dalam kerangka acuan misi tahunan bersama donor (termasuk UNICEF, Bank Dunia dan Uni Eropa) untuk Sudan Selatan pada tahun 2008. Norad selanjutnya mempromosikan penggunaan dan pelembagaan Standar Minimum INEE oleh lembaga mitra donor dan Departemen Pendidikan Sudan Selatan, yang bertanggung jawab

untuk rekonstruksi sektor pendidikan. Dalam pelebagaan atas Standar Minimum, Norad telah didukung oleh LSM-LSM Norwegia utama yang merupakan anggota INEE. Pada akhirnya, Emergency Education Team mendorong LSM-LSM dan lembaga penelitian di Norwegia agar mengadopsi dan mengacu pada standar-standar (INEE) dalam pengembangan program mereka. Cerminan kepemimpinan ditunjukkan oleh Pemerintah Norwegia melalui dukungan mereka terhadap INEE serta penerapan Standar Minimum INEE dalam diskusi global dan debat tentang pendidikan, khususnya pada guru, gender dan situasi darurat.

Untuk contoh-contoh lain pada penerapan dan dampak Standar Minimum INEE di seluruh Dunia, kunjungi: [www.ineesite.org/MScasestudies](http://www.ineesite.org/MScasestudies).

## HUBUNGAN STRATEGIS

### **Apa hubungan antara Standar Minimum INEE dengan Standar Minimum Proyek Sphere untuk Aksi Kemanusiaan?**

Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum Proyek Sphere dalam Penanggulangan Bencana, yang diluncurkan pada tahun 1997 oleh sekelompok LSM kemanusiaan dan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, mengartikulasikan hak-hak atas bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terkena dampak bencana. Buku Pedoman Sphere mencakup Piagam Kemanusiaan dan standar minimum untuk sektor penyediaan air, sanitasi dan promosi kebersihan, keamanan pangan dan gizi, tempat tinggal, pemukiman dan barang non-makanan, dan tindakan kesehatan. Standar Minimum INEE menyiratkan inti dari Proyek Sphere: bahwa semua langkah yang memungkinkan harus diambil untuk mengurangi penderitaan manusia yang ditimbulkan oleh bencana dan konflik, dan bahwa orang yang terkena bencana memiliki hak untuk hidup bermartabat. Pada bulan Oktober 2008, Proyek Sphere dan INEE menandatangani Perjanjian Persahabatan dimana Proyek Sphere mengakui kualitas Standar Minimum INEE dan proses konsultasi yang luas dalam penyusunannya. Dengan demikian, Proyek Sphere merekomendasikan Standar Minimum INEE untuk digunakan sebagai pendamping dan standar melengkapi Piagam Kemanusiaan

Proyek Sphere dan Standar Minimum dalam Respon Bencana. Perjanjian Persahabatan ini memperkuat pentingnya memastikan bahwa hubungan lintas-sektoral antara pendidikan dengan sektor yang direpresentasikan dalam Sphere dibuat pada awal masa darurat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak krisis dan untuk meningkatkan akuntabilitas dari sistem kemanusiaan dalam kesiapsiagaan dan respon.

Panduan yang relevan dari Buku Pegangan Sphere direferensi-silangkan di seluruh bagian Buku Pedoman Standar Minimum INEE edisi ini. Demikian pula, panduan untuk pendidikan telah terintegrasi ke dalam Buku Pedoman Sphere edisi 2011. Penggunaan Standar Minimum INEE sebagai pendamping Sphere. Buku Pedoman ini akan membantu untuk memastikan bahwa hubungan antar-sektoral dilakukan melalui penilaian kebutuhan multi-sektoral, diikuti dengan perencanaan bersama dan respon yang holistik.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum Sphere dalam Penanggulangan Bencana, kunjungi:

**[www.sphereproject.org](http://www.sphereproject.org)**.

### **Apa hubungan antara Standar Minimum INEE dan Klaster Pendidikan IASC?**

Klaster Pendidikan, yang secara global dipimpin oleh UNICEF dan Save the Children, merupakan komitmen untuk kepastian, kesiapsiagaan dan respon dalam bidang pendidikan dalam situasi darurat. Dimana memungkinkan, Klaster Pendidikan merupakan mekanisme koordinasi kunci untuk mendukung negara-negara dalam menentukan kebutuhan pendidikan dalam situasi darurat dan menanggapiya bersama-sama secara terkoordinasi. Standar Minimum INEE adalah alat dasar yang digunakan oleh Klaster Pendidikan untuk menyediakan kerangka kerja untuk memastikan respon pendidikan berkualitas.

Klaster Pendidikan Global dan Klaster Pendidikan berbasis-negara menggunakan standar-standar untuk:

- Meningkatkan kualitas koordinasi klaster, memfasilitasi dialog antar-instansi dan pengembangan tujuan bersama;
- Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan kesiapsiagaan, pengurangan risiko dan respon, termasuk melalui penilaian kebutuhan bersama dan pemantauan dan evaluasi terkait;
- Melatih staf dan mitra dan mendukung usaha-usaha pengembangan kapasitas;
- Pencarian dana;
- Mendukung dialog antar-lembaga dan advokasi antara anggota cluster, donor dan sektor lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi:

***<http://onerresponse.info/GlobalClusters/Education>***.

## **Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan tentang Standar Minimum INEE**

### **Bagaimana kita memastikan bahwa INEE Standar Minimum INEE dapat memperkuat standar pemerintah untuk pendidikan yang ada?**

Sudah banyak kementerian pendidikan yang telah mengembangkan standar pendidikan nasional. INEE mengakui dan mendukung peran utama otoritas nasional dalam mendefinisikan hukum pendidikan dan kebijakan dan dalam menjamin penyediaan layanan pendidikan dasar untuk semua anak yang hidup di negara, termasuk pengungsi, penyintas dan anggota kelompok minoritas. Dalam situasi dimana sudah ada standar nasional, perbedaan dalam lingkup, maksud dan isi; maka standar-standar tersebut dan Standar Minimum INEE harus dianalisis. Pengalaman menunjukkan bahwa Standar Minimum INEE umumnya kompatibel dengan standar nasional pendidikan. Standar Minimum ini adalah alat yang berguna untuk melengkapinya, menambah dan membantu mencapai standar nasional. Standar Minimum ini menyediakan strategi untuk implementasi dan bimbingan khusus untuk situasi darurat yang mungkin tidak akan sepenuhnya diperhatikan dalam kebijakan atau strategi nasional.

### **Standar Minimum INEE menetapkan standar yang tinggi – mengapa disebut ‘minimal’?**

Karena Standar Minimum INEE didasarkan pada hak atas pendidikan, sebagaimana dikodifikasikan dalam berbagai instrumen hukum dan perjanjian internasional, maka panduan dalam buku pedoman ini tidak dapat berada di bawah hak-hak tersebut. Standar-standar ini mungkin tampak tinggi karena mengacu pada hak asasi manusia internasional yang telah disepakati serta praktik yang baik, tetapi standar-standar ini juga menjelaskan persyaratan minimum untuk pendidikan yang berkualitas dan martabat manusia.

### **Adakah cara untuk menggunakan Standar Minimum INEE dengan keuangan dan sumber daya pendidikan yang terbatas?**

Standar Minimum INEE dapat dipergunakan melalui tiga cara dalam konteks sumber daya yang terbatas. Pertama, banyak aspek standar mendefinisikan praktik yang baik tanpa memerlukan biaya tinggi. Sebagai contoh, standar partisipasi masyarakat tidak memerlukan biaya tambahan banyak, tetapi penerapannya dapat meningkatkan kualitas dan pendidikan kerja kemanusiaan. Hal ini membantu menghemat waktu dan sumber daya dalam jangka panjang dan dapat memberikan kontribusi efek positif yang lebih lama. Kedua, Standar Minimum INEE bisa digunakan untuk mengadvokasi dan meningkatkan pendanaan pendidikan yang lebih efektif dalam situasi darurat dan pemulihan. Ketiga, Standar Minimum INEE dapat digunakan untuk memastikan bahwa dinas pendidikan dan organisasi lain dapat mengambil keputusan yang baik di awal respon dan untuk menghindari biaya yang harus dikeluarkan dalam memperbaiki sebuah program atau sistem yang dirancang dengan buruk.

# 1

**DOMAIN SATU:**

**STANDAR-STANDAR DASAR**

# Standar-Standar Dasar

## Partisipasi Masyarakat

### Standar 1 Partisipasi

Anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif, transparan dan tanpa diskriminasi dalam analisis, perencanaan, desain, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi respon pendidikan.

### Standar 2 Sumber Daya

Sumber daya komunitas teridentifikasi, dimobilisasi dan digunakan untuk menerapkan kesempatan belajar yang sesuai usia.

### Standar 1 Koordinasi

Mekanisme koordinasi untuk pendidikan ditetapkan dan dukungan pemangku kepentingan berjalan untuk menjamin akses dan kelangsungan pendidikan yang berkualitas.

## Koordinasi

### Standar 1 Pengkajian

Pengkajian pendidikan yang tepat waktu terhadap situasi darurat dilakukan secara transparan, partisipatif dan holistik.

### Standar 2 Strategi Respon

Strategi respon pendidikan inklusif mencakup gambaran yang jelas tentang konteks, hambatan terhadap hak untuk pendidikan dan strategi untuk mengatasi hambatan.

## Analisis

### Standar 3 Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap kegiatan respon pendidikan dan kebutuhan belajar yang berkembang dari populasi yang terkena dampak.

### Standar 4 Evaluasi

Evaluasi yang sistematis dan tidak memihak memperbaiki respon kegiatan pendidikan dan meningkatkan akuntabilitas.

Bab ini merinci standar-standar untuk:

- Partisipasi masyarakat: Partisipasi dan sumber daya
- Koordinasi
- Analisis: pengkajian, strategi respon, pemantauan, evaluasi.

Standar-standar yang dijelaskan di sini sangat penting demi respon pendidikan yang efektif. Standar-standar tersebut merupakan dasar untuk aplikasi standar untuk Akses dan Lingkungan Belajar, Belajar dan Mengajar, Guru dan Tenaga Pendidikan Lainnya, dan Kebijakan Pendidikan.

Respon pendidikan darurat yang efektif didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat, yakni proses dan kegiatan yang memberdayakan masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dan mengambil tindakan terhadap masalah pendidikan. Keterlibatan dan kepemilikan komunitas meningkatkan akuntabilitas, memperkuat mobilisasi sumber daya lokal dan mendukung pemeliharaan pelayanan pendidikan dalam jangka panjang. Partisipasi memfasilitasi identifikasi isu-isu pendidikan khusus pada konteks lokal dan cara untuk mengatasinya. Dengan cara ini, partisipasi masyarakat dalam pengkajian, perencanaan, implementasi, pengelolaan dan pemantauan membantu untuk memastikan bahwa respon pendidikan sesuai dan efektif.

Partisipasi masyarakat termasuk peningkatan kapasitas bagi anggota masyarakat dan membangun kegiatan pendidikan yang sudah dan sedang dilakukan. Partisipasi anak-anak dan pemuda yang dapat berkontribusi untuk ketahanan masyarakat dan pemulihan adalah sangat penting.

Ada berbagai tingkat dan bentuk partisipasi. Partisipasi simbolik mulai dari sekedar penggunaan layanan sampai dengan penerimaan keputusan yang dibuat oleh orang lain. Partisipasi penuh mengacu pada kontribusi aktif atas waktu dan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi simbolik saja tidak efektif dalam menyediakan kualitas dan tanggapan pendidikan. Partisipasi penuh dan inklusi seringkali sulit dicapai dalam situasi darurat, tetapi penting untuk bekerja ke arah itu.

Otoritas pendidikan, yang bertanggung jawab untuk memastikan hak untuk pendidikan untuk semua, harus memimpin koordinasi respon pendidikan. Pemangku kepentingan kemanusiaan internasional harus menawarkan dukungan dan peningkatan kapasitas kepada otoritas pendidikan, organisasi masyarakat sipil dan aktor-aktor lokal, dengan mengupayakan untuk tidak melanggar peran mereka yang sah. Jika otoritas pendidikan kekurangan kapasitas atau legitimasi, kepemimpinan dapat didelegasikan kepada komite koordinasi antar-agensi, seperti Klaster Pendidikan atau kelompok koordinasi sektoral lainnya, melalui sebuah kesepakatan.

Koordinasi respon pendidikan harus tepat waktu, transparan, berorientasi pada hasil dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Konteks lokal dan sifat berkembang dari kebutuhan darurat harus dianalisis dan dipahami dengan benar untuk merespon secara efektif dan untuk memastikan respon pendidikan yang 'tidak mencederai'. Analisis sektor pendidikan harus dilakukan bersama dengan sektor-sektor kemanusiaan lainnya. Tujuannya adalah untuk menentukan sifat kedaruratan, penyebab dan efeknya pada populasi, dan kemampuan otoritas nasional untuk memenuhi tugas-tugas kemanusiaannya secara resmi. Analisis harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, keyakinan dan kepercayaan lokal, praktik-praktik sosial dan keterkaitan gender, faktor-faktor politik dan keamanan, mekanisme penanggulangan dan pembangunan masa depan yang terantisipasi. Kerentanan, kebutuhan, hak dan kapasitas lembaga maupun orang yang terkena dampak, termasuk sumber daya lokal yang tersedia dan kesenjangan dalam pelayanan pendidikan untuk semua pelajar, harus diidentifikasi. Pemahaman masyarakat tentang ancaman bahaya lokal dan keterampilan yang mereka miliki atau yang diperlukan untuk pembangunan baik terkait dengan pencegahan maupun tindakan respon juga penting.

Pengumpulan dan analisa informasi harus menghasilkan data edukasional yang transparan, tersedia untuk umum dan terkumpul yang diperlukan untuk semua tahap situasi darurat hingga pemulihan. Pengumpulan dan analisis informasi dapat berkontribusi pada konflik dan ketidakstabilan secara tidak sengaja, dan penanganan yang tepat harus dilakukan untuk

menghindari hal ini. Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap respon pendidikan dan kebutuhan pendidikan yang berkembang harus inklusi dan transparan. Laporan pengawasan dan evaluasi, termasuk pelajaran yang dipetik, harus dibagikan bersama untuk meningkatkan respon pendidikan masa depan.

## Partisipasi Masyarakat Standar 1: Partisipasi

Anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif, transparan dan tanpa diskriminasi dalam analisis, perencanaan, desain, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi respon pendidikan.

**Aksi Kunci** (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan):

- Berbagai anggota masyarakat berpartisipasi aktif dalam memprioritaskan dan merencanakan kegiatan pendidikan untuk menjamin pendidikan yang aman, efektif dan adil (lihat Catatan Panduan 1-4).
- Komite pendidikan masyarakat mencakup perwakilan dari semua kelompok yang rentan (lihat Catatan Panduan 1-4).
- Anak-anak dan pemuda berpartisipasi secara aktif dalam, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan (lihat Catatan Panduan 5).
- Berbagai anggota masyarakat berpartisipasi dalam pengkajian, analisis konteks, audit sosial dari kegiatan pendidikan, review anggaran bersama, serta kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana dan mitigasi konflik (lihat Catatan Panduan 6).
- Kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas tersedia untuk anggota masyarakat (lihat Catatan Panduan 7).

## Catatan Panduan

1. **Partisipasi masyarakat inklusi:** pemegang otoritas pendidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya harus menjamin partisipasi masyarakat dalam analisis, perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi atas respon-respon pendidikan. Setiap anggota masyarakat yang terkena dampak harus dapat berpartisipasi, tanpa memandang usia, gender, etnis, agama, orientasi seksual, orang berkebutuhan khusus, status HIV atau faktor lainnya.
  - ◆ Otoritas pendidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya harus melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi:
  - ◆ kebutuhan pendidikan semua peserta didik;
  - ◆ keuangan, material dan sumber daya manusia yang tersedia secara lokal;

- ◆ hubungan antara anak laki-laki dan perempuan, pemuda dan dewasa yang telah ada serta perubahan-perubahannya;
- ◆ dinamika masyarakat, termasuk hubungan antara kelompok bahasa, dan setiap kelompok yang mungkin terkecualikan;
- ◆ masalah keamanan, kekhawatiran dan ancaman;
- ◆ cara melindungi institusi dan staf pendidikan, peserta didik dari kemungkinan serangan, termasuk kekerasan berbasis gender;
- ◆ bahaya lokal, lokasi sekolah serta ruang belajar lainnya yang dapat diakses dan aman, dan pendekatan lokal untuk pengurangan risiko bencana;
- ◆ cara-cara mengintegrasikan pesan-pesan tentang penyelamatan hidup dan pendidikan yang sensitif terhadap konflik kedalam semua aspek respon pendidikan, termasuk pesan-pesan terhadap ancaman kesehatan utama di masyarakat.

Struktur-struktur untuk mendukung hubungan kuat antara keluarga, masyarakat dan sekolah atau ruang belajar lainnya harus dikembangkan melalui pendekatan partisipatoris, konsultatif, dan inklusi (lihat juga Catatan Panduan 2-3 di bawah ini; Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 47-50; Analisis standar 2, Catatan panduan 5 pada halaman 55; Analisis 3 standar, Catatan Panduan 1-3 pada halaman 59-62, dan standar Analisis 4, Catatan Panduan 3-4 pada halaman 64-65).

2. **Komite pendidikan masyarakat'** mengacu pada sebuah kelompok yang mengidentifikasi dan membahas kebutuhan pendidikan dan hak-hak semua peserta didik dalam suatu komunitas. Nama lainnya mungkin termasuk 'persatuan orang tua murid dan guru' atau 'komite sekolah'. Mereka dapat membantu masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas atau dengan melibatkan otoritas pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya demi mendukung program pendidikan. Jika komite pendidikan masyarakat belum terbentuk, pembentukannya harus didorong (lihat juga catatan Panduan 3 dan 7 di bawah).
  - ◆ Komite pendidikan masyarakat harus mewakili semua kelompok dalam masyarakat dan dapat mencakup:
  - ◆ Administrator sekolah, guru dan staf;

- ◆ Orang tua atau wali murid
- ◆ Anak-anak dan pemuda;
- ◆ Staf dari organisasi masyarakat sipil;
- ◆ Perwakilan dari LSM lokal dan organisasi keagamaan;
- ◆ Tetua adat
- ◆ Pekerja kesehatan.

Juga penting untuk melibatkan wakil kelompok-kelompok rentan. Anggota komite pendidikan masyarakat harus dipilih melalui proses partisipatif yang relevan dan sesuai dengan konteks lokal dan yang memungkinkan perempuan dan laki-laki dan anak perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi secara adil.

Dalam situasi darurat yang kompleks, dimana perbedaan sosial seperti etnis, agama suku dan ras dapat dimanfaatkan, komite pendidikan masyarakat harus bekerja dengan semua pihak. Sementara inklusi adalah tujuan, keamanan individu dan kelompok harus diutamakan. Komite harus bertujuan untuk menyediakan pendidikan dengan aman, tidak memihak dan tepat untuk semua orang di masyarakat. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang perubahan konteks sosial-ekonomi dan politik dan berkomunikasi dengan para pengambil keputusan di semua tingkatan (lihat juga Standar analisis 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 47-50).

3. **Peran dan tanggung jawab** anggota komite pendidikan masyarakat harus secara jelas didefinisikan dan mungkin termasuk:
- ◆ pertemuan secara teratur untuk menangani masalah-masalah yang muncul;
  - ◆ menyimpan catatan rapat dan keputusan-keputusan;
  - ◆ memobilisasi keuangan masyarakat;
  - ◆ menentukan pendekatan yang tepat dan sensitif terhadap usia dan budaya untuk memastikan bahwa program-program pendidikan menghormati kebutuhan dan hak-hak peserta didik. Contohnya termasuk kalender sekolah yang fleksibel dan kurikulum yang sesuai dengan usia yang mencerminkan konteks masyarakat;

- ◆ berkomunikasi dengan masyarakat dan otoritas pendidikan daerah dan nasional untuk mempromosikan hubungan baik antara anggota masyarakat dan para pengambil keputusan di luar komunitas;
  - ◆ memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas akses dan kualitas pendidikan cukup akuntabel;
  - ◆ pemantauan penyediaan pendidikan untuk membantu memastikan kualitas belajar-mengajar;
  - ◆ mengumpulkan dan memantau informasi terpilah pada siapa yang ikut dan siapa yang tidak berpartisipasi dalam kesempatan belajar;
  - ◆ mempromosikan keamanan dari serangan dan memperkuat keamanan staf dan siswa pergi-pulang sekolah;
  - ◆ memastikan bahwa pengurangan risiko bencana termasuk dalam penyediaan pendidikan;
  - ◆ memastikan dukungan psikososial yang sesuai.
- (Lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 47-50).

4. **Rencana aksi pendidikan lokal:** otoritas pendidikan lokal, masyarakat dan komite pendidikan masyarakat harus memprioritaskan dan merencanakan kegiatan pendidikan melalui proses perencanaan partisipatif yang akan menghasilkan rencana aksi pendidikan berbasis komunitas. Sebuah rencana pendidikan berbasis komunitas harus mengacu pada rencana pendidikan nasional, jika ada, dan menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan kualitas program pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ini harus mencerminkan kebutuhan, hak, kepedulian dan nilai-nilai dari komunitas yang terkena dampak darurat, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rentan.

Rencana aksi pendidikan dititikberatkan pada terjaminnya kelangsungan pendidikan.

Beberapa tujuannya, termasuk:

- ◆ mengembangkan visi bersama tentang lingkungan belajar-mengajar, dijelaskan dalam bentuk kegiatan, indikator dan target, dan kerangka waktu;
- ◆ adaptasi kurikulum dengan konteks tertentu, termasuk kepekaan konflik dan pengurangan risiko bencana yang sesuai;

- ◆ menyetujui prosedur pengawasan, perekrutan dan pelatihan staf, dan dukungan serta kompensasi guru;
- ◆ mengutamakan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk mengurangi diskriminasi dan menciptakan sebuah pemahaman bersama bahwa pendidikan harus tersedia, dapat diakses, mudah beradaptasi dan dapat diterima;
- ◆ mendapatkan persetujuan dan komitmen bersama pada prioritas untuk mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung dan aman, termasuk melindungi pendidikan dari serangan;
- ◆ menggambarkan tugas-tugas tertentu dan tanggung jawab otoritas pendidikan, yang secara hukum bertanggung jawab untuk melindungi hak atas pendidikan, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. ini mungkin termasuk mobilisasi sumber daya, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, dan koordinasi dengan lembaga eksternal dan sektor lain termasuk keamanan pangan, kesehatan, kebersihan, nutrisi, penyediaan air dan sanitasi.

Rencana aksi harus memasukkan pengkajian dan pemantauan secara teratur yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk membantu mempertahankan partisipasi masyarakat yang luas. (lihat juga Koordinasi standar 1 pada halaman 40-44; Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 47-50; Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya standar 2 pada halaman 122-124; Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 6 pada halaman 136; Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan Panduan 3 pada halaman 139, dan Standar Sphere dalam bab-bab tentang Air Minum, Sanitasi dan Promosi Kebersihan, Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Layanan Kesehatan).

##### 5. **Partisipasi anak-anak dan pemuda dalam kegiatan pendidikan:**

Anak-anak dan pemuda memiliki hak untuk didengarkan dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk pengembangan dan pengelolaan sistem pendidikan. Mereka harus diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi dengan lingkungan yang aman dan ramah demi dialog yang konstruktif.

Cara-cara yang terkait dengan budaya yang tepat untuk membantu anak-anak dan pemuda mengekspresikan diri yang dapat digunakan adalah seperti seni, musik dan drama (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 1 dan 6 pada halaman 132-133 dan 136).

Anak-anak dan pemuda harus dilatih untuk mendukung dan melindungi kesejahteraan sosial dan emosional mereka serta anggota keluarga dan teman sebaya mereka. Anak-anak dan pemuda seringkali sangat membantu dalam mengidentifikasi siapa saja yang tidak bersekolah setelah situasi darurat dan membantu mereka untuk hadir kembali. Mereka juga dapat membantu teman yang terluka atau orang dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan. Pengembangan kapasitas harus menekankan kemampuan mereka untuk melakukan perubahan positif, termasuk pembangunan perdamaian dan mengatasi akar penyebab konflik dan bencana. Sebagai contoh, pelatihan dapat mendukung anak-anak dan pemuda untuk melaporkan dan mencegah penyalahgunaan dalam lingkungan belajar dan mengambil bagian dalam mediasi rekan atau resolusi konflik (lihat juga Catatan Panduan 7 di bawah ini; Akses dan lingkungan belajar standar 2 pada halaman 78-85; Guru dan tenaga kependidikan lainnya standar 3, catatan panduan 5-6 pada halaman 127).

Tugas-tugas seperti distribusi bantuan atau pembangunan tempat penampungan dapat memberikan peluang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang penting bagi masyarakat mereka. Partisipasi tersebut dapat menawarkan alternatif yang positif untuk menghindarkan keterlibatan mereka dalam kejahatan atau kelompok bersenjata, memiliki manfaat psikososial yang kuat dan membantu masyarakat luas untuk menghargai kontribusi dari pemuda.

Partisipasi pemuda dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi program pendidikan, terutama keterampilan dan pelatihan mata pencaharian, membantu memastikan bahwa program-program ini dapat memenuhi kebutuhan mereka saat ini maupun di masa

depan. Upaya-upaya khusus harus dilakukan untuk mendorong anak perempuan dan perempuan muda agar berpartisipasi untuk memastikan bahwa suara mereka didengar karena akses mereka ke pendidikan dan kebutuhan pendidikan mungkin berbeda dari rekan-rekan pria mereka (lihat juga *Standar Minimum Jaringan untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, standar Penciptaan Pekerjaan dan standar-standar Pengembangan Usaha).

6. **Audit sosial** adalah evaluasi program pendidikan berbasis-komunitas yang digunakan untuk:
- ◆ Menentukan orang-orang, dana dan bahan-bahan yang tersedia untuk program tersebut;
  - ◆ Mengidentifikasi kesenjangan;
  - ◆ Memonitor efektivitas program.

Audit sosial tidak selalu memungkinkan untuk dilakukan pada awal atau tahap pertengahan kedaruratan. Namun, dalam konteks krisis yang berkepanjangan atau pemulihan awal, audit sosial memberikan masyarakat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka agar lebih efektif memantau program pendidikan dan untuk mendokumentasikan pelanggaran hak-hak mereka. Partisipasi dalam audit sosial sangat relevan untuk kaum muda, terutama mereka yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan atau non-formal. Adalah penting bahwa hasil audit sosial dibagi bersama dengan semua anggota masyarakat dan pihak berwenang terkait (lihat juga Standar analisis 4 pada halaman 63-65).

7. **Peningkatan kapasitas** memperkuat pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan perilaku untuk membantu orang maupun organisasi mencapai tujuan mereka. Setiap upaya harus dilakukan untuk mengidentifikasi ahli pendidikan, termasuk guru, tenaga kependidikan lainnya serta penyusun kurikulum, dalam populasi yang terkena dampak untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Jika teridentifikasi bahwa keahlian lokal tidak mencukupi, atau jika orang tidak mampu atau tidak mau membantu membangun ulang

sistem pendidikan, maka peningkatan kapasitas bagi anggota komunitas mungkin tepat. Pengkajian harus memeriksa kapasitas, kebutuhan dan tanggapan yang berbeda dari anak-anak laki-laki dan perempuan, pemuda dan orang dewasa dalam masyarakat, termasuk kelompok rentan. Program pelatihan harus mengkaji kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya serta cara untuk mengatasinya. Kegiatan tersebut harus mendorong rasa kepemilikan dan pemeliharaan program pendidikan oleh masyarakat dan koordinasi dengan sektor lain.

## Partisipasi Masyarakat Standar 2: Sumber Daya

Sumber daya komunitas diidentifikasi, dimobilisasi dan digunakan untuk menerapkan kesempatan belajar yang sesuai usia.

### Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Masyarakat, tenaga pendidikan dan pelajar mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya lokal untuk memperkuat akses terhadap pendidikan berkualitas (lihat Catatan Panduan 1-3).
- Otoritas pendidikan, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan kemanusiaan mengenali keterampilan yang ada dan pengetahuan dan disain program-program pendidikan untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas tersebut (lihat Catatan Panduan 4-5).
- Otoritas nasional, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan kemanusiaan menggunakan sumber daya masyarakat untuk mengembangkan, mengadopsi dan memberikan pendidikan yang menggabungkan pengurangan risiko bencana dan mitigasi konflik (lihat Catatan Panduan 5).

### Catatan Panduan

1. **Sumber daya masyarakat** meliputi manusia, intelektual, linguistik, moneter dan sumber daya alam yang ada di masyarakat. Ketika merencanakan dan mendesain respon pendidikan, ketersediaan sumber daya lokal harus diidentifikasi dan dianalisa untuk menentukan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk pendidikan.

Sumber daya masyarakat tidak menggantikan tanggung jawab hukum otoritas nasional. Sumber daya masyarakat dapat meningkatkan keamanan, akses dan kualitas belajar-mengajar. Kontribusi terhadap lingkungan fisik termasuk dukungan material dan tenaga kerja untuk pemeliharaan, pembangunan dan perbaikan pusat pendidikan anak usia dini, sekolah dan ruang belajar lainnya. Kontribusi untuk mempromosikan perlindungan dan emosional, fisik dan kesejahteraan

sosial mungkin termasuk dukungan psikososial untuk pelajar dan guru, fasilitator dan perawat.

Motivasi Guru dapat diperbaiki melalui sumber daya yang dialokasikan untuk gaji dan bentuk kompensasi lainnya. Catatan mobilisasi sumber daya harus disimpan demi transparansi dan akuntabilitas. Pemantauan harus memastikan bahwa anak-anak tidak dieksploitasi dengan melakukan pekerjaan fisik yang di luar kemampuan mereka (lihat juga Akses dan lingkungan belajar standar 2 pada halaman 78-85, Akses dan lingkungan belajar standar 3, Catatan Panduan 1-4 pada halaman 86-89; dan Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan Panduan 4 pada halaman 139-140).

2. **Mempromosikan akses dan keamanan:** pemegang otoritas pendidikan, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan kemanusiaan harus mendorong anggota masyarakat untuk mengidentifikasi dan membantu anak-anak yang rentan dan pemuda untuk ke sekolah dan mengakses kegiatan belajar lainnya secara teratur.

Contohnya, perempuan dan kelompok pemuda memberikan pakaian yang sesuai untuk anak-anak dari keluarga miskin atau makanan keluarga yang tergantung pada anak sebagai pencari nafkah. Anggota masyarakat harus bekerja dengan otoritas pendidikan untuk memastikan bahwa sekolah, pendidikan anak usia dini dan ruang belajar lainnya adalah tempat yang aman untuk anak-anak dan pemuda. Mereka dapat mengatur akses dan transportasi yang aman dan dukungan penjangkauan untuk daerah terpencil. Hambatan fisik harus dihilangkan untuk mempromosikan aksesibilitas bagi pelajar berkebutuhan khusus. Perempuan bisa berfungsi sebagai asisten kelas atau menjaga keamanan dari pelecehan untuk mendorong kehadiran anak perempuan dan pelajar berkebutuhan khusus.

Ketika pemuda tidak dapat menghadiri kelas dengan anak-anak muda untuk alasan perlindungan atau budaya, masyarakat dapat mengadvokasi dan mendesain program pendidikan non-formal seperti pendidikan sebaya, pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis, dan

pelatihan pengembangan usaha kecil. Sumber daya masyarakat harus digunakan untuk mengembangkan, mengadopsi dan berbagi informasi mengenai pendidikan pengurangan risiko bencana dan respon kesiapsiagaan masyarakat (lihat juga Catatan panduan 5 di bawah ini; Akses dan standar lingkungan belajar 2-3 pada halaman 78-92, dan *Standar Minimum Jaringan untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, Pengembangan Usaha standar).

3. **Membangun untuk jangka panjang:** personil pendidikan dan masyarakat harus berpartisipasi dalam pelatihan tentang peran dan tanggung jawab untuk jangka panjang. Termasuk pelatihan pada manajemen dan mobilisasi sumber daya, pemeliharaan fasilitas, kesadaran berkebutuhan khusus dan langkah khusus untuk menjamin partisipasi anak dan pemuda.
4. **Pengakuan kontribusi masyarakat:** Semua perencanaan, pelaksanaan program dan pelaporan harus memasukkan informasi tentang kontribusi masyarakat. Kontribusi masyarakat untuk (re)konstruksi pendidikan dapat bersifat fisik, seperti bahan bangunan. Mereka mungkin bersifat kualitatif, yang berarti tidak dapat diukur dengan angka, seperti keterampilan lokal. Kontribusi masyarakat yang kuat mencerminkan kepemilikan dan membantu untuk memastikan dukungan jangka panjang. Namun, dukungan eksternal lebih lanjut tidak boleh bergantung pada sumbangan masyarakat tersebut. Tanggung jawab hukum untuk pendidikan terletak pada otoritas nasional. Partisipasi dan kontribusi pemuda dalam inisiatif-inisiatif pendidikan sebaya, mobilisasi masyarakat dan pengembangan masyarakat harus didorong dan diakui. Partisipasi pemuda sangat menjadi penting dalam tahapan desain dan pengkajian kebutuhan.
5. **Kapasitas Lokal:** Pengembangan, adaptasi dan penyampaian pendidikan untuk pengurangan risiko bencana dan mitigasi konflik harus memanfaatkan dan memperkuat strategi penanggulangan dan kapasitas lokal yang positif.

Akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan partisipasi oleh kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat dapat mempengaruhi intervensi pendidikan dan meningkatkan eksklusi atau divisi. Kontributor individu atau kelompok tidak boleh terlalu disukai dalam rencana pendidikan atau program karena dapat merugikan orang-orang yang tidak bisa berkontribusi. Mereka yang tidak memberikan kontribusi tidak boleh didiskriminasikan (lihat juga analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 47-50 dan kebijakan pendidikan standar 1, Catatan Panduan 6 di halaman 137).

## Koordinasi Standar 1: Koordinasi

Mekanisme Koordinasi untuk pendidikan ditetapkan dan dukungan pemangku kepentingan berjalan untuk menjamin akses dan kelangsungan pendidikan yang berkualitas.

### Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Otoritas pendidikan, yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak atas pendidikan, dianggap berperan dalam kepemimpinan bagi respon pendidikan, termasuk mengadakan dan berpartisipasi dalam mekanisme koordinasi dengan pemangku kepentingan pendidikan lainnya (lihat Catatan panduan 1).
- Komite koordinasi antar-lembaga mengkoordinasikan pengkajian, perencanaan, pengelolaan informasi, mobilisasi sumber daya, pengembangan kapasitas dan advokasi (lihat Catatan Panduan 1).
- Berbagai tingkat dan jenis pendidikan dipertimbangkan dalam kegiatan koordinasi (lihat Catatan panduan 1).
- Dalam mendukung kegiatan pendidikan, otoritas pendidikan, donor, badan-badan PBB, LSM, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menggunakan struktur pembiayaan yang transparan, adil dan terkoordinasi, dan tepat waktu (lihat Catatan panduan 2).
- Mekanisme transparansi untuk berbagi informasi pada perencanaan dan koordinasi tanggapan ada di dalam komite koordinasi dan seluruh kelompok koordinasi (lihat Catatan panduan 3-4).
- Pengkajian bersama dilakukan untuk mengidentifikasi kapasitas dan kesenjangan dalam respon pendidikan (lihat Catatan panduan 4).
- Semua pemangku kepentingan mematuhi prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, tanggung jawab dan akuntabilitas untuk mencapai hasil (lihat Catatan panduan 5-6).

### Catatan panduan

1. **Komite koordinasi antar-lembaga**, yang mengkoordinasi respon pendidikan, harus mencerminkan keterwakilan yang luas. Otoritas pendidikan nasional harus memberikan kepemimpinan, namun keterwakilan pemerintah daerah dan kelompok harus tepat. Jika

kapasitas otoritas pendidikan atau legitimasinya belum terpenuhi, kepemimpinan dapat didelegasikan kepada lembaga lain melalui sebuah perjanjian. Sebuah kelompok koordinasi pendidikan yang sudah ada sebaiknya mengambil tanggung jawab ini, atau apabila sistem klaster IASC diaktifkan, sebuah Klaster Pendidikan harus dibentuk.

Bagaimanapun, wakil dari otoritas pendidikan yang relevan harus selalu terlibat dalam pengambilan keputusan. Koordinasi kelompok mungkin diperlukan di tingkat nasional dan lokal, tergantung pada sifat dari krisis. Peran dan tanggung jawab anggota harus ditetapkan dalam Kerangka Acuan untuk panitia (lihat juga Kebijakan Pendidikan Standar 2, Catatan panduan 3-4 pada halaman 139-140).

Semua tingkat dan jenis pendidikan harus dipertimbangkan dalam kegiatan koordinasi, termasuk pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar, menengah, non-formal, teknis, kejuruan, lebih tinggi dan pendidikan orang dewasa.

2. **Mobilisasi sumber daya:** dana yang signifikan diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan program pendidikan berkualitas yang tepat waktu dalam situasi darurat hingga pemulihan. Setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan pendekatan-pendekatan yang inklusif, transparan, dan terkoordinasi dalam pembiayaan, termasuk pendanaan yang melalui PBB dan Proses-proses Pendanaan Terkonsolidasi (*UN Flash Appeals and Consolidated Appeals Processes*). Dalam situasi darurat akut, *UN Central Emergency Response Fund* dan sumber dana lainnya dapat menyediakan pendanaan untuk pendidikan. Akses mitra lokal terhadap sumber daya tersebut harus difasilitasi.

Pembiayaan situasi darurat harus mempertimbangkan kondisi pasar, tradisi dan tenaga kerja regional maupun nasional demi menghindari preseden yang tidak dapat ditangani. Alokasi sumber daya harus disampaikan melalui analisis politik, khususnya dalam situasi konflik, untuk menghindari *fuelling division*. Kebijakan yang terkoordinasi untuk kompensasi guru dan tenaga kependidikan lainnya dan pembayaran atau pembiayaan pendidikan lainnya sangat penting. Pengaturan

pembiayaan situasi darurat harus diselaraskan dengan pengaturan jangka panjang (misalnya dana multi-donor atau pembiayaan modalitas pembangunan seperti pengumpulan dana atau pembiayaan nasional) untuk mendukung intervensi berkelanjutan. Pembiayaan dari sektor swasta juga harus dieksplorasi, terutama untuk pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar Standar 2, Catatan Panduan 8 pada halaman 84; Guru dan tenaga kependidikan lainnya standar 2, Catatan Panduan 2 pada halaman 122-123; Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan Panduan 4 pada halaman 139-140; Catatan Panduan INEE tentang Kompensasi Guru dan Panduan Referensi INEE untuk Pendanaan Pendidikan Eksternal, yang tersedia dalam *Toolkit INEE*: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit); dan *Standar Jaringan Minimum untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, Standar Pelayanan Keuangan Standar 5: Koordinasi dan Transparansi)

3. **Manajemen informasi dan manajemen pengetahuan** meliputi:

- pengkajian kebutuhan, kapasitas dan cakupan
- pengumpulan, penyimpanan, analisis informasi serta berbagi informasi;
- monitoring dan evaluasi;
- pelajaran yang dipetik untuk menginformasikan praktik masa depan.

Informasi yang efektif dan sistem manajemen pengetahuan dibangun dan untuk meningkatkan, lebih dari sekedar duplikat, sistem nasional. Keterlibatan mitra nasional dan lokal, seperti mereka yang bekerja di perlindungan anak, dukungan psikososial, tempat tinggal, air dan sanitasi, kesehatan dan pemulihan awal, sangat penting. Dalam jangka panjang, sistem informasi dan pengetahuan manajemen harus dirancang dan dimiliki oleh otoritas nasional dan (lihat juga Analisis standar 1, Catatan panduan 6 pada halaman 50-51; Analisis standar 2, Catatan panduan 6 pada halaman 56, dan Analisis standar 3, Catatan panduan 3 pada halaman 61-62; Kebijakan pendidikan standar 1, Catatan panduan 5 pada halaman 136, dan *Standar Minimum Jaringan untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, Standar Umum 6: Upaya koordinasi untuk Dampak Besar).

4. **Pengkajian bersama** untuk mengidentifikasi kapasitas dan kesenjangan dalam respon pendidikan harus menggunakan dan mengadaptasi *Global Education Cluster's Joint Education Needs Assessment Toolkit* atau alat-alat pengkajian kebutuhan lain yang telah disepakati sebelumnya. Pelatihan penggunaan alat-alat ini harus dimasukkan dalam kegiatan kesiapsiagaan dan perencanaan kontinjensi. Jika pemangku kepentingan individu melakukan pengkajian pendidikan, mereka harus berbagi temuan dan data dengan otoritas pendidikan dan kelompok koordinasi yang lebih luas untuk mendukung respon terkoordinasi. Di beberapa negara, sebuah pengkajian cepat multi-sektoral, yang mencakup pertanyaan-pertanyaan pendidikan, dilaksanakan dalam 48 jam setelah situasi darurat. Jika demikian, maka perlu koordinasi dengan sektor-sektor lainnya seperti kesehatan, air dan sanitasi, dan tempat tinggal (lihat juga Analisis standar 1, Catatan panduan 1-8 pada halaman 45-52).
5. **Akuntabilitas:** Sementara pemangku kepentingan individu memiliki mandat mereka sendiri, semua harus setuju atas akuntabilitas dalam berbagi informasi dan koordinasi. Ini berarti transparan tentang pengumpulan informasi, dan penggunaannya untuk menginformasikan perencanaan kerja. Apabila terdapat kesenjangan yang penting dalam respon pendidikan, Klaster Pendidikan IASC atau mekanisme koordinasi lain bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan yang relevan menangani kesenjangan untuk memenuhi kebutuhan utama. Pemantauan dan evaluasi yang terkoordinasi dapat memfasilitasi akuntabilitas kepada orang yang terkena dampak dengan berbagi informasi secara terbuka tentang hasil kerja pendidikan. Hal tersebut juga dapat mendukung penerapan Standar Minimum INEE dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasarinya dengan menggarisbawahi di mana lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional harus memfasilitasi dan memantau otoritas nasional dalam memenuhi kewajiban mereka pada hak untuk pendidikan bagi populasi yang terkena dampak (lihat juga Kebijakan Pendidikan Standar 2, Catatan panduan 5 pada halaman 140).

6. **Sebuah pendekatan yang berorientasi hasil** berarti bahwa semua pemangku kepentingan memastikan bahwa respon pendidikan terkoordinasi dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Pemantauan dan evaluasi terus menerus atas koordinasi respon pendidikan memungkinkan untuk menemukan dan menangani secara cepat kesenjangan dalam koordinasi (lihat juga Analisis Standar 3-4 pada halaman 59-65).

## Analisis Standar 1: Pengkajian

Pengkajian pendidikan yang tepat waktu terhadap situasi darurat dilakukan secara transparan, partisipatif dan holistik.

### **Aksi Kunci** (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Sebuah pengkajian awal atas pendidikan dilakukan sesegera mungkin, dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan (lihat Catatan Panduan 1).
- Pengkajian mengumpulkan data terpilah yang mengidentifikasi persepsi lokal tujuan dan relevansi pendidikan, hambatan untuk akses ke pendidikan dan kebutuhan prioritas dan kegiatan pendidikan (lihat Catatan Panduan 2).
- Kapasitas lokal, sumber daya dan strategi untuk belajar dan pendidikan diidentifikasi, sebelum dan selama darurat (lihat Catatan Panduan 2-5).
- Analisis konteks dilakukan untuk memastikan bahwa respon pendidikan adalah tepat, relevan dan sensitif terhadap potensi risiko dan konflik (lihat Catatan Panduan 3).
- Perwakilan dari populasi yang terkena dampak berpartisipasi dalam desain dan pelaksanaan pengumpulan data (lihat Catatan Panduan 2-3, 5 dan 7-8).
- Sebuah kajian komprehensif atas kebutuhan pendidikan dan sumber dayanya dalam berbagai tingkat dan jenis pendidikan dilakukan dengan partisipasi pemangku kepentingan utama (lihat Catatan Panduan 2-7).
- Komite koordinasi antar-lembaga mengkoordinasikan pengkajian dengan pemangku kepentingan dan sektor lain yang relevan, demi menghindari upaya yang berulang (lihat Catatan Panduan 6 dan 8).

### **Catatan panduan**

1. **Waktu dari pengkajian awal** harus mempertimbangkan keamanan dan keselamatan tim penilaian dan populasi yang terkena dampak. Pengkajian harus dilakukan sesegera mungkin setelah situasi darurat dan harus menilai semua jenis pendidikan di semua lokasi yang terkena dampak, jika memungkinkan. Setelah pengkajian awal, data harus diperbarui secara berkala melalui pemantauan dan evaluasi.

Termasuk review pencapaian program, kendala dan kebutuhan yang tak terpenuhi. Ketika pengkajian secara keseluruhan tidak dapat dilakukan dengan segera, pengkajian awal secara parsial tetap dapat mengumpulkan informasi untuk menginformasikan tindakan segera.

2. **Pengkajian** harus mengumpulkan data terpilah untuk menginformasikan respon pendidikan dan menilai risiko yang berkelanjutan dari konflik atau bencana. 'Pemilahan' berarti bahwa informasi tersebut dipilah menjadi beberapa bagian, dan dalam hal ini dianalisa berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Data mengidentifikasi kapasitas pendidikan, sumber daya, kerentanan, kesenjangan dan tantangan untuk menegakkan hak atas pendidikan bagi semua kelompok yang terkena dampak. Pengkajian dan kunjungan lapangan oleh penyedia layanan pendidikan dan tanggap darurat lain harus dikoordinasikan untuk menghindari ketidak-efisienan penggunaan sumber daya dan pengkajian berlebihan atas populasi yang terkena dampak atau isu tertentu (lihat juga Partisipasi Masyarakat Standar 2 pada 36-39 dan Koordinasi Standar 1 pada halaman 40-44).

Pengkajian harus memanfaatkan sumber informasi yang ada semaksimal mungkin. Pengumpulan data primer harus dibatasi dengan apa yang diperlukan untuk mengisi kesenjangan dalam pengetahuan dan menginformasikan keputusan kritis pemangku kepentingan pendidikan. Jika akses dibatasi, strategi alternatif untuk mengumpulkan informasi dapat dieksplorasi. Termasuk menghubungi para tetua adat dan jaringan masyarakat, dan mengumpulkan data sekunder dari sektor lain atau database pra-krisis. Data pra-krisis juga akan memberikan acuan perbandingan situasi darurat.

Alat-alat pengumpul data harus dibuat standar secara nasional untuk memfasilitasi koordinasi proyek dan untuk meminimalkan tuntutan pada orang yang memberikan informasi. Bila memungkinkan, alat-alat pengkajian harus dikembangkan dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan sebelum situasi darurat sebagai bagian dari perencanaan kesiapsiagaan. Alat-alat tersebut harus menyediakan

ruang untuk informasi tambahan yang dianggap penting oleh responden lokal.

Tim Pengkaji harus melibatkan anggota komunitas yang terkena dampak. Mereka harus seimbang-gender untuk menangkap lebih efektif pengalaman, kebutuhan, keprihatinan dan kapasitas pelajar laki-laki dan perempuan, guru dan tenaga pendidikan lainnya, dan orang tua dan wali. Pihak yang berwenang harus dikonsultasikan.

Pertimbangan etis, termasuk prinsip-prinsip dasar saling menghormati dan non-diskriminasi, harus ditegaskan dalam pengkajian.

Pengumpulan informasi dapat menempatkan seseorang dalam situasi ber-risiko karena sensitivitas informasi atau hanya karena mereka telah berpartisipasi dalam proses (lihat juga Catatan panduan 5 di bawah).

Pengumpulan informasi tersebut memiliki tanggung jawab untuk melindungi peserta dan harus memberitahu mereka sebagai berikut:

- tujuan pengumpulan data;
- hak untuk tidak berpartisipasi dalam proses pengumpulan data, atau untuk mundur setiap saat tanpa efek negatif;
- hak untuk kerahasiaan dan anonimitas.

(Lihat juga Analisis Standar 4, Catatan panduan 2 pada halaman 64).

3. **Analisis konteks**, termasuk risiko bencana dan analisis konflik, membantu untuk memastikan bahwa respon pendidikan adalah tepat, relevan dan sensitif terhadap potensi konflik dan bencana.

Analisis risiko mempertimbangkan semua aspek dalam konteks kesehatan, keamanan, dan keselamatan peserta didik. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa pendidikan adalah lebih sebagai pelindung daripada faktor risiko. Analisis risiko mengkaji risiko untuk pendidikan, yang mungkin termasuk:

- Kerawanan, tata pemerintahan yang buruk dan korupsi;
- Masalah kesehatan publik seperti prevalensi penyakit menular;
- Faktor sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan lainnya, termasuk bahaya industri seperti melepaskan gas beracun dan tumpahan bahan kimia;

- Risiko yang terkait dengan jenis kelamin, usia, berkebutuhan khusus, latar belakang etnis dan faktor lain yang relevan dalam konteks.

Analisis konflik mengkaji adanya atau risiko dari konflik kekerasan untuk mencoba memastikan bahwa intervensi pendidikan tidak memperburuk ketidaksetaraan yang mendasari atau konflik itu sendiri. Ini diperlukan baik dalam situasi konflik maupun bencana. Analisis konflik mengajukan pertanyaan tentang:

- Aktor yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam konflik, dipengaruhi oleh konflik atau berisiko terkena;
- Penyebab atau potensi konflik aktual dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keluhan;
- Interaksi antara para pelaku, termasuk pemangku kepentingan pendidikan, dan penyebab konflik.

Konflik analisis daerah atau negara tertentu sering tersedia dari organisasi-organisasi periset. Dari perspektif pendidikan, ini perlu dipertimbangkan. Jika analisis tidak tersedia atau tidak berfungsi, analisis konflik dapat dilakukan dengan cara lokakarya di daerah yang terkena atau melalui studi. Pemangku kepentingan pendidikan harus mengadvokasi badan yang sesuai untuk melakukan analisis konflik yang komprehensif, termasuk informasi khusus-pendidikan, serta untuk berbagi temuan dengan semua pihak yang berkepentingan.

Sebuah laporan analisis risiko berisi strategi untuk manajemen risiko bahaya alam dan buatan manusia, termasuk konflik. Strategi dapat mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, rekonstruksi dan rehabilitasi. Sebagai contoh, sekolah atau ruang belajar mungkin diperlukan untuk memiliki rencana keamanan dan kontinjensi untuk mencegah, mengurangi dan menanggapi situasi darurat. Juga bisa disiapkan peta risiko yang menunjukkan ancaman potensial dan menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan dan ketahanan pelajar.

Analisis resiko dilengkapi dengan pengkajian ketahanan masyarakat dan kearifan lokal, termasuk sumber daya dan kapasitas. Pengetahuan,

keterampilan dan kapasitas untuk mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan pemulihan dikaji dan diperkuat sebelum dan setelah situasi darurat, jika memungkinkan, melalui kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi (lihat juga Partisipasi Masyarakat Standar 1, Catatan panduan 1-4 pada halaman 28-32; Partisipasi Masyarakat Standar 2, Catatan panduan 5 pada halaman 38-39; Akses dan lingkungan belajar standar 2, Catatan panduan 11 pada halaman 85, Belajar-mengajar standar 2, Catatan panduan 6 pada halaman 107; Kebijakan pendidikan standar 1, Catatan panduan 2 dan 4 pada halaman 133-135; dan Kebijakan pendidikan standar 2, catatan panduan 3 dan 5 pada halaman 139-140).

4. **Validitas data dan metode analisis data:** analisis data harus jelas menyatakan:

- Indikator-indikator;
- Sumber data;
- Metode pengumpulan;
- Pengumpul data;
- Prosedur analisis data.

Apabila terdapat risiko keamanan untuk pengumpul data, nama organisasi yang terlibat dalam pengumpulan data, bukan nama-nama kolektor data individu, yang harus dirujuk. Keterbatasan pengumpulan data atau analisis yang dapat memengaruhi keandalan temuan, atau relevansi mereka ke situasi lain, harus diperhatikan. Misalnya, data dapat meragukan jika ada responden yang mendaftar ganda atau karena kehadiran tokoh atau atasan untuk memaksimalkan alokasi sumber daya atau untuk menghindari disalahkan. Juga harus diperhatikan jika ada masalah atau kelompok tertentu yang tidak tertangani oleh program dan sistem pemantauan.

Untuk meminimalkan bias, data harus diambil dari beberapa sumber dan dibandingkan. Teknik ini memperkuat validitas data. Sebelum kesimpulan diambil, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dulu dengan kelompok yang paling menderita, termasuk anak-anak laki-laki dan perempuan dan pemuda. Persepsi dan pengetahuan lokal harus menjadi pusat analisis untuk menghindari respon kemanusiaan

berdasarkan persepsi dan prioritas orang-orang dari luar (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan panduan 4 pada halaman 135).

5. **Peserta dalam pengkajian** harus termasuk otoritas pendidikan dan perwakilan dari populasi yang terkena dampak, termasuk kelompok rentan. Dalam pengumpulan data dan informasi, analisis, pengelolaan dan penyebarannya, partisipasi kelompok-kelompok ini mungkin dibatasi oleh situasi yang sulit selama pengkajian awal. Partisipasi ini harus meningkat sejalan dengan semakin stabilnya konteks. Pengkajian harus memfasilitasi semua bentuk komunikasi yang ada di masyarakat, termasuk penggunaan bahasa isyarat dan *Braille*, jika memungkinkan (lihat juga Kebijakan pendidikan standar 1, Catatan panduan 4 pada halaman 135).
  
6. **Kolaborasi di dalam sektor pendidikan** sendiri juga dengan sektor lain sangat penting dalam memaksimalkan kualitas, kelengkapan dan kegunaan pengkajian. Pemangku kepentingan pendidikan harus menyelaraskan pengkajian kebutuhan dengan melakukan pengkajian bersama atau dengan mengkoordinasikan pengkajian untuk menghindari duplikasi oleh lembaga yang berbeda. Pengkajian yang terkoordinasi dengan baik dapat menghasilkan bukti dari dampak situasi darurat yang lebih kuat dan memfasilitasi respon yang koheren. Pengkajian ini meningkatkan akuntabilitas pemangku kepentingan kemanusiaan dengan mendorong berbagi informasi (lihat juga Koordinasi standar 1, Catatan panduan 4 pada halaman 43). Sektor pendidikan harus bekerja sama dengan sektor lain untuk menginformasikan respon pendidikan tentang ancaman, risiko dan ketersediaan layanan.

ini mungkin termasuk bekerja dengan:

- sektor kesehatan untuk mendapatkan data epidemiologi dan informasi tentang ancaman epidemi dan mempelajari pelayanan kesehatan dasar yang tersedia, termasuk pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dan pencegahan hiv, pengobatan, perawatan dan dukungan;

- sektor perlindungan untuk mempelajari risiko yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan berbasis gender, anak yatim piatu dan kelompok rentan lainnya dalam masyarakat, hambatan-hambatan terhadap pendidikan, dan dukungan psikososial dan pelayanan sosial yang tersedia;
- sektor gizi untuk mempelajari layanan gizi berbasis sekolah, berbasis-masyarakat, serta layanan gizi lainnya
- sektor hunian dan manajemen penampungan sementara untuk mengkoordinasikan lokasi yang sesuai dan aman, akses dan konstruksi / pembangunan kembali fasilitas belajar dan rekreasi, dan penyediaan barang-barang non-makanan yang diperlukan untuk fasilitas sekolah;
- sektor air dan sanitasi untuk memastikan bahwa pasokan air dapat diandalkan dan sanitasi yang sesuai tersedia di lokasi belajar;
- sektor logistik untuk mengatur pengadaan dan pengiriman buku-buku dan perlengkapan lainnya.

(Lihat juga Koordinasi standar 1, Catatan panduan 1 dan 3-4 pada halaman 40-43 dan kebijakan pendidikan standar 2, Catatan panduan 2 pada halaman 138-139.)

7. **Pendidikan dan kebutuhan psikososial:** Data terpilah atas kebutuhan pendidikan dan psikososial serta sumber dayanya harus dikumpulkan dalam pengkajian kebutuhan umum. Anggota tim pengkaji yang mempunyai pengetahuan lokal dapat mendukung aspek-aspek pengkajian. Lembaga-lembaga harus komit dengan sumber daya, staf dan kapasitas organisasinya untuk menindak-lanjutinya.
8. **Temuan pengkajian** harus tersedia secepat mungkin sehingga kegiatan pendidikan bisa direncanakan. Data pra-krisis dan pengkajian pasca-krisis yang mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya pendidikan sumber daya dan / atau pelanggaran atau pemenuhan hak pendidikan oleh otoritas pendidikan, LSM, lembaga kemanusiaan dan masyarakat lokal juga harus disiarkan.

Otoritas pendidikan di tingkat lokal atau nasional harus mengoordinir berbagi temuan pengkajian. Jika otoritas pendidikan tidak mempunyai kapasitas, suatu aktor utama internasional, seperti komite koordinasi sektor pendidikan atau Klaster Pendidikan, dapat mengatur proses ini. Penyajian data dalam temuan pengkajian harus distandarisasi jika mungkin sehingga informasi tersebut dapat digunakan dengan mudah (lihat juga Koordinasi standar 1 pada halaman 40-44).

## Analisis Standar 2: Strategi Respon

Strategi respon pendidikan inklusi mencakup gambaran yang jelas tentang konteks, hambatan terhadap hak untuk pendidikan dan strategi untuk mengatasi hambatan.

### **Aksi Kunci** (untuk dibaca bersama dengan Catatan panduan)

- Strategi respon secara akurat mencerminkan hasil pengkajian (lihat Catatan panduan 1-2).
- Respon pendidikan semakin memenuhi kebutuhan penduduk yang terkena dampak untuk pendidikan yang inklusi dan berkualitas (lihat Catatan panduan 1, 5 dan 8).
- Strategi respon dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat atau penyedia dan tidak memperburuk dampak situasi darurat (lihat Catatan panduan 3 dan 7).
- Informasi yang dikumpulkan dari pengkajian awal dan analisis konteks secara teratur diperbarui dengan data baru untuk menginformasikan tanggapan pendidikan yang sedang berlangsung (lihat Catatan panduan 4).
- Strategi Respon termasuk peningkatan kapasitas untuk mendukung otoritas pendidikan dan anggota masyarakat dalam melaksanakan pengkajian dan melaksanakan kegiatan penanggulangan (lihat Catatan panduan 2).
- Respon pendidikan bersifat melengkapi dan diselaraskan dengan program pendidikan nasional (lihat Catatan panduan 6 dan 8).
- Data *baseline* dikumpulkan secara sistematis pada awal program (lihat Catatan panduan 9).

### **Catatan Panduan**

1. **Strategi Respon:** pemangku kepentingan pendidikan harus berinvestasi dalam analisis dan interpretasi secara menyeluruh terhadap data pengkajian untuk memastikan bahwa strategi respon mereka didasarkan pada temuan kunci dan prioritas utama yang diungkapkan dalam pengkajian. Hal ini untuk menghindari risiko temuan kajian yang sudah disepakati untuk respon program.

Strategi respon harus menunjukkan peran utama otoritas pendidikan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai contoh, tingkat pengeluaran pendidikan untuk item seperti gaji guru dan peralatan harus diselaraskan di seluruh organisasi, mempertimbangkan tingkat pengeluaran berjangka panjang dan berkelanjutan.

Strategi Respon harus didasarkan pada rencana darurat yang tepat dan yang ada dan harus dikembangkan dengan partisipasi aktif masyarakat. Strategi ini harus menunjukkan tingkatan dan jenis pendidikan yang berbeda, kesadaran atas risiko dan bahaya, dan apakah badan-badan lain juga mendukung kegiatan pendidikan. Anggaran harus dialokasikan untuk kegiatan pendidikan yang penting, termasuk pengumpulan data *baseline* dan evaluasi (lihat juga Partisipasi Masyarakat Standar 1, Catatan panduan 1 pada halaman 28-29).

Harus ada analisis atas hambatan-hambatan, termasuk hambatan gender, untuk mengakses semua tingkat dan jenis pendidikan dan kegiatan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Harus ada fleksibilitas sebanyak mungkin untuk menyediakan pendidikan inklusi dan untuk merespon meningkatnya permintaan pendidikan.

## 2. **Peningkatan kapasitas untuk pengumpulan data dan analisis:**

Strategi respon harus meliputi peningkatan kapasitas, termasuk staf otoritas pendidikan dan anggota masyarakat. Anggota masyarakat khususnya pemuda dapat dilibatkan dalam pengumpulan data dan analisis, monitoring dan evaluasi. Adalah penting untuk merekrut staf berdasarkan pertimbangan gender untuk memastikan pengumpulan dan analisis data kajian yang efektif (lihat juga Analisis standar 3, Catatan panduan 2 pada halaman 61 dan Analisis standar 4, Catatan panduan 3 pada halaman 64).

## 3. **Tidak Mencederai:** respon pendidikan situasi darurat melibatkan transfer sumber daya seperti pelatihan, pekerjaan, perlengkapan dan makanan menjadi sumber daya di lingkungan yang sering mengalami

kelangkaan. Sumber daya ini sering mencerminkan kekuasaan dan kekayaan. Ini dapat menjadi unsur konflik atau memperburuk marginalisasi atau diskriminasi dalam masyarakat. Dalam situasi konflik, beberapa pihak mungkin mencoba untuk mengontrol dan menggunakan sumber daya tersebut untuk kepentingan mereka sendiri, untuk melemahkan pihak lain atau untuk keuntungan pribadi. Jika ini terjadi, respon pendidikan dapat menyebabkan kerugian. Berdasarkan pemahaman tentang analisis risiko dan konflik, upaya-upaya harus dilakukan untuk menghindari hal ini (lihat juga Analisis standar 1, Catatan panduan 3 pada halaman 47-49).

Pengalihan sumber daya dan proses penyelenggaraan respon pendidikan situasi darurat juga dapat memperkuat kapasitas lokal untuk perdamaian. Aktivitas dapat mengurangi perpecahan dan sumber ketegangan yang mengarah pada konflik destruktif dengan membangun atau menciptakan hubungan yang baik dalam masyarakat. Misalnya, program pelatihan guru dapat menyatukan guru melalui kepentingan profesional mereka di seluruh etnis yang ada. Hubungan masyarakat adil selengkapnya dapat dipromosikan melalui penggabungan kelompok yang terpinggirkan sebelumnya.

4. **Pepemudaan strategi respon:** Pemangku kepentingan pendidikan harus secara teratur meninjau dan memperbarui strategi respon mereka selama situasi darurat sampai pemulihan dan pembangunan. Pepemudaan ini harus menunjukkan capaian terkini, perubahan-perubahan dalam keamanan dan situasi darurat serta perubahan dalam strategi itu sendiri. Harus ada perkiraan kebutuhan yang tak terpenuhi dan hak-hak serta perubahan yang tepat dalam strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Intervensi harus mempromosikan peningkatan progresif dalam kualitas, inklusi, cakupan, kesinambungan dan kepemilikan bersama.
5. **Respon donor:** Donor harus secara teratur meninjau baik kualitas maupun cakupan respon pendidikan situasi darurat untuk memastikan bahwa tingkat minimum kualitas pendidikan dan akses terpenuhi.

Perhatian khusus harus diberikan kepada pendaftaran dan retensi peserta didik dari kelompok rentan, bertujuan untuk akses yang sama ke berbagai kesempatan pendidikan di lokasi yang terkena dampak situasi darurat. 'Akses yang sama' mengacu pada kesempatan yang sama bagi anak perempuan dan anak laki-laki, peserta didik pemuda dan peserta didik dewasa, terutama mereka yang terpinggirkan karena etnis, bahasa atau berkebutuhan khusus. Pendanaan untuk respon pendidikan harus diprioritaskan sama dengan air, makanan, tempat tinggal dan kesehatan untuk menjamin penyediaan pendidikan untuk populasi yang terkena dampak. Ini termasuk masyarakat yang menampung pengungsi atau penyintas. Pendanaan yang memadai sangat penting untuk menegakkan hak untuk pendidikan untuk semua. Program tidak boleh dibatasi oleh siklus pendanaan jangka-pendek dan harus terus berlanjut ke tahap pemulihan (lihat juga Catatan panduan 7 di bawah, akses dan lingkungan belajar standar 1, Catatan panduan 1-2 pada halaman 71-74, dan *Panduan INEE untuk Pendanaan Pendidikan Eksternal*, yang tersedia dalam *Toolkit INEE*: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit))

6. **Memperkuat program nasional:** respon pendidikan situasi darurat harus diselaraskan dengan dan harus memperkuat program pendidikan nasional, termasuk pendidikan anak usia dini dan program-program kejuruan dan mata pencaharian. Ini mencakup perencanaan pendidikan lokal dan nasional, administrasi dan manajemen serta infrastruktur fisik dan layanan pelatihan guru dan dukungan. Respon pendidikan situasi darurat harus bekerja sama dengan otoritas pendidikan untuk membangun sistem yang lebih baik untuk masa depan, penguatan sistem pendidikan inklusi untuk semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus dan dari kelompok minoritas (lihat juga Kebijakan pendidikan standar 1 pada halaman 132-137 dan Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan panduan 4 pada halaman 139-140).
7. **Kesiapsiagaan tanggap darurat dan pengurangan risiko bencana:** Lembaga dan donor yang mendukung pembangunan harus mempromosikan dan mendukung kegiatan untuk pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk tanggap darurat sebagai langkah

pengecahan dan selama pemulihan setelah krisis. Investasi dalam pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dapat membuat pembiayaan menjadi efektif dan efisien karena dapat berkontribusi dalam perencanaan, koordinasi dan respon yang lebih baik oleh otoritas pendidikan dan mitra. Investasi dalam pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan mungkin juga berarti bahwa dalam situasi darurat pengeluaran-pengeluaran dapat diturunkan.

8. **Mengatasi kendala mandat organisasi:** organisasi-organisasi kemanusiaan dengan mandat yang terbatas—seperti untuk anak-anak, pendidikan dasar atau pengungsi—harus memastikan bahwa pendidikan mereka melengkapi respon orang-orang dari otoritas pendidikan dan pemangku-kepentingan pendidikan lainnya. Strategi pendidikan keseluruhan harus mencakup:
- Pendidikan anak usia dini;
  - Pendidikan dasar inklusi;
  - Kebutuhan pemuda, termasuk pendidikan menengah, tinggi dan pendidikan kejuruan;
  - Pendidikan orang dewasa;
  - Pelatihan guru untuk pra-layanan dan dalam-layanan.

Strategi untuk peserta didik dewasa harus mencakup program pendidikan non-formal membaca dan menghitung, pembangunan keterampilan hidup dan peningkatan kesadaran untuk keselamatan dan keamanan, seperti kesadaran terhadap ranjau darat. Pembangunan pendidikan di daerah yang menerima kembali para penyintas harus memberikan dukungan berjangka panjang seperti mengejar ketinggalan kelas-kelas dan pelatihan kejuruan (lihat juga Koordinasi standar 1 pada halaman 40-44 dan Belajar-mengajar standar 1-2 pada halaman 97-107).

9. **Pengumpulan data dasar:** 'Data baseline' mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari populasi yang ditargetkan sebelum kegiatan pendidikan baru dimulai. Data dasar ini membantu staf program memahami situasi pendidikan dan digunakan untuk membentuk dasar

untuk perbandingan dengan informasi yang dikumpulkan kemudian, selama monitoring dan evaluasi. Data dasar harus dikumpulkan secara sistematis. Contohnya termasuk data penduduk terpilah, tingkat kehadiran sekolah dan rasio murid-guru. Data dapat spesifik terhadap suatu intervensi. Misalnya, jika program dimaksudkan untuk meningkatkan kehadiran sekolah anak perempuan, tingkat kehadiran dari anak-anak perempuan sebelum program dimulai akan diperlukan sebagai dasarnya.

### Analisis Standar 3: Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap kegiatan respon pendidikan dan kebutuhan belajar yang berkembang dari populasi yang terkena dampak.

#### **Aksi Kunci** (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Ada beberapa sistem yang efektif untuk melakukan pengawasan kegiatan respon pendidikan dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan (lihat Catatan panduan 1).
- Kegiatan respon pendidikan dimonitor untuk menjamin keselamatan dan keamanan semua siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya (lihat Catatan panduan 1).
- Kelompok rentan dilibatkan dalam konsultasi secara teratur, terlatih dalam metodologi pengumpulan data dan terlibat dalam kegiatan pemantauan (lihat Catatan panduan 2).
- Pemilahan data pendidikan dikumpulkan secara sistematis dan teratur dan menginformasikan respon pendidikan (lihat Catatan panduan 3-4).
- Data Pendidikan dianalisis dan dibagi secara berkala dengan semua pihak terkait, khususnya masyarakat yang terkena dampak dan kelompok rentan (lihat Catatan panduan 3-4).

#### **Catatan panduan**

1. **Memantau** kegiatan apakah program dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang berubah dan bagaimana program menanggapi konteks yang berkembang. Ini:
  - Memastikan bahwa intervensi relevan dan responsif;
  - Mengidentifikasi kemungkinan untuk penyempurnaan;
  - Memberikan kontribusi untuk mitigasi konflik dan pengurangan risiko bencana;
  - Meningkatkan akuntabilitas.

Dampak program pendidikan, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan; harus dimonitor untuk memastikan bahwa dampak tersebut tidak meningkatkan marginalisasi, diskriminasi, konflik atau bencana alam. Kunjungan pemantauan tanpa pemberitahuan dapat meningkatkan validitas data pemantauan.

Desain pemantauan akan menentukan seberapa sering jenis data yang berbeda dikumpulkan, sesuai kebutuhan, dan sumber daya yang diperlukan untuk pengumpulan data dan pengolahan. Banyak jenis informasi dapat dikumpulkan dari sekolah-sekolah dan program pendidikan lainnya secara *sampling*, memberikan indikasi cepat dari kebutuhan dan masalah. Informasi tersebut dapat berupa:

- Data terpilah tentang pendaftaran dan putus sekolah;
- Apakah siswa makan sebelum masuk sekolah;
- Ketersediaan buku teks pelajaran dan bahan-bahan belajar-mengajar.

Pemantauan anak-anak dan pemuda luar sekolah dan alasan mereka untuk tidak mendaftar atau menghadiri dapat dilakukan melalui kunjungan ke sebuah sampel acak kecil rumah tangga. Selama pemantauan, penting untuk mendengarkan langsung suara-suara perempuan dan kelompok rentan. Jika data etnis atau kelompok sosial lainnya terlalu sensitif atau sulit untuk dikumpulkan secara komprehensif, survei sampel dan umpan-balik secara kualitatif, seperti percakapan informal, dapat menunjukkan adanya masalah khusus untuk kelompok-kelompok tertentu.

Sistem pemantauan dan pelaporan diperlukan untuk mengamati pelanggaran terhadap keselamatan dan kesejahteraan pelajar, guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan untuk kondisi infrastruktur pendidikan. Hal ini sangat penting dimana ada risiko serangan bersenjata, penculikan, perekrutan anak untuk angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata, kekerasan berbasis gender atau bencana alam. Untuk aspek pemantauan seperti ini, pemangku kepentingan pendidikan mungkin perlu bekerja sama dengan otoritas lokal dan nasional atau PBB dan organisasi non-pemerintah nasional untuk keamanan, keadilan, perlindungan dan hak asasi manusia. Penting untuk mempertimbangkan sensitivitas informasi yang dilaporkan.

Kegiatan respon pendidikan yang sedang dilaksanakan dapat disesuaikan jika diperlukan, berdasarkan hasil pemantauan.

2. **Orang yang dilibatkan dalam pemantauan** perlu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua kelompok dalam populasi yang terkena dampak secara sensitif budaya. Penting bahwa tim terbentuk secara imbang-gender, fasih dalam bahasa lokal dan terlatih dalam pengumpulan data. Praktik lokal mungkin mengharuskan perempuan atau kelompok minoritas dikonsultasikan secara terpisah oleh individu yang dapat dipercaya. Perwakilan masyarakat yang terkena dampak, termasuk pemuda, harus dilibatkan sedini mungkin dalam memantau efektivitas program pendidikan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini penting khususnya dalam program pendidikan non-formal kelompok tertentu, seperti gadis-gadis pemuda atau pelajar penyandang berkebutuhan khusus (lihat juga Standar Analisis 2, Catatan Panduan 2 pada halaman 54 dan Standar Analisis 4, Catatan Panduan 3 pada halaman 64).
3. **Sebuah sistem informasi manajemen pendidikan**, biasanya dikelola oleh otoritas nasional, mengompilasi dan menganalisis data pendidikan. Jika sistem informasi manajemen pendidikan sudah ada sesuai dengan konteksnya, sistem ini mungkin saja terganggu oleh situasi darurat atau mungkin perlu di-*upgrade*. Pengembangan atau perombakan sistem informasi manajemen pendidikan nasional atau semacamnya mungkin memerlukan pengembangan kapasitas pada tingkat nasional, regional dan lokal. Peningkatan kapasitas mendukung orang yang relevan untuk mengumpulkan, mengelola, menafsirkan, menggunakan dan berbagi informasi yang tersedia. Hal ini harus dimulai sedini mungkin, dengan tujuan agar sistem berfungsi, idealnya ditempatkan dalam badan pemerintah dalam tahap pemulihan (lihat juga Koordinasi standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 42; Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 5 pada halaman 136; dan Kebijakan Pendidikan Standar 2, Catatan panduan 4 pada halaman 139-140).

Perangkat lunak dan perangkat keras yang kompatibel untuk sistem informasi manajemen pendidikan sangat penting. Kantor dinas pendidikan lokal dan nasional serta sub-sektor pendidikan lainnya, seperti lembaga pelatihan nasional, harus memiliki peralatan yang

kompatibel untuk memfasilitasi pertukaran informasi. Telepon seluler yang dilengkapi dengan perangkat lunak khusus dapat meningkatkan pengumpulan data, tetapi kurangnya teknologi tidak seharusnya mencegah pengumpulan data dari wilayah yang kekurangan sumber daya.

4. **Pemantauan peserta didik** harus dilakukan bila memungkinkan selama mereka belajar dan setelah mereka menyelesaikan atau meninggalkan suatu kursus.

Pemantauan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif dapat mencakup, misalnya:

- Perkembangan motorik halus dan kasar, pembangunan kognitif dan sosio-emosional di anak-anak kecil;
- Retensi keterampilan membaca dan menghitung;
- Kesadaran dan penerapan kecakapan hidup yang penting;
- Akses ke material bacaan pasca-literasi.

Untuk pendidikan kejuruan, pemantauan harus melacak kesempatan kerja bagi peserta didik. Pemantauan pasca-program untuk pelajar memberikan umpan balik yang berharga untuk desain program (lihat juga Belajar-Mengajar standar 4 pada halaman 111-113 dan *Standar Jaringan Minimum untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, standar Penciptaan Lapangan Kerja dan standar-standar Pengembangan Usaha).

## Analisis Standar 4: Evaluasi

Evaluasi yang sistematis dan tidak memihak memperbaiki respon kegiatan pendidikan dan meningkatkan akuntabilitas.

### **Aksi Kunci** (untuk dibaca bersama dengan Catatan panduan)

- Evaluasi secara berkala kegiatan respon pendidikan menghasilkan data yang kredibel dan transparan dan menginformasikan kegiatan pendidikan masa depan (lihat Catatan panduan 1-2).
- Semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari masyarakat yang terkena dampak dan otoritas pendidikan, terlibat dalam kegiatan evaluasi (lihat Catatan panduan 3).
- Berbagi secara luas pelajaran dan praktik-praktik yang baik dan menginformasikan advokasi, program dan kebijakan di masa mendatang (lihat Catatan panduan 4).

### **Catatan panduan**

1. **Perbedaan antara pemantauan dan evaluasi:** Pemantauan dan evaluasi adalah kunci untuk mencapai tujuan dan sasaran program pendidikan. Pemantauan adalah proses yang berkelanjutan yang secara teratur mengukur kemajuan menuju tujuan dan sasaran program pendidikan. Hal ini memungkinkan staf program pendidikan untuk melakukan perubahan selama program berjalan atau siklus proyek untuk memastikan bahwa mereka tetap pada jalur untuk mencapai tujuan dan sasaran mereka.

Evaluasi lebih jarang dilakukan dibanding pemantauan, biasanya dilakukan di tengah atau di akhir program atau siklus proyek dan dilaksanakan oleh aktor eksternal atau independen. Evaluasi mengukur hasil dan mengevaluasi apakah hasil yang diharapkan telah dicapai. Evaluasi juga dapat menyebutkan apakah kegiatan masih relevan dengan prioritas, kebijakan, dan instrumen hukum yang ditentukan, dan apakah program tersebut dilaksanakan secara efisien.

2. **Evaluasi kegiatan respon pendidikan** harus menggunakan pendekatan dan metode yang menghasilkan bukti hasil program yang kredibel dan tepat waktu dan dampak yang dapat menginformasikan tindakan di masa depan. 'Dampak' adalah perubahan terukur bahwa program tersebut mempunyai pengaruh atas kehidupan manusia. Data, baik kualitatif maupun kuantitatif yang dipilah menurut jenis kelamin dan usia adalah penting. Data kuantitatif adalah tentang hal-hal yang dapat dihitung. Data ini mengukur hasil seperti pendaftaran, kehadiran, putus sekolah, dan prestasi. Data kualitatif adalah tentang hal-hal yang tidak bisa diukur dengan angka. Data kualitatif membantu untuk memahami proses dan menjelaskan hasil. Contoh data kualitatif mencakup informasi tentang apa yang terjadi di sekolah atau ruang belajar lainnya, dan alasan di balik pendaftaran, kehadiran dan tingkat putus sekolah (lihat juga Standar analisis 1, Catatan panduan 2 pada halaman 46-47 dan standar Koordinasi 1, Catatan panduan 3 pada halaman 42).
3. **Peningkatan kapasitas melalui evaluasi:** Anggaran untuk evaluasi harus mencakup lokakarya peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan yang relevan, termasuk otoritas pendidikan, wakil masyarakat dan peserta didik. Hal ini dapat memperkenalkan dan menjelaskan evaluasi, mengembangkan rencana evaluasi secara partisipatif dan transparan, dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk meninjau dan menginterpretasikan temuan bersama-sama. Pelajar, guru dan tenaga kependidikan lainnya harus terlibat dalam proses evaluasi untuk meningkatkan akurasi pengumpulan data dan mendukung pengembangan rekomendasi yang realistis yang dapat diterapkan. Misalnya, guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat menambahkan wawasan terhadap kesulitan praktis yang dihasilkan dari rekomendasi yang diusulkan (lihat juga Analisis standar 2, Catatan panduan 2 pada halaman 54; Analisis standar 3, Catatan panduan 2 pada halaman 61, dan Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan Panduan 4 pada halaman 139-140).

- 4. Berbagi temuan-temuan evaluasi dan pelajaran yang dipetik:**  
temuan kunci dalam laporan evaluasi, khususnya rekomendasi dan pembelajaran, harus dibagi dalam bentuk yang dimengerti oleh semua orang, termasuk anggota masyarakat. Mereka harus menginformasikan pekerjaan di masa depan. Data sensitif harus ditangani dengan hati-hati untuk menghindari kontribusi terhadap situasi darurat atau konflik dan atau untuk menghindari risiko atas informan yang berkontribusi atau informasi sensitif (lihat juga Koordinasi standar 1, catatan panduan 3 dan 5 pada halaman 42-43 dan Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan panduan 4 pada halaman 139-140).

**T**

**Untuk Alat-alat yang dapat membantu Anda dalam penerapan standar tersebut, kunjungi Toolkit INEE: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit)**

*Toolkit INEE*

- ↳ Standar Minimum INEE
  - ↳ Alat-alat Penerapan
    - ↳ Standar-standar dasar

# 2

**DOMAIN DUA:**

**AKSES DAN LINGKUNGAN  
BELAJAR**

**Standar-standar Dasar:  
Partisipasi, Koordinasi, Analisis Masyarakat**

**Akses dan Lingkungan  
Belajar**

**Standard 1  
Kesetaraan Akses**

Semua individu memiliki akses kesempatan pendidikan yang relevan dan berkualitas.

**Standard 2  
Perlindungan dan  
Kesejahteraan**

Lingkungan belajar aman, dan mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan psikososial peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya.

**Standard 3  
Fasilitas dan  
Layanan**

Fasilitas pendidikan mempromosikan keselamatan dan kesejahteraan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya dan terkait dengan, nutrisi, psikososial dan perlindungan pelayanan kesehatan.

**S**elama masa krisis, akses terhadap pendidikan, yang merupakan sumber daya dan hak vital, sering sangat terbatas. Pendidikan memainkan peran penting dalam membantu masyarakat yang terkena dampak dalam mengatasi situasi mereka dan menciptakan normalitas dalam hidup mereka. Hal ini dapat memberikan pengetahuan penyelamatan kehidupan dan keterampilan untuk bertahan hidup, dan mungkin menawarkan kesempatan untuk perubahan yang akan meningkatkan keadilan dan kualitas pendidikan.

Sering cukup rumit untuk mengatur kegiatan pendidikan selama situasi darurat hingga pemulihan. Ada risiko bahwa kelompok-kelompok rentan yang baru tidak akan mendapatkan manfaat dari pendidikan, atau bahwa pola-pola risiko sebelumnya dan pengucilan semakin meningkat dalam tanggap darurat. Otoritas nasional, masyarakat dan organisasi kemanusiaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses informasi yang relevan, pendidikan berkualitas di lingkungan belajar yang aman. Ini mendorong perlindungan fisik dan kesejahteraan psikososial peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Pelajar, guru dan tenaga kependidikan lainnya terlalu sering terkena risiko fisik atau psikososial dalam perjalanan ke dan dari fasilitas pendidikan dan dalam lingkungan belajar. Program pendidikan dalam situasi darurat hingga pemulihan dapat memberikan perlindungan fisik dan psikososial.

Fasilitas pendidikan sementara dan permanen, termasuk sekolah, ruang belajar dan ruang yang ramah anak, harus ditempatkan, dirancang dan dibangun untuk tahan terhadap semua bahaya yang mungkin. Mereka harus dapat diakses oleh semua orang yang akan dilayani. Fasilitas pendidikan yang lebih aman menjamin kelangsungan pendidikan, meminimalkan gangguan belajar-mengajar. Fasilitas ini dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat dan memberikan pelayanan yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, buta aksara dan penyakit. Dimana pendidikan mungkin tidak merata sebelum situasi darurat, membangun kembali pendidikan yang lebih aman dan lebih adil bisa menjadi kontribusi penting dalam membangun perdamaian.

Setiap individu tidak boleh ditolak aksesnya ke pendidikan dan kesempatan belajar karena diskriminasi. Program harus menyediakan pelayanan pendidikan baik formal maupun non-formal untuk memenuhi hak-hak pendidikan dan untuk mengurangi hambatan untuk mengakses pendidikan. Semua penyelenggara pendidikan harus waspada dengan diskriminasi gender dan risiko yang berbeda untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Langkah-langkah perlu diambil untuk menghadapi risiko tersebut. Diskriminasi mungkin disebabkan oleh, misalnya, biaya sekolah, bahasa dan hambatan fisik, yang dapat mengucilkan kelompok tertentu.

## Akses dan Lingkungan Belajar Standar 1: Ketersediaan Akses

Semua individu memiliki akses ke kesempatan pendidikan yang relevan dan berkualitas.

### **Aksi Kunci** (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Tidak ada individu atau kelompok sosial yang ditolak aksesnya ke pendidikan dan kesempatan belajar karena diskriminasi (lihat Catatan Panduan 1).
- Struktur dan tempat belajar dapat diakses oleh semua (lihat Catatan Panduan 1).
- Hambatan untuk pendaftaran, seperti kurangnya dokumen atau persyaratan lainnya, diabaikan (lihat Catatan Panduan 2 dan 4).
- Berbagai peluang yang fleksibel untuk pendidikan formal maupun non-formal diberikan kepada penduduk yang terkena bencana demi memenuhi kebutuhan pendidikan mereka (lihat Catatan Panduan 3-5).
- Melalui sensitisasi dan pelatihan, masyarakat lokal menjadi semakin terlibat dalam menjamin hak-hak semua anak-anak, pemuda dan dewasa terhadap kualitas dan pendidikan yang relevan (lihat Catatan Panduan 6-7).
- Sumber daya cukup tersedia dan menjamin kontinuitas, ekuitas dan kualitas kegiatan pendidikan (lihat Catatan Panduan 8).
- Pelajar memiliki kesempatan untuk memasuki atau kembali masuk ke dalam sistem pendidikan formal sesegera mungkin setelah gangguan yang disebabkan oleh situasi darurat (lihat Catatan Panduan 9).
- Program pendidikan dalam konteks pengungsi diakui oleh otoritas pendidikan setempat yang relevan dan negara asal.
- Layanan Pendidikan untuk kelompok yang terkena bencana tidak berdampak negatif terhadap kelompok tuan rumah.

### **Catatan Panduan**

1. **Diskriminasi** termasuk hambatan yang dikarenakan oleh jenis kelamin, usia, orang berkebutuhan khusus, status HIV, kebangsaan, ras, etnis, suku, klan, kasta, agama, bahasa, budaya, afiliasi politik, orientasi seksual, latar belakang sosial-ekonomi, lokasi geografis atau pendidikan kebutuhan khusus. Diskriminasi mungkin disengaja. Tetapi juga

mungkin ketidaksengajaan yang disebabkan oleh infrastruktur yang tidak bisa diakses para berkebutuhan khusus, atau kebijakan dan praktik yang tidak mendukung partisipasi peserta didik. Contoh diskriminasi termasuk pembatasan dari sekolah terhadap anak perempuan yang hamil atau peserta didik yang terjangkit oleh HIV dan biaya sekolah, seragam, buku dan perlengkapan.

Kelompok-kelompok atau individu tertentu mungkin mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan dalam situasi darurat. Beberapa mungkin menjadi lebih rentan sebagai akibat dari situasi darurat dan pengungsian. Kelompok-kelompok ini dapat mencakup:

- Orang dengan berkebutuhan khusus fisik dan mental;
- Mereka yang mengalami kesehatan mental yang berat dan kesulitan-kesulitan psikososial;
- Gadis;
- Pemuda;
- Anak yang berhubungan dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata;
- Pemuda-kepala rumah tangga;
- Ibu pemuda;
- Orang dari kelompok sosial tertentu atau etnis lainnya.

Otoritas nasional, masyarakat dan organisasi kemanusiaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke kegiatan pendidikan. Ini berarti memahami kebutuhan dan prioritas kelompok tertentu dan orang-orang dengan kebutuhan belajar yang berbeda dalam konteks tertentu, dan menangani mereka. Kebijakan diskriminatif dan praktik yang membatasi akses kesempatan belajar harus diidentifikasi dan diperbaiki. Kurangnya akses pendidikan bagi kelompok etnis, bahasa, geografis atau usia tertentu dapat membuat atau mempertahankan ketegangan yang mungkin akan menyebabkan konflik.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) – *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)* – menjelaskan hak atas pendidikan:

- Pasal 2 mengakui ‘hak atas pendidikan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya’;
- Pasal 13 mengakui hak setiap orang untuk pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan rasa martabat, dan harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, mendorong pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok etnis, agama, ras, dan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian. Pasal 13 juga membuat negara untuk mengakui bahwa, dengan tujuan untuk mencapai realisasi penuh atas hak ini: ‘1) pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia gratis untuk semua orang; 2) pendidikan sekunder dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan menengah kejuruan dan teknis, harus tersedia dan dapat diakses oleh semua dengan segala cara yang tepat, dan secara khusus oleh pengenalan progresif pendidikan gratis; 3) pendidikan fundamental harus didorong atau diintensifkan sejauh mungkin bagi orang-orang yang belum menerima atau menyelesaikan keseluruhan masa pendidikan dasar mereka (lihat juga Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan panduan 1 dan 7 pada halaman 132-133 dan 136-137 dan Kebijakan Pendidikan Standar 2, Catatan panduan 3 pada halaman 139).

2. **Penerimaan, pendaftaran dan retensi:** Persyaratan dokumentasi harus fleksibel. Surat kewarganegaraan, kelahiran atau usia, surat-surat identitas atau laporan sekolah tidak harus diwajibkan untuk masuk karena masyarakat terkena bencana mungkin tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut. Batasan umur tidak boleh ketat, asalkan perlindungan dan norma-norma budaya dihormati. Kesempatan kedua untuk pendaftaran bagi yang putus sekolah harus diberikan. Upaya-upaya khusus diperlukan untuk mengidentifikasi individu-individu yang paling rentan dan bagaimana untuk memasukkan mereka. Jika

muncul masalah keamanan, dokumentasi dan informasi pendaftaran harus dirahasiakan (lihat juga catatan panduan 4 di bawah ini; Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan panduan 1, 2 dan 7 pada halaman 132-137; dan Kebijakan Pendidikan Standar 2, Catatan panduan 1 pada halaman 138).

### 3. **Berbagai kesempatan pendidikan yang berkualitas diperlukan.**

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan semua siswa terpenuhi dan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial dan politik negara. Peluang-peluang ini harus relevan dengan peserta didik dan dengan konteks dan dapat mencakup:

- Pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar, menengah, dan tinggi;
- Kelas membaca dan menghitung;
- Pendidikan keterampilan hidup;
- Program pendidikan pemuda dan orang dewasa, seperti pendidikan teknik dan kejuruan.

Dalam krisis akut, ruang ramah anak atau ruang yang aman seringkali menjadi respon pertama saat pendidikan formal didirikan atau diaktifkan kembali. Ruang ramah anak bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak dan pemuda. Beberapa di antaranya mempersiapkan anak-anak dan pemuda untuk kembali masuk kelas formal, sementara yang lain memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar non-formal. Mereka menyediakan akses untuk belajar, bermain, olahraga, drama, seni, musik, perlindungan dan dukungan psikososial yang terstruktur bagi kelompok usia yang berbeda, mulai dari anak-anak muda sampai pemuda. Ruang yang ramah anak memungkinkan anggota masyarakat dan pemerintah dan pekerja kemanusiaan untuk menilai kebutuhan dan kapasitas untuk pendidikan formal dan non-formal, termasuk bagaimana mengintegrasikan dan mendukung inisiatif lokal.

### 4. **Fleksibilitas:** Kesempatan belajar harus fleksibel dan disesuaikan dengan konteksnya. Adaptasinya mungkin termasuk:

- Perubahan jadwal kelas, jam, giliran dan jadwal tahunan untuk

- memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok peserta didik tertentu;
- Mode penyampaian alternatif, seperti belajar-sendiri, pembelajaran jarak jauh dan dipercepat atau program pembelajaran “mengejar ketinggalan”;
  - Penyediaan jasa perawatan anak untuk orang tua muda;
  - Peniadaan persyaratan dokumentasi, seperti akte kelahiran atau usia (lihat juga Catatan panduan 2 di atas).

Adaptasi harus didiskusikan dengan anggota masyarakat, termasuk pemuda, perempuan dan orang-orang yang mungkin akan terkecualikan. Otoritas pendidikan yang relevan harus dilibatkan untuk memastikan bahwa usulan adaptasi diakui. Jika peserta didik tersebar di area yang luas, sekolah dan lokasi belajar lainnya dapat dipetakan untuk merencanakan biaya akses yang paling efektif ke berbagai kesempatan pendidikan (lihat juga Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan panduan 7 pada halaman 136-137 dan Kebijakan Pendidikan Standar 2, Catatan panduan 1 pada halaman 138).

5. **Prioritas pendidikan** harus didasarkan pada penilaian awal. Penting untuk mempertimbangkan:
- Data terpilah menurut jenis kelamin dan usia;
  - Masalah kerentanan dan perlindungan;
  - Kebutuhan tertentu seperti informasi penyelamatan kehidupan;
  - Hubungan dengan pembentukan kembali sistem pendidikan.

Prioritas juga dapat mempertimbangkan kendala-kendala keuangan, logistik dan keamanan, tanpa harus mengesampingkan kelompok-kelompok rentan (lihat juga Analisis standar 1 pada halaman 45-52, Belajar-mengajar standar 1 pada halaman 97-103, dan Kebijakan Pendidikan Standar 1 - 2 pada halaman 132-140).

6. **Pendidikan yang ber'kualitas' dan 'relevan'**: lihat Daftar singkatan pada halaman 150 untuk definisi istilah-istilah ini.
7. **Keterlibatan masyarakat**: Masyarakat harus secara aktif terlibat dalam proses pendidikan dalam rangka untuk memfasilitasi akses terhadap pendidikan. Keterlibatan komunitas membantu untuk:

- Menangani kesenjangan komunikasi;
- Memobilisasi sumber daya tambahan;
- Menangani masalah keamanan, perlindungan dan psikososial;
- Mengidentifikasi kebutuhan untuk kesempatan belajar alternatif;
- Meningkatkan partisipasi dari semua kelompok yang relevan, khususnya mereka yang rentan.

(Lihat juga Daftar Istilah pada halaman 149 untuk definisi “partisipasi”; Partisipasi Masyarakat Standar 1-2 pada halaman 28-39, dan Belajar-mengajar standar 3, Catatan Panduan 2 pada halaman 109).

8. **Sumber daya:** Otoritas nasional memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa pendidikan tersedia. Ini termasuk koordinasi dan penyediaan keuangan, materi yang memadai dan sumber daya manusia. Jika otoritas nasional tidak dapat memberikan sepenuhnya pendidikan dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan, dukungan tambahan mungkin tersedia dari sumber lain. Contohnya termasuk masyarakat internasional, badan-badan PBB, LSM lokal dan internasional, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi berbasis agama, kelompok masyarakat sipil dan mitra pembangunan lainnya. Para donor harus fleksibel dan harus mendukung berbagai pendekatan terkoordinasi untuk menjamin kelangsungan inisiatif pendidikan dan pembelajaran (lihat juga Partisipasi Masyarakat Standar 2, Catatan panduan 1 pada halaman 36 dan Analisis standar 2, Catatan Panduan 1 dan 5 pada halaman 53-56) .
9. **Meminimalkan penggunaan fasilitas pendidikan sebagai tempat penampungan sementara:** Fasilitas pendidikan seharusnya hanya digunakan sebagai tempat penampungan untuk para penyintas bila tidak ada kemungkinan lain. Lokasi-lokasi alternatif untuk berlindung dalam situasi darurat atau bencana harus diidentifikasi pada saat perencanaan kesiapsiagaan. Ketika fasilitas pendidikan digunakan sebagai tempat penampungan sementara, dampak negatif dan risiko potensial perlindungan harus diminimalkan melalui kolaborasi dengan sektor tempat penampungan dan perlindungan. Pemangku kepentingan harus setuju untuk menentukan batas waktu kapan

fasilitas pendidikan dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya. Ini meminimalkan gangguan belajar dan menghindari penyintas tinggal terlalu lama dalam fasilitas pendidikan setelah situasi darurat terjadi.

Jika fasilitas pendidikan digunakan sebagai tempat penampungan sementara, penting untuk melindungi properti sekolah, seperti buku, perpustakaan, perabot, catatan sekolah dan peralatan rekreasi. Fasilitas pendidikan harus dikembalikan dalam situasi seperti semula. Jika memungkinkan, para pemangku kepentingan harus menggunakan kesempatan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Sebagai contoh, fasilitas sanitasi bisa direnovasi dan struktur bangunan dapat diperkuat (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar Standar 3, Catatan panduan 4-6 pada halaman 89-90 dan Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan panduan 3 pada halaman 135).

## Akses dan Lingkungan Belajar Standar 2: Perlindungan dan Kesejahteraan

Lingkungan belajar aman dan selamat, dan mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan psikososial peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya.

### **Aksi Kunci** (untuk dibaca bersama dengan Catatan panduan)

- Lingkungan belajar bebas dari sumber bahaya bagi para peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya (lihat Catatan panduan 1 dan 3-4).
- Guru dan tenaga kependidikan lainnya memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan mempromosikan psikososial peserta didik (lihat Catatan panduan 2-3 dan 8-9)
- Sekolah, ruang belajar sementara dan ruang ramah anak dekat dengan populasi yang mereka layani (lihat Catatan panduan 5-6).
- Rute akses ke lingkungan belajar aman, selamat dan dapat diakses oleh semua (lihat Catatan panduan 5-7).
- Lingkungan belajar bebas dari serangan dan pendudukan militer (lihat Catatan panduan 1, 3 dan 6-7).
- Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tentang lokasi lingkungan belajar, dan tentang sistem dan kebijakan untuk memastikan bahwa peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya aman dan selamat (lihat Catatan panduan 1 dan 10).
- Lingkungan belajar yang aman diselenggarakan melalui pengurangan risiko bencana dan kegiatan pengelolaan (lihat Catatan panduan 11).

### **Catatan panduan**

1. **Keamanan dan keselamatan:** Sebuah lingkungan belajar yang aman memberikan perlindungan dari ancaman, bahaya cedera atau kerugian. Lingkungan yang aman bebas dari bahaya fisik atau psikososial (lihat juga Daftar Istilah pada halaman 150-152).

Otoritas nasional memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan. Hal ini termasuk penyiapan pihak kepolisian yang cukup dan berkualitas baik serta pengerahan pasukan dimana diperlukan. Jika lokasi belajar

yang biasa tidak aman atau tidak tersedia, lokasi atau cara pembelajaran alternatif yang aman harus disiapkan. Sekolah rumah atau pembelajaran jarak jauh dapat menjadi pilihan. Dalam situasi tidak aman, masyarakat harus memberikan nasihat apakah mereka ingin peserta didik untuk tetap bersekolah. Pasukan keamanan tidak boleh menggunakan sarana pendidikan sebagai tempat penampungan sementara (untuk keamanan, lihat juga Catatan panduan 5-7 di bawah ini; untuk keselamatan, lihat juga Catatan panduan 2-4, 8-9 dan 11 di bawah ini, lihat juga Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan panduan 1 pada halaman 132-133).

2. **Kesejahteraan emosional, fisik dan sosial** tergantung pada:

- Keamanan, keselamatan dan perlindungan;
- Kesehatan;
- Kebahagiaan dan keakraban dalam hubungan antara penyelenggara pendidikan dan peserta didik, dan di antara pelajar.

Sejak usia dini, perkembangan dan pembelajaran anak didukung oleh interaksi mereka dengan orang-orang peduli dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Kegiatan untuk memastikan kesejahteraan pelajar berfokus kepada pengembangan yang sehat, interaksi sosial yang positif dan kesehatan yang baik. Pelajar didorong untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang hasilnya dapat mempengaruhi mereka. Dengan berpartisipasi dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan pengurangan risiko, anak-anak dan pemuda bisa merasa lebih percaya diri dan dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan mereka sendiri.

Jika orangtua tidak dapat memberikan kesejahteraan pada anak-anak mereka di rumah, yang lain harus membantu. Ini mungkin termasuk rujukan ke layanan yang tepat jika tersedia (lihat Akses dan Lingkungan Belajar standar 3, Catatan panduan 8 pada halaman 91).

3. **Perlindungan:** ‘Perlindungan’ berarti kebebasan dari segala bentuk ancaman fisik, emosional dan sosial, eksploitasi, pelecehan dan kekerasan. Pelajar, guru dan tenaga kependidikan lainnya harus

diberitahu tentang bahaya dan dilindungi dari bahaya di dalam dan sekitar lingkungan belajar.

Bahaya meliputi:

- *Bullying*;
- Eksploitasi seksual;
- Bahaya lingkungan dan alam;
- Senjata, amunisi, ranjau darat dan artileri yang tidak meledak;
- Personil bersenjata, lokasi baku tembak dan ancaman militer lainnya, termasuk penculikan dan rekrutmen;
- Ketidakamanan politik.

Pengkajian risiko, termasuk konsultasi dengan anggota masyarakat, pelajar, guru dan tenaga kependidikan lainnya, adalah penting untuk memahami kebutuhan dan prioritas perlindungan. Pengkajian ini harus dilakukan secara berkala dan harus mencakup analisis faktor budaya dan politik yang relevan (lihat juga Analisis standar 1, Catatan panduan 2-3 pada halaman 46-49).

Ketika pelanggaran perlindungan terjadi, maka harus didokumentasikan dan dilaporkan secara hati-hati, sebaiknya dengan bantuan orang yang terlatih dalam pengawasan hak asasi manusia. Informasi kunci tentang insiden itu harus diperhatikan, termasuk jenis kelamin, umur dan apakah orang tersebut ditargetkan berdasarkan karakteristik tertentu. Informasi tersebut penting untuk mengidentifikasi pola dan mungkin diperlukan untuk membuat intervensi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Tanggapan untuk pelanggaran yang dilaporkan juga harus didokumentasikan, termasuk rujukan penyedia layanan kesehatan, perlindungan dan psikososial.

Dalam lingkungan dimana kekerasan dan ancaman lain terhadap keamanan fisik dan psikososial peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya bersifat umum atau dianggap biasa, penting untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mempromosikan keselamatan di rumah dan masyarakat. Kegiatannya meliputi:

- Informasi kampanye untuk orang tua dan para tetua untuk memperkuat metode positif termasuk praktik-praktik disiplin positif;

- Memberikan masukan polisi atau aparat keamanan lainnya untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah perlindungan di masyarakat;
  - Bekerja dengan masyarakat dan pihak berwenang terkait untuk mengatasi masalah perlindungan khusus, seperti mengorganisir pengawalan bagi pelajar pergi ke dan dari kelas. (Lihat juga Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan panduan 1 pada halaman 132-133).
4. **Kekerasan berbasis gender** (untuk definisi, lihat Daftar Istilah pada halaman 145), terutama kekerasan seksual, adalah masalah perlindungan atas ancaman kehidupan yang serius. Hal ini dapat mempengaruhi laki-laki dan anak laki-laki, tetapi yang paling sering menjadi sasaran kekerasan berbasis gender adalah perempuan dan anak perempuan. Program pendidikan harus memantau dan merespon masalah pelecehan dan eksploitasi seksual. Orang tua, pelajar, guru dan tenaga kependidikan lainnya harus sepakat pada cara-cara untuk mengurangi risiko bagi anak-anak dan pemuda dalam perjalanan ke dan dari dan dalam lingkungan belajar. Ini mungkin termasuk:
- Mengembangkan dan menyebarkan aturan yang jelas terhadap pelecehan seksual, eksploitasi, pelecehan dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya;
  - Termasuk aturan dalam kode etik bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, tentang perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima;
  - Meningkatkan jumlah wanita dewasa di lingkungan belajar untuk melindungi dan meyakinkan peserta didik perempuan. Apabila tidak ada keseimbangan antara guru laki-laki dan perempuan, perempuan dari masyarakat dapat menjadi relawan asisten kelas untuk mempromosikan lingkungan perlindungan bagi anak-anak yang lebih baik.

Ketika kekerasan berbasis gender terjadi, pelaporan yang hati-hati dan aman, keluhan dan sistem respon adalah penting. Ini dapat difasilitasi oleh otoritas nasional atau oleh organisasi independen yang mempunyai kompetensi tentang kekerasan berbasis gender. Dukungan

tepat terhadap kesehatan, psikososial, perlindungan dan peradilan harus tersedia bagi korban kekerasan berbasis gender melalui sistem rujukan yang terkoordinasi dengan baik (lihat juga Catatan panduan 9 di bawah ini; Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya standar 2, Catatan panduan 3 pada halaman 124; dan Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan panduan 1 pada halaman 132-133).

5. **Jarak maksimum antara peserta didik dan lokasi pembelajaran** harus ditentukan sesuai dengan standar lokal dan nasional. Penting untuk mempertimbangkan keamanan, keselamatan dan aksesibilitas seperti markas militer, ranjau darat dan semak lebat di sekitarnya. Lokasi pembelajaran dan potensi bahaya perlu dikonsultasikan dengan pelajar, orangtua dan anggota masyarakat lainnya. Jika jarak ke sekolah sangat jauh sehingga mengurangi akses, dapat didorong agar menyiapkan kelas jarak jauh (melalui 'satelit' atau 'feeder') di lokasi dekat dengan tempat tinggal peserta didik (lihat juga Catatan Panduan 3 di atas dan 6-7 di bawah).
6. **Rute akses:** Bahaya-bahaya harus diidentifikasi dan langkah-langkah untuk mengatasinya harus disepakati untuk memastikan rute akses yang aman dan selamat bagi semua pelajar, guru dan tenaga kependidikan, masyarakat, termasuk anak laki-laki dan perempuan dari kelompok usia yang berbeda. Sebagai contoh, di daerah di mana peserta didik harus berjalan kaki ke dan dari fasilitas pendidikan sementara di sepanjang jalan penerangannya buruk, keselamatan dapat ditingkatkan dengan menyiapkan pendamping dewasa atau dengan menggunakan reflektor atau selotip reflektif pada pakaian dan tas (lihat juga Catatan Panduan 3 di atas dan 7 di bawah ini; Partisipasi Masyarakat standar 1, Catatan Panduan 2-5 pada halaman 29-34, dan Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 132-133).
7. **Menjaga pendidikan yang aman dari serangan:** Pada beberapa situasi, dalam perjalanan ke dan dari fasilitas pendidikan, para pelajar, guru dan tenaga kependidikan berhadapan dengan risiko fisik atau psikososial. Tindakan untuk mengurangi risiko ini meliputi:

- Memperkaya kurikulum untuk memasukkan pesan keselamatan, dukungan psikososial dan pendidikan tentang hak asasi manusia, resolusi konflik, pembangunan perdamaian dan hukum kemanusiaan;
- Meningkatkan kesadaran publik tentang arti dan penggunaan Konvensi Jenewa dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, (*the Geneva Conventions and the Rome Statute of the International Criminal Court*) yang melarang serangan terhadap warga sipil (termasuk siswa dan guru) dan bangunan pendidikan di masa perang;
- Peningkatan kapasitas bagi sistem peradilan militer dan pemerintah, angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata di prinsip-prinsip dasar hukum humaniter dan penerapannya terhadap perlindungan pendidikan;
- Memperkuat bangunan atau dinding pembatas dan penggunaan penjaga keamanan (yang dibayar atau relawan masyarakat);
- Perumahan bagi guru di sekolah;
- Relokasi tempat belajar dan siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya yang terancam;
- Penyiapan sekolah berbasis rumah dan sekolah berbasis komunitas.

Tergantung pada konteks dan keamanan, komunitas atau komite pendidikan masyarakat dapat mengambil tanggung jawab untuk perlindungan sekolah. Misalnya, mereka dapat menyediakan pendamping atau mengidentifikasi masyarakat atau pemuka agama yang dapat dipercaya untuk mendukung dan mengajar di sekolah. Dalam konflik sipil, anggota komunitas dapat membantu mempromosikan negosiasi dengan kedua pihak yang terlibat konflik untuk mengembangkan kode etik yang membuat sekolah dan tempat belajar menjadi tempat yang aman atau 'zona perdamaian'.

Serangan terhadap sekolah dan rumah sakit adalah salah satu dari enam pelanggaran berat yang dilarang di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1612 (2005).

Jika serangan terjadi, maka harus dilaporkan melalui mekanisme pemantauan dan pelaporan yang dipimpin PBB (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan panduan 1 pada halaman 132-133 dan Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan Panduan 4 pada halaman 139-140).

8. **Pelatihan dukungan psikososial dan kesejahteraan:** guru dan tenaga kependidikan lainnya harus menerima pelatihan tentang tata cara pemberian dukungan psikososial untuk pelajar melalui:
- Pembelajaran terstruktur;
  - Penggunaan metode yang rama- anak;
  - Bermain dan rekreasi;
  - Mengajar keterampilan hidup;
  - Arahan.

Hal ini akan berdampak kepada kesejahteraan pelajar dan untuk penuntasan program-program pendidikan baik formal maupun non-formal (lihat juga Belajar Mengajar standar 1, Catatan Panduan 6 pada halaman 101-102, Belajar Mengajar standar 2, Catatan Panduan 2 pada halaman 104 -105, dan Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya standar 3 pada halaman 125-127).

9. **Manajemen kelas anti-kekerasan:** Menurut Kerangka Kerja Dakar, pendidikan harus dilakukan dalam cara-cara yang saling mempromosikan perdamaian, pemahaman dan toleransi, dan membantu untuk mencegah kekerasan dan konflik. Untuk memenuhi tujuan ini, guru membutuhkan dukungan positif dalam manajemen kelas. Hal ini berarti memastikan bahwa lingkungan belajar mempromosikan saling pengertian, perdamaian dan toleransi dan memberikan keterampilan untuk mencegah kekerasan dan konflik.

Penguatan yang positif dan sistem yang disiplin merupakan dasar untuk membangun lingkungan seperti itu. Mereka harus mengganti hukuman fisik, penghinaan verbal, pelecehan dan intimidasi. Intimidasi termasuk tekanan mental, kekerasan, pelecehan dan diskriminasi. Hal-hal ini harus dimasukkan dalam kode etik guru dan ditangani secara sistematis dalam pelatihan guru dan kegiatan supervisi (lihat juga Belajar-mengajar standar 2-3 pada halaman 104-110; Guru dan Tenaga

Kependidikan lainnya standar 2, Catatan Panduan 3 pada halaman 124; dan Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya standar 3 pada halaman 125-127).

10. **Partisipasi masyarakat:** Masyarakat harus mengambil peran utama dalam menciptakan, mempertahankan dan melindungi lingkungan belajar. Perwakilan dari semua kelompok rentan harus berpartisipasi dalam desain program. Hal ini akan meningkatkan kepemilikan masyarakat terhadap dukungan untuk pendidikan (lihat juga Partisipasi Masyarakat standar 1 pada halaman 28-35 dan Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan panduan 7 pada halaman 75-76).
11. **Pengurangan risiko bencana dan manajemen:** Peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat dilatih untuk mendukung pencegahan bencana dan kegiatan pengelolaan. Ini mungkin termasuk:
  - Pengembangan dan pemanfaatan rencana kesiapsiagaan situasi darurat;
  - Praktik latihan simulasi bencana;
  - Struktur Sekolah dan langkah-langkah keamanan, seperti rencana evakuasi sekolah di daerah rawan gempa.

Masyarakat atau komite keamanan sekolah mungkin membutuhkan dukungan untuk mengembangkan dan memimpin pelaksanaan pengelolaan bencana atau rencana keselamatan sekolah. Dukungan termasuk membantu menilai dan memprioritaskan risiko, pelaksanaan strategi dan perlindungan lingkungan fisik dan mengembangkan prosedur dan keterampilan untuk kesiapsiagaan respon.

Rencana kesiapsiagaan situasi darurat, termasuk rencana evakuasi sekolah, harus dikembangkan dan dibagi dengan cara yang dapat diakses oleh semua, termasuk orang yang buta huruf dan orang dengan berkebutuhan khusus mental, fisik dan kognitif (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 47-49, Akses dan Lingkungan Belajar standar 3, catatan panduan 1-2 pada halaman 87-88, Belajar Mengajar standar 2, Catatan Panduan 6 pada halaman 107; Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan panduan 2 dan 6 pada halaman 133-136).

## Akses dan Lingkungan Belajar Standar 3: Fasilitas dan Layanan

Fasilitas pendidikan mempromosikan keselamatan dan kesejahteraan pelajar, guru dan tenaga kependidikan lainnya dan terkait dengan layanan perlindungan kesehatan, nutrisi, dan psikososial.

### **Aksi Kunci** (untuk dibaca bersama dengan Catatan panduan)

- Struktur dan tempat belajar aman dan dapat diakses oleh semua pelajar, guru dan tenaga kependidikan lainnya (lihat Catatan Panduan 1-4).
- Lingkungan belajar baik yang permanen maupun sementara diperbaiki, dilengkapi atau diganti sesuai kebutuhan dengan konstruksi dan desain yang tahan bencana (lihat Catatan Panduan 2 dan 4).
- Ruang belajar ditandai oleh tanda-tanda dan batas-batas pelindung yang terlihat jelas.
- Struktur fisik untuk tempat pembelajaran tepat untuk situasi, termasuk ruang yang cukup untuk fasilitas kelas, administrasi, rekreasi, dan sanitasi (lihat Catatan Panduan 2 dan 4).
- Ruang kelas dan pengaturan tempat duduk memenuhi kesepakatan rasio antara luas ruang dengan jumlah pelajar dan guru dalam rangka untuk mempromosikan metodologi partisipatif dan pendekatan yang berpusat pada pelajar (lihat Catatan Panduan 4).
- Anggota masyarakat, termasuk pemuda, berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan belajar (lihat Catatan Panduan 1-3).
- Pasokan air bersih yang cukup dan fasilitas sanitasi yang layak tersedia untuk kebersihan pribadi dan perlindungan, dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, dan orang berkebutuhan khusus (lihat Catatan Panduan 3 dan 5-6).
- Pendidikan kesehatan dan kebersihan berbasis keterampilan terpromosikan dalam lingkungan belajar (lihat Catatan Panduan 6).
- Kesehatan berbasis sekolah dan pelayanan gizi tersedia untuk mengatasi kelaparan dan hambatan pengembangan dan pembelajaran yang efektif lainnya (lihat Catatan Panduan 7).
- Sekolah dan ruang belajar terkait dengan perlindungan anak, kesehatan, gizi, sosial dan psikososial (lihat Catatan Panduan 8).

## Catatan Panduan

1. **Lokasi:** Fasilitas pendidikan harus dibangun, direkonstruksi atau dipindahkan ke tempat yang mempromosikan keadilan dan keselamatan fisik peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya. Penting untuk dipertimbangkan jika lokasi fasilitas pendidikan sebelum darurat harus digunakan kembali. Membangun kembali struktur fisik di lokasi yang sama dapat menyebabkan keberlanjutan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat atau mungkin menempatkan peserta didik pada risiko bencana alam. Penting untuk melakukan kajian risiko bencana dan konflik. Kajian ini harus melibatkan konsultasi dengan perwakilan dari pemerintah nasional dan berbagai anggota masyarakat, khususnya kelompok rentan. Mereka dapat memberikan informasi yang berharga dimana fasilitas pendidikan dapat dibangun. Kolaborasi dengan sektor lain (seperti koordinasi manajemen lokasi, tempat tinggal dan kesehatan) sangat penting untuk memastikan bahwa sekolah dan fasilitas pendidikan dekat dengan rumah peserta didik dan layanan lainnya (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 1-6 pada halaman 45 -51; Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 11 pada halaman 85; Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 135, dan Koordinasi standar 1 pada halaman 40-44).
2. **Struktur, disain, dan konstruksi:** Penting untuk mempertimbangkan unsur-unsur berikut dalam desain dan konstruksi fasilitas pendidikan permanen dan sementara.
  - Pemilihan tempat aman: keamanan struktur bangunan sekolah yang rusak perlu dikaji oleh para profesional yang berkualitas, dan bangunan diprioritaskan untuk dapat dipergunakan lagi, perbaikan, penguatan atau penggantian, didasarkan pada kebutuhan dan biaya.
  - Desain dan konstruksi tahan bencana dan inklusi: Perencanaan dan kode standar bangunan internasional untuk sekolah (atau kode lokal jika standarnya lebih tinggi) harus diterapkan baik untuk konstruksi sementara maupun permanen. Fasilitas sekolah harus dirancang, dibangun dan dipelihara agar tahan dalam

menghadapi bahaya dan ancaman setempat seperti kebakaran, badai, gempa bumi dan tanah longsor. Upaya-upaya rekonstruksi harus memastikan bahwa pergi ke sekolah tidak akan mengekspos pelajar, guru atau tenaga kependidikan lainnya terhadap risiko-risiko, desain dan konstruksi harus memastikan pencahayaan yang cukup, ventilasi dan pemanasan (yang sesuai) silang untuk mempromosikan lingkungan belajar-mengajar berkualitas.

- Apakah struktur dapat dipertahankan oleh otoritas lokal dan masyarakat setempat dengan harga terjangkau: jika memungkinkan, bahan lokal dan tenaga kerja lokal harus digunakan untuk membangun struktur. Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan struktur yang hemat biaya dan bagian fisik (seperti atap, lantai) yang tahan lama.
  - Ketersediaan anggaran, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan keterlibatan masyarakat, perencana dan manajer pendidikan.
  - Struktur mungkin bersifat sementara, semi permanen, permanen, perluasan atau bergerak. Keterlibatan anggota kelompok yang berbeda dalam kegiatan bersama, seperti konstruksi dan pemeliharaan sekolah, dapat mendukung mitigasi konflik (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan panduan 11 pada halaman 85; Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan panduan 3 pada halaman 135; *Catatan Panduan tentang Konstruksi Sekolah yang Aman INEE*, tersedia dalam *Toolkit INEE: [www.ineesite.org/](http://www.ineesite.org/)*, dan standar-standar Sphere untuk Shelter, Pemukiman dan Produk Bukan-Makanan).
3. **Orang berkebutuhan khusus:** kebutuhan orang-orang dengan kebutuhan khusus fisik dan visual harus dipertimbangkan dengan cermat dalam desain fasilitas pendidikan. Pintu masuk dan keluar harus mengakomodasi orang-orang yang menggunakan kursi roda atau menggunakan perangkat bantuan mobilitas lain. Ruang kelas dan perabotnya, dan fasilitas air dan sanitasi, harus memenuhi kebutuhan para orang berkebutuhan khusus. Ketika mengidentifikasi dan merekonstruksi fasilitas pendidikan, dianjurkan agar bekerjasama

dengan organisasi yang mewakili orang-orang dengan berbagai jenis kebutuhan khusus, orangtua dari anak-anak kebutuhan khusus dan pemuda kebutuhan khusus baik di tingkat lokal maupun nasional.

4. **Desain dan pemeliharaan ruang belajar:** fasilitas pendidikan harus dirancang secara cermat, bagaimana dan siapa yang akan menggunakan ruang belajar tersebut. Ruang harus sesuai dengan umur, jenis kelamin, kemampuan fisik dan pertimbangan budaya dari semua pengguna.

Sebuah standar lokal yang realistis harus ditetapkan untuk ukuran kelas maksimum. Kecukupan ruang harus diperhitungkan, jika mungkin, untuk kelas tambahan jika pendaftaran meningkat, memungkinkan pengurangan progresif dalam penggunaan beberapa giliran. Pintu masuk dan keluar harus memungkinkan siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk melewatinya dengan aman dalam situasi darurat.

Struktur bangunan, termasuk fasilitas sanitasi, dan perabotan, termasuk meja, kursi, papan tulis, harus dipelihara secara teratur. Anggota masyarakat dan komite pendidikan masyarakat dapat memberikan kontribusi pada pemeliharaan ruang belajar dengan tenaga, waktu atau bahan (lihat juga Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya standar 3, Catatan Panduan 1 pada halaman 125).

5. **Fasilitas sanitasi** harus tersedia dalam atau dekat dengan lingkungan belajar. Kolaborasi dengan sektor air dan sanitasi sangat penting untuk mencapai hal ini. Sanitasi meliputi:
  - Fasilitas pembuangan limbah padat, seperti kontainer dan sumur limbah;
  - Fasilitas drainase, seperti sumur rendam dan saluran drainase;
  - Air yang cukup untuk kebersihan pribadi dan untuk membersihkan toilet.

Fasilitas sanitasi harus dapat diakses bagi para orang kebutuhan khusus dan harus menjaga privasi, martabat dan keselamatan mereka.

Pintu toilet harus dapat dikunci dari dalam. Untuk mencegah pelecehan seksual, toilet untuk anak laki-laki /laki-laki dan anak perempuan / wanita harus dipisahkan, ditempat yang aman dan nyaman serta mudah diakses. Panduan Sphere untuk toilet sekolah menyatakan bahwa untuk satu toilet untuk setiap 30 anak perempuan dan satu toilet untuk setiap 60 anak laki-laki. Jika penyediaan toilet terpisah tidak memungkinkan, pengaturan dapat dibuat sedemikian rupa demi menghindari anak perempuan dan anak laki-laki menggunakan toilet pada saat yang sama. Jika toilet tidak berada dalam lokasi belajar, fasilitas di dekatnya dapat diidentifikasi dan penggunaan oleh anak-anak dapat dimonitor (lihat juga standar Sphere pembuangan kotoran dalam bab tentang Air Minum, Sanitasi dan Promosi Kebersihan).

Bahan sanitari yang sesuai dengan budaya, jika perlu, harus disediakan untuk pelajar perempuan sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam belajar.

6. **Air layak pakai dan promosi kebersihan:** lingkungan belajar harus memiliki sumber air yang aman dan harus menyediakan sabun. Praktik kebersihan, seperti mencuci tangan dan wajah, harus dimasukkan sebagai aktivitas sehari-hari. Panduan Sphere untuk kuantitas air minimum di sekolah menyatakan bahwa dibutuhkan tiga liter air per siswa per hari untuk minum dan mencuci tangan (lihat juga standar Sphere pada pasokan air dalam bab tentang Air Minum, Sanitasi dan Promosi Kebersihan).
7. **Layanan kesehatan dan gizi berbasis-sekolah:** program layanan kesehatan dan gizi berbasis-sekolah menghubungkan pendidikan dengan sumber daya dalam gizi, kesehatan dan sektor sanitasi. Layanan ini membahas hambatan belajar dan mempromosikan pembangunan yang sehat. Program mungkin termasuk:
  - Program pemberian makanan di sekolah untuk menangani kelaparan;
  - Pengobatan terhadap infeksi parasit atau cacingan;
  - Program pencegahan penyakit menular (seperti untuk campak, diare, HIV dan AIDS);

- Penyediaan suplemen mikronutrien (seperti zat besi, vitamin A, dan yodium).

Program harus mengikuti panduan yang dikenal seperti panduan *World Food Programme* (WFP) untuk pemberian makanan di sekolah. Koordinasi dengan sektor kesehatan dan gizi adalah penting (lihat juga standar Sphere untuk Ketahanan Pangan dan Gizi).

8. **Akses ke layanan lokal dan rujukan:** guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat menggunakan rujukan ke layanan setempat untuk mendukung dan mempromosikan kesejahteraan fisik, psikososial dan emosional peserta didik. Mereka harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda atau marabahaya fisik, psikososial dan masalah perlindungan lain, seperti anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka. Mereka harus berbagi informasi tentang ancaman terhadap kesejahteraan peserta didik dengan mitra yang relevan dari sektor jasa lainnya.

Untuk memastikan bahwa sistem rujukan beroperasi secara efektif, hubungan formal dengan pelayanan di luar harus dibentuk. Layanan dapat termasuk konseling, psikososial dan layanan hukum bagi mereka yang selamat dari kekerasan seksual dan berbasis gender, dan pelayanan sosial untuk kasus dugaan penyalahgunaan atau kelalaian. Anak-anak yang sebelumnya tergabung dalam angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata mungkin memerlukan bantuan dengan pelacakan keluarga dan reunifikasi (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 2 pada halaman 79; Belajar-mengajar standar 1, Catatan Panduan 6 pada halaman 101-102; Belajar-mengajar standar 2, Catatan panduan 2 pada halaman 104-105).

# T

**Untuk Alat-alat yang dapat membantu Anda dalam penerapan standar tersebut, kunjungi Toolkit INEE: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit)**

## *Toolkit INEE*

- ↳ Standar Minimum INEE
  - ↳ Alat-alat Penerapan
    - ↳ Akses dan Lingkungan Belajar

# 3

**DOMAIN TIGA:**

**BELAJAR-MENGAJAR**

**Standar-standar Dasar:  
Partisipasi Masyarakat, Koordinasi, Analisis**

**Belajar Mengajar**

**Standar 1  
Kurikulum**

Kurikulum yang relevan secara budaya, sosial dan bahasa digunakan untuk menyediakan pendidikan formal dan non-formal, sesuai dengan konteks tertentu dan kebutuhan peserta didik.

**Standar 2  
Pelatihan, Dukungan dan  
Pembangunan Profesi**

Guru dan tenaga kependidikan lainnya menerima pelatihan yang relevan, terstruktur dan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

**Standar 3  
Instruksi dan Proses  
Belajar**

Instruksi dan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, partisipatif dan inklusif.

**Standar 4  
Penilaian Hasil  
Pembelajaran**

Metode yang tepat digunakan untuk mengevaluasi dan memvalidasi hasil belajar.

**A**kses ke pendidikan hanya berarti jika program-program pendidikan menawarkan belajar-mengajar yang berkualitas. Situasi darurat mungkin menawarkan kesempatan untuk memperbaiki kurikulum, pelatihan guru, dukungan dan pengembangan profesional, instruksi dan proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar sehingga pendidikan relevan, mendukung dan melindungi pelajar. Keputusan penting mungkin perlu dibuat mengenai jenis kurikulum yang ditawarkan dan fokus prioritas belajar. Membangun pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah atau meminimalkan risiko, ancaman dan bahaya yang sekarang maupun masa depan, merupakan prioritas. Pendidikan tentang hak asasi manusia dan pendidikan untuk perdamaian dan kewarganegaraan demokratis harus ditekankan.

Pendidikan yang berkaitan dengan mata pencaharian dan pekerjaan, seperti pengembangan usaha kecil, melek finansial, dan pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis, harus disediakan untuk laki-laki muda dan perempuan, khususnya mereka yang berasal dari kelompok rentan yang tidak menyelesaikan sekolah formal.

Analisis pasar kerja dan kolaborasi dengan sektor ekonomi dan pemulihan awal akan memastikan dengan lebih baik bahwa program-program tetap relevan dan bahwa keahlian ekonomi yang dipelajari akan berguna.

Dalam situasi darurat, guru dan tenaga kependidikan yang kurang atau tidak terlatih sering mengisi kesenjangan sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari sebuah bencana atau krisis, perlu dilatih keterampilan untuk menyampaikan konten pembelajaran efektif bagi siswa. Guru dan tenaga kependidikan lainnya harus berpartisipasi dalam pelatihan khusus tentang cara mendukung anak-anak yang mengalami kesusahan.

Dalam konteks situasi darurat sampai pemulihan, adalah penting bahwa otoritas nasional, lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan mengenali kurikulum dan sertifikat diberikan. Masyarakat ingin tahu bahwa pendidikan anak-anak mereka memiliki nilai dan otoritas nasional mengakui nilai tersebut. Pengkajian dan evaluasi proses belajar mengajar yang sesuai dan tepat-waktu:

- memberikan kredibilitas;
- menginformasikan praktik pengajaran;
- mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum dan peserta didik;
- menginformasikan tenaga kependidikan, anggota masyarakat dan peserta didik dari kemajuan yang telah dicapai dan kebutuhan lanjutan.

## Belajar Mengajar Standar 1: Kurikulum

Kurikulum yang relevan dengan budaya, sosial dan bahasa digunakan untuk menyediakan pendidikan formal dan non-formal, sesuai dengan konteks tertentu dan kebutuhan peserta didik.

### Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan panduan)

- Otoritas pendidikan memimpin peninjauan, pengembangan atau adaptasi dari kurikulum formal, melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan (lihat Catatan Panduan 1-3).
- Kurikulum, buku pelajaran dan bahan pembantu sesuai dengan usia, tingkat perkembangan, bahasa, budaya, kapasitas dan kebutuhan peserta didik (lihat Catatan Panduan 1-4).
- Kurikulum formal dan ujian yang digunakan dalam pendidikan pengungsi dan penyintas diakui oleh pemerintah asal dan tuan rumah (lihat Catatan panduan 3).
- Kurikulum formal dan non-formal memberikan informasi tentang pengurangan risiko bencana, pendidikan lingkungan dan pencegahan konflik (lihat Catatan Panduan 3-4).
- Kurikulum, buku pelajaran dan bahan bacaan tambahan mengandung kompetensi inti dari pendidikan dasar termasuk melek huruf, berhitung, belajar awal, keterampilan hidup, kesehatan dan kebersihan (lihat Catatan Panduan 4-5).
- Kurikulum mencatatkan masalah kesejahteraan dan perlindungan kebutuhan psikososial peserta didik (lihat Catatan panduan 6).
- Isi pelajaran, bahan dan instruksi disampaikan dalam bahasa dari peserta didik (lihat Catatan panduan 7).
- Kurikulum, buku pelajaran dan bacaan tambahan sensitif gender, mengenali keragaman, mencegah diskriminasi dan mempromosikan rasa hormat terhadap semua pelajar (lihat Catatan Panduan 8).
- Bahan belajar-mengajar diambil dari daerah setempat dan cukup serta disediakan secara tepat waktu (lihat Catatan panduan 9).

### Catatan Panduan

1. **Kurikulum** adalah rencana aksi untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, berlaku untuk program

pendidikan formal dan non-formal dan harus relevan dan beradaptasi ke semua peserta didik. Termasuk di dalamnya tujuan belajar, konten pembelajaran, penilaian, metode pengajaran dan bahan-bahan:

- ‘Tujuan pembelajaran’ untuk mengidentifikasi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang akan dikembangkan melalui kegiatan pendidikan untuk mempromosikan pengembangan kognitif, sosial, emosional dan fisik peserta didik;
- ‘Isi pembelajaran’ mengacu pada bidang-bidang seperti membaca, berhitung dan keterampilan hidup;
- ‘Penilaian’ mengacu pada pengukuran apa yang telah dipelajari dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk konten pembelajaran yang dicakup;
- ‘Metode pengajaran’ mengacu pada pendekatan yang dipilih untuk, dan digunakan dalam, penyajian konten pembelajaran untuk mendorong serapan pengetahuan dan keterampilan semua pembelajar;
- ‘Bahan ajar’ mengacu pada buku-buku, peta dan bagan, bahan-bahan ajar tambahan, panduan guru, peralatan, mainan dan bahan belajar-mengajar lainnya.

## 2. Kurikulum yang sesuai dengan konteks, usia dan tingkat

**perkembangan:** Kurikulum harus sesuai dengan usia dan cocok dengan tingkat perkembangan peserta didik, termasuk perkembangan sensorik, mental, psikososial, fisik, dan perkembangan kognitif mereka. Umur dan tingkat perkembangan dapat sangat bervariasi dalam program pendidikan formal dan non-formal dalam konteks situasi darurat sampai pemulihan. Ini membutuhkan adaptasi kurikulum dan metode. Guru harus diberikan dukungan untuk menyesuaikan ajaran mereka dengan kebutuhan dan tingkat peserta didik dengan siapa mereka bekerja (lihat juga Belajar-Mengajar standar 2 pada halaman 104-107).

## 3. Tinjauan dan pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang panjang dan kompleks, dan harus dilakukan oleh otoritas pendidikan yang tepat dan dapat diterima. Jika program pendidikan formal sedang didirikan kembali selama atau setelah situasi darurat, kurikulum sekolah dasar dan menengah nasional harus digunakan. Dalam situasi dimana

kurikulum tidak tersedia, kurikulum perlu dikembangkan atau disesuaikan dengan cepat. Dalam kasus pengungsi, kurikulum dapat mengacu pada kurikulum dari negara tuan rumah atau negara asal. Dalam kasus lain, kurikulum dapat diadaptasi dari situasi darurat yang mirip.

Dalam situasi pengungsian, kurikulum idealnya harus dapat diterima baik di negara asal maupun negara tuan rumah, untuk memfasilitasi repatriasi secara sukarela. Ini membutuhkan koordinasi antaragensi dan substansial regional, dengan mempertimbangkan, misalnya, kompetensi bahasa dan pengakuan ijazah. Perspektif negara tuan rumah dan pengungsi dan hukum internasional harus menginformasikan keputusan ini (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 7 pada halaman 136-137).

Dalam situasi darurat sampai pemulihan, kurikulum program pendidikan formal dan non-formal harus diperkaya dengan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk konteks darurat (lihat Catatan Panduan 5 di bawah).

Kurikulum khusus mungkin diperlukan bagi kelompok tertentu, seperti:

- pekerja anak dan pemuda;
- mereka yang sebelumnya tergabung dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata;
- pelajar dengan usia lebih tua dari tingkat kelas mereka atau kembali dari waktu yang lama keluar dari sekolah;
- peserta didik dewasa.

Perkembangan dan evaluasi kurikulum dan buku teks dan pengkajian secara periodik terhadap program pendidikan harus dipimpin oleh otoritas pendidikan yang relevan. Pelajar, guru dan persatuan guru, dan masyarakat yang terkena harus secara aktif terlibat. Panelis pengkaji buku pelajaran, termasuk perwakilan dari berbagai kelompok rentan dan etnis lainnya, dapat membantu untuk menghindari bias dan untuk membangun perdamaian di antara komunitas yang berbeda. Mereka harus berhati-hati agar tidak memunculkan ketegangan dalam proses menghapus pesan-pesan yang dapat memecah-belah dari buku teks.

4. **Kompetensi dasar** harus diidentifikasi sebelum penyusunan atau adaptasi isi materi pembelajaran dan pelatihan guru. 'Kompetensi Dasar' pendidikan dasar:

- Melek baca dan berhitung;
- Pengetahuan esensial, keterampilan hidup, sikap dan praktik yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan untuk berpartisipasi aktif dan bermakna sebagai anggota komunitas mereka.

Kompetensi dasar harus diperkuat melalui aplikasi praktis. Landasan yang kuat dikembangkan dalam anak usia dini untuk membentuk penyerapan dan penguasaan kompetensi dasar.

5. **Isi pembelajaran keterampilan hidup dan konsep-konsep penting** harus sesuai dengan usia, gaya belajar yang berbeda, pengalaman dan lingkungan peserta didik. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik kearah hidup yang independen dan produktif. Isi dan konsep harus spesifik dalam konteks dan mungkin mencakup:

- Promosi kesehatan dan kebersihan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi dan HIV dan AIDS;
- Perlindungan anak dan dukungan psikososial;
- Pendidikan hak asasi manusia, pendidikan kewarganegaraan, perdamaian dan hukum kemanusiaan;
- Pengurangan risiko bencana dan keterampilan hidup, termasuk pendidikan tentang ranjau darat dan artileri yang tidak meledak;
- Budaya, rekreasi, olah raga dan seni, termasuk musik, tari, drama dan seni visual;
- Pelatihan keterampilan mata pencaharian dan kejuruan dan pelatihan keterampilan teknis;
- Pengetahuan lingkungan dan adat lokal;
- Keterampilan perlindungan yang berkaitan dengan risiko spesifik dan ancaman yang dihadapi oleh anak perempuan dan anak laki-laki.

Isi bahan belajar meletakkan dasar untuk mata pencaharian peserta didik. Isi dari program pelatihan kejuruan harus mengacu pada

kesempatan kerja yang ada dan harus mencakup praktik kerja seperti magang (lihat juga Standar-standar *Jaringan Minimum untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, Standar-standar penciptaan lapangan kerja dan standar-standar Pengembangan Usaha).

Resolusi konflik dan isi bahan pendidikan perdamaian serta metodologinya dapat meningkatkan pemahaman antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang terkena dampak konflik; dengan memberikan keterampilan komunikasi untuk memfasilitasi rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian. Penanganan yang hati-hati diperlukan dalam pelaksanaan inisiatif pendidikan perdamaian untuk memastikan bahwa masyarakat siap mengatasi isu-isu tertentu (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 132-133).

- 6. Kebutuhan psikososial, hak dan perkembangan** peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya harus ditangani pada semua tahap situasi darurat sampai tahap pemulihan. Personil pendidikan perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda stress peserta didik. Mereka harus dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan tersebut, termasuk menggunakan mekanisme rujukan untuk memberikan dukungan tambahan. Harus ada pedoman yang jelas bagi guru, pendidikan dukungan staf dan anggota masyarakat pada penyediaan dukungan psikososial bagi anak-anak, di dalam maupun di luar kelas. Peserta didik yang mengalami tekanan perlu pengajaran terstruktur, menggunakan metode disiplin yang positif dan masa belajar yang lebih pendek untuk membangun konsentrasi. Semua peserta didik dapat dilibatkan dalam kegiatan rekreasi dan pembelajaran kooperatif. Metode dan isi pengajaran yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan diri pelajar dan harapan untuk masa depan mereka (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 8-9 pada halaman 84, Akses dan Lingkungan Belajar standar 3, Catatan Panduan 8 pada halaman 91; dan Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 132-133).

Guru dan tenaga kependidikan lainnya, sering direkrut dari penduduk yang terkena bencana, mereka dapat menghadapi kesulitan yang

sama dengan yang dialami oleh pelajar. Hal ini harus ditangani melalui pelatihan, pemantauan dan dukungan. Guru tidak bisa diharapkan untuk mengambil tanggung jawab yang bisa merugikan kesejahteraan psikososial mereka sendiri maupun peserta didik (lihat juga Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya standar 3, Catatan Panduan 6 pada halaman 127 dan standar Sphere untuk kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial dalam bab tentang Layanan Kesehatan).

7. **Bahasa** instruksi dapat menjadi isu perpecahan di negara-negara dengan multibahasa dan masyarakat yang majemuk. Untuk meminimalkan marginalisasi, keputusan tentang bahasa instruksi harus dilakukan atas dasar konsensus, melibatkan masyarakat, otoritas pendidikan dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Guru harus bisa mengajar dalam bahasa yang dipahami oleh peserta didik dan untuk berkomunikasi dengan orang tua dan masyarakat luas. Pelajar tunarungu dan tunawicara harus diajarkan dengan menggunakan metode dan bahasa yang paling tepat untuk memastikan inklusi penuh. Tambahan kelas dan kegiatan, khususnya pada pendidikan anak usia dini, harus tersedia dalam bahasa dari peserta didik.

Dalam situasi pengungsian, negara-negara tuan rumah mungkin menganjurkan sekolah pengungsi untuk memenuhi standar mereka, termasuk penggunaan bahasa dan kurikulum mereka. Penting untuk mengetahui hak-hak peserta didik pengungsi. Perlu dipertimbangkan juga kesempatan untuk meraih masa depan mereka dan apa yang dibutuhkan mereka agar dapat melanjutkan pendidikan mereka di masyarakat tuan rumah setelah situasi darurat. Dalam situasi pengungsian diperpanjang, kesempatan harus disediakan bagi peserta didik untuk mempelajari bahasa masyarakat atau negara tuan rumah. Hal ini memungkinkan mereka untuk berfungsi dalam komunitas dan untuk terus mengakses pendidikan dan kesempatan (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 7 pada halaman 136-137).

8. **Keanekaragaman** harus dipertimbangkan dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pada semua tahap situasi darurat

hingga tahap pemulihan. Ini berarti termasuk pelajar, guru dan tenaga kependidikan lainnya dari berbagai latar belakang dan kelompok rentan dan dalam rangka promosi toleransi dan respek. Aspek-aspek keanekaragaman mungkin termasuk:

- gender;
- orang berkebutuhan khusus fisik dan mental;
- kemampuan belajar;
- peserta didik dari berbagai kelompok ekonomi;
- kelas yang berisi anak-anak dari berbagai usia;
- budaya dan kebangsaan;
- etnis dan agama.

Kurikulum, materi pembelajaran dan metode pengajaran harus menghilangkan bias dan memperkuat keadilan. Program tidak hanya berbicara tentang toleransi saja, tetapi mulai ke arah perubahan sikap dan perilaku. Ini akan membuat pengenalan yang lebih baik dan menghormati hak orang lain. Pendidikan hak asasi manusia harus didukung melalui pendidikan formal maupun non-formal untuk mempromosikan keragaman dalam cara-cara yang sesuai dan sensitif dengan usia dan budaya. Konten bisa dikaitkan dengan hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan dan dengan keterampilan hidup. Guru mungkin membutuhkan dukungan untuk memodifikasi bahan-bahan dan metode pengajaran yang ada jika buku teks dan bahan lainnya perlu revisi (lihat juga Belajar-mengajar standar 2, Catatan Panduan 2 pada halaman 104-105 dan Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 7 pada halaman 136-137) .

9. **Materi belajar yang tersedia secara lokal** untuk pelajar harus dinilai pada awal situasi darurat. Untuk pengungsi atau penyintas, ini termasuk bahan dari negara atau daerah asal. Jika diperlukan, bahan harus diadaptasi atau dikembangkan dan tersedia dalam jumlah cukup untuk semua. Ini termasuk bentuk yang dapat diakses untuk pelajar berkebutuhan khusus. Otoritas pendidikan yang relevan harus didukung untuk memantau penyimpanan, distribusi dan penggunaan bahan-bahan (lihat juga Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya standar 3, Catatan Panduan 1 pada halaman 125).

## Belajar Mengajar Standar 2: Pelatihan, Dukungan dan Pengembangan Profesional

Guru dan tenaga kependidikan lainnya menerima Pelatihan, Dukungan dan Pengembangan Profesi yang relevan dan terstruktur secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

### Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan panduan)

- Peluang pelatihan tersedia untuk guru dan tenaga kependidikan lainnya, laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan kebutuhan (lihat Catatan Panduan 1-2).
- Pelatihan sesuai dengan konteks dan mencerminkan tujuan pembelajaran dan konten (lihat Catatan Panduan 1-2).
- Pelatihan diakui dan disetujui oleh otoritas pendidikan yang relevan (lihat Catatan Panduan 3-4).
- Pelatih yang berkualitas dapat melakukan kursus pelatihan untuk melengkapi pelatihan *in-service*, dukungan, bimbingan, pemantauan dan supervisi kelas (lihat Catatan Panduan 3-4).
- Melalui pelatihan dan dukungan yang terus-menerus, guru dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam lingkungan belajar, menggunakan metode pengajaran partisipatif dan menggunakan alat bantu pengajaran (lihat Catatan Panduan 3-6).
- Pelatihan meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk kurikulum formal dan non-formal, termasuk kesadaran bahaya, pengurangan risiko bencana dan pencegahan konflik (lihat Catatan Panduan 6).

### Catatan Panduan

1. '**Guru**' mengacu pada instruktur, fasilitator atau animator dalam program pendidikan formal dan non-formal. Guru mungkin memiliki pengalaman dan mendapat pelatihan yang berbeda. Mereka mungkin adalah pelajar yang lebih senior atau anggota masyarakat (lihat juga Guru dan Tenaga Kependidikan standar 1-3 pada halaman 119-127).
2. **Pengembangan kurikulum pelatihan formal dan isinya** merupakan tanggung jawab otoritas pendidikan. Kurikulum dan isi harus mencerminkan kebutuhan dan hak-hak peserta didik dan kebutuhan

khusus tenaga kependidikan dalam konteks batasan anggaran dan waktu. Materi pelatihan mungkin termasuk:

- Pengetahuan dasar subyek, seperti membaca, berhitung dan keterampilan hidup sesuai dengan konteks, termasuk pendidikan kesehatan;
- Pedagogi dan metodologi pengajaran, termasuk disiplin positif dan manajemen kelas, pendekatan partisipatif dan pendidikan inklusi;
- Kode etik bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, termasuk mekanisme rujukan dan pelaporan untuk kecaman dari kekerasan berbasis gender terhadap peserta didik;
- Prinsip-prinsip pencegahan konflik dan pengurangan risiko bencana;
- Pengembangan dan dukungan psikososial, termasuk kebutuhan untuk peserta didik dan guru dan ketersediaan layanan lokal serta sistem rujukan;
- Prinsip dan perspektif hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan, untuk memahami makna dan maksud dan hubungan langsung serta tidak langsung dengan kebutuhan peserta didik dan tanggung jawab peserta didik, guru, masyarakat dan otoritas pendidikan;
- Konten lainnya yang sesuai dengan konteks.

Inisiatif pelatihan harus memasukkan cara bagaimana menangani isu-isu keragaman dan diskriminasi. Misalnya, strategi mengajar yang sensitif-gender dapat mendorong para guru dari kedua jenis kelamin untuk memahami dan berkomitmen untuk kesetaraan gender di dalam kelas. Pelatihan tenaga kependidikan perempuan dan anggota masyarakat perempuan dapat memperkuat perubahan positif di kelas dan masyarakat luas (lihat juga Belajar-Mengajar standar 1 pada halaman 97-103, dan Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 2-3 dan 8 pada halaman 79-81 dan 84; Akses dan Lingkungan Belajar standar 3, Catatan Panduan 8 pada halaman 91, dan Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya standar 3 pada halaman 125-127).

3. **Dukungan pelatihan dan koordinasi:** Bila memungkinkan, otoritas pendidikan harus memimpin dalam desain dan implementasi kegiatan pelatihan guru, formal dan non-formal. Ketika otoritas pendidikan tidak mampu untuk memimpin proses ini, komite koordinasi antar-lembaga dapat memberikan bimbingan dan koordinasi. Rencana Pelatihan harus menyertakan pelatihan dalam masa pengabdian dan, jika perlu, revitalisasi lembaga pelatihan guru dan fasilitas pendidikan universitas.

Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam membangun kembali sektor pendidikan berkelanjutan (lihat juga Koordinasi standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 40-41 dan guru dan tenaga kependidikan lainnya standar 3, Catatan Panduan 3-4 pada halaman 126).

Otoritas pendidikan nasional dan pemangku kepentingan terkait lainnya harus memulai sebuah dialog tentang kurikulum untuk pelatihan guru dalam masa pengabdian dan mekanisme pengakuannya pada awal dari tanggap darurat. Jika memungkinkan, pelatihan dalam masa pengabdian harus dirancang untuk memenuhi persyaratan nasional atas status guru yang berkualifikasi. Unsur-unsur tambahan yang relevan dengan situasi darurat, seperti kebutuhan atas pertemuan psikososial, harus juga dimasukkan. Jika sistem sekolah untuk pengungsi terpisah dari sistem pendidikan setempat, layanan pelatihan dalam masa pengabdian guru pengungsi harus dibangun agar mereka diakui statusnya di negara asal atau suaka.

Pelatih lokal harus diidentifikasi untuk mengembangkan dan melaksanakan pelatihan yang tepat bagi para guru. Peningkatan kapasitas keterampilan fasilitasi dan pelatihan mereka mungkin diperlukan. Keseimbangan antara perempuan dan laki-laki, baik pelatih maupun yang dilatih harus dipromosikan. Penguatan lembaga yang menyediakan layanan pelatihan guru dalam masa pengabdian atau sebelum dalam masa pengabdian dapat dilakukan jika jumlah pelatih terbatas atau mereka tidak cukup terlatih. Upaya-upaya ini semestinya dikoordinasi oleh lembaga-lembaga nasional dan regional dan lembaga eksternal seperti badan-badan PBB dan LSM, termasuk:

- pengkajian terhadap kurikulum pelatihan guru dan buku teks;
  - inklusi dan konten terkait dengan situasi darurat yang terkini;
  - pengalaman mengajar praktis, seperti menjabat sebagai asisten pengajar atau magang.
4. **Pengakuan dan akreditasi pelatihan:** Persetujuan dan akreditasi oleh otoritas pendidikan sangat penting untuk menjamin kualitas dan pengakuan dari pelatihan guru dalam situasi darurat sampai tahap pemulihan. Untuk guru pengganti, otoritas pendidikan di negara tuan rumah harus menentukan apakah pelatihan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diterima oleh peserta didik dan guru (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 7 pada halaman 136-137).
  5. **Materi Belajar-mengajar:** Guru harus dilatih tentang cara untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk bahan ajar yang tertentu berdasarkan kurikulum. Mereka harus mempelajari cara membuat bahan ajar yang efektif dan tepat menggunakan bahan lokal (lihat juga Belajar-Mengajar, Catatan Panduan 1 standar 9 pada halaman 103 dan Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya standar 3, Catatan Panduan 1 pada halaman 125).
  6. **Kesadaran atas bahaya, pengurangan risiko dan kesiapsiagaan:** Guru perlu keterampilan dan pengetahuan untuk membantu pelajar dan masyarakat dalam mencegah dan mengurangi bencana di masa depan. Mereka mungkin membutuhkan dukungan untuk mengintegrasikan promosi pengurangan risiko dan pencegahan konflik dalam belajar-mengajar. Termasuk informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mencegah dan merespon potensi bahaya dan bencana yang dihadapi oleh masyarakat (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 47-49, Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 11 pada halaman 85; Akses Lingkungan Belajar standar 3, Catatan Panduan 1-2 pada halaman 87-88, dan Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 2 dan 6 pada halaman 133-136).

## Belajar Mengajar Standar 3: Instruksi dan Proses Belajar

Instruksi dan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, partisipatif dan inklusif.

### Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan panduan)

- Metode pembelajaran sesuai dengan usia, tingkat perkembangan, bahasa, budaya, kapasitas dan kebutuhan peserta didik (lihat Catatan Panduan 1-3).
- Guru menunjukkan pemahaman tentang isi pelajaran dan keterampilan mengajar dalam interaksi mereka dengan pelajar (lihat Catatan Panduan 1-3).
- Instruksi dan proses belajar menangani kebutuhan semua peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dengan mempromosikan inklusivitas dan mengurangi hambatan belajar (lihat Catatan Panduan 2).
- Orang tua dan tokoh masyarakat memahami dan menerima isi bahan ajar dan metode pengajaran yang digunakan (lihat Catatan Panduan 3).

### Catatan Panduan

1. **Keterlibatan aktif:** keterlibatan aktif pelajar adalah penting pada setiap tingkat perkembangan dan usia. Pengajaran harus interaktif dan partisipatif, memastikan bahwa semua peserta didik terlibat dalam pelajaran. Hal ini dapat menggunakan metode belajar-mengajar yang sesuai dengan perkembangan pengajaran, yang melibatkan kelompok kerja, proyek kerja, pendidikan sebaya, bermain peran, bercerita atau menggambarkan peristiwa, permainan, video atau cerita. Metode-metode ini harus dimasukkan ke dalam pelatihan guru, buku pelajaran sekolah dan program pelatihan. Kurikulum yang ada mungkin perlu disesuaikan untuk mengakomodasi pembelajaran aktif.

Anak-anak belajar melalui bermain. Pembelajaran mereka harus didasarkan pada permainan aktif dan interaksi. Permainan yang terarah dapat membangun keterampilan dan hubungan baik dengan teman-teman dan guru. Orang tua dan wali murid harus didukung dalam memahami dan menerapkan:

- pentingnya kepekaan terhadap kebutuhan anak-anak, dan responsif;
  - cara-cara untuk merawat anak-anak yang lebih muda;
  - metode permainan yang secara aktif melibatkan anak-anak dalam proses belajar dan memajukan pengembangan mereka.
2. **Hambatan untuk belajar:** Guru harus didukung untuk berbicara dengan orang tua, anggota masyarakat, otoritas pendidikan dan para pemangku kepentingan terkait lainnya tentang pentingnya kegiatan pendidikan formal dan non-formal dalam situasi darurat. Mereka dapat membahas masalah hak, keragaman dan inklusi dan pentingnya menjangkau anak-anak dan orang muda yang tidak mendapat bagian dalam kegiatan pendidikan. Diskusi ini penting untuk memastikan bahwa orang-orang memahami dan mendukung inklusi semua anak dan penyediaan bahan-bahan sumber daya dan fasilitas yang tepat. Di tingkat masyarakat, kelompok-kelompok seperti persatuan orang tua murid-guru, manajemen sekolah dan komite sekolah dapat pula dimobilisasi untuk membantu mengidentifikasi hambatan belajar dan mengembangkan rencana untuk mengatasinya (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan Panduan 7 pada halaman 75-76).
  3. **Metode pengajaran yang tepat:** Pendidikan dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan harus menawarkan kesempatan bagi perubahan positif kepada guru dalam pendidikan formal. Metode pengajaran dapat disesuaikan dengan konteks dan mampu mengatasi urusan hak, kebutuhan, usia, kekurangan dan kapasitas peserta didik. Namun, metode pengajaran yang lebih partisipatoris atau ramah-pelajar harus diperkenalkan dengan hati-hati. Penerapan metodologi baru, terutama pada tahap awal situasi darurat, mungkin dapat menimbulkan stress bahkan untuk guru berpengalaman sekalipun. Hal ini juga dapat mempengaruhi peserta didik, orang tua dan anggota masyarakat (lihat juga *Catatan Panduan pada Belajar-Mengajar INEE*, tersedia dalam *Toolkit INEE*: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit)).

Perubahan harus diperkenalkan dengan koordinasi, persetujuan dan dukungan dari otoritas pendidikan. Sekolah dan masyarakat mungkin memerlukan waktu untuk memahami dan menerima perubahan

tersebut. Penting untuk memastikan bahwa keprihatinan orang tua dan anggota masyarakat lainnya ditangani. Kesadaran dan perilaku guru harus terbiasa dengan konten baru dan dengan perubahan yang diharapkan.

Intervensi untuk pendidikan non-formal, pendekatan yang berpusat pada peserta didik dapat diperkenalkan melalui pelatihan dan dukungan berkelanjutan dari relawan, animator, fasilitator dan wali murid. Metodologi harus sesuai dengan kurikulum, menangani kompetensi dasar dari pendidikan dasar termasuk melek huruf, berhitung dan kecakapan hidup yang relevan dengan konteks situasi darurat (lihat Belajar-Mengajar Standar 1, Catatan Panduan 4 pada halaman 100).

## Belajar Mengajar Standar 4: Penilaian Hasil Pembelajaran

Metode yang tepat digunakan untuk mengevaluasi dan memvalidasi hasil belajar.

**Aksi Kunci** (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Informasi metode pengajaran melalui penilaian dan evaluasi berkelanjutan terhadap kemajuan peserta didik dalam menuju sasaran yang ditetapkan (lihat Catatan Panduan 1).
- Prestasi pelajar diakui dan kredit atau dokumen penyelesaian kursus disediakan secara sesuai (lihat Catatan Panduan 2).
- Lulusan program teknis dan kejuruan dikaji untuk mengukur kualitas dan relevansi program terhadap perubahan lingkungan (lihat Catatan Panduan 2).
- Penilaian dan metode evaluasi dianggap wajar, dapat diandalkan dan tidak mengancam pelajar (lihat Catatan Panduan 3).
- Penilaian relevan dengan kebutuhan masa depan pendidikan dan ekonomi peserta didik (lihat Catatan Panduan 4).

## Catatan Panduan

1. **Penilaian dan metode evaluasi dan tindakan yang efektif** harus diperkenalkan dan harus mempertimbangkan hal-hal berikut:
  - Relevansi: tes dan ujian sesuai dengan konteks pembelajaran dan usia peserta didik (lihat juga Catatan Panduan 4 di bawah);
  - Konsistensi: metode evaluasi diketahui dan diterapkan dalam cara yang sama di semua lokasi dan oleh semua guru;
  - Peluang: kesempatan lain untuk penilaian ditawarkan kepada peserta didik yang tidak hadir;
  - Waktu: penilaian dilakukan selama dan pada akhir instruksi;
  - Frekuensi: dapat dipengaruhi oleh situasi darurat;
  - Pengaturan yang aman dan tepat: penilaian formal dilakukan di tempat yang aman oleh tenaga kependidikan;
  - Transparansi: hasil penilaian dibagi dan dibahas dengan peserta didik dan, dalam kasus anak-anak, orangtua mereka. Dimana memungkinkan, penguji eksternal tersedia untuk tahap penting penilaian;

- Akomodasi peserta didik berkebutuhan khusus: alokasi waktu yang lebih lama, keterampilan dan pemahaman ditunjukkan melalui alternatif yang sesuai (lihat juga *Buku Saku Panduan Belajar bagi Penyandang Cacat*, tersedia dalam *Toolkit INEE: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit)*).
2. **Hasil Penilaian:** Dalam program pendidikan formal, penilaian dilakukan sehingga prestasi peserta didik dan hasil pemeriksaan dapat dikenali oleh otoritas pendidikan. Untuk pengungsi, upaya-upaya harus dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari otoritas pendidikan di negara atau daerah asal. Untuk pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis, penyedia layanan pelatihan harus memastikan kepatuhan dengan standar sertifikasi nasional. Dokumen penyelesaian kursus mungkin termasuk diploma dan sertifikat kelulusan.
  3. **Kode Etik Penilaian:** Penilaian dan evaluasi harus dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan kode etik. Ini berarti mereka harus adil, dapat diandalkan dan dilakukan dengan cara yang tidak meningkatkan atau menyebabkan tekanan ketakutan. Pelajar tidak boleh dilecehkan dengan imbalan nilai yang baik atau promosi dalam suatu sekolah atau program. Untuk membantu memastikan bahwa kondisi ini terpenuhi, pemantauan, termasuk pemeriksaan-ditempat oleh pengawas dan anggota masyarakat, dapat bermanfaat (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 4 dan 9 pada halaman 81-82 dan 84-85).
  4. **Relevansi:** Isi dari penilaian dan proses yang digunakan harus terkait langsung dengan materi yang telah diajarkan. Tujuan belajar dan tolok ukur harus diidentifikasi dari kurikulum. Bila mungkin, penilaian harus disesuaikan untuk mencerminkan bahan ajar yang bukan kurikulum standar, sehingga mencerminkan belajar yang aktual daripada kesenjangan dalam mengajar.

Guru dan tenaga kependidikan lainnya harus menggunakan metode dan alat penilaian yang sesuai dan mudah digunakan. Bimbingan dan pelatihan dalam penggunaan alat penilaian akan meningkatkan

efektivitas. Anggota masyarakat dapat membantu dalam penilaian kemajuan belajar dan efektivitas pengajaran. Hal ini mungkin sangat bermanfaat dalam kelas besar atau multi-grade, atau ketika pelajar perlu perhatian individu yang lebih.

**T**

**Untuk Alat-alat yang dapat membantu Anda dalam penerapan standar tersebut, kunjungi *Toolkit INEE*: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit)**

*Toolkit INEE*

- ↳ Standar Minimum INEE
- ↳ Alat-alat Penerapan
- ↳ Akses dan Lingkungan Belajar

*Toolkit INEE*

- ↳ Standar Minimum INEE
- ↳ Catatan Panduan untuk Belajar dan Mengajar
- ↳ Sumber Daya untuk Belajar dan Mengajar

# 4

## **DOMAIN EMPAT:**

Guru dan Tenaga Kependidikan  
Lainnya.

**Standar-standar dasar:  
Partisipasi Masyarakat, Koordinasi, Analisis**

**Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya**

**Standar 1  
Rekrutmen dan  
Seleksi**

Guru dan tenaga kependidikan lainnya direkrut dalam jumlah yang cukup dan tepat melalui proses partisipatif dan transparan, berdasarkan keragaman seleksi dan ekuitas.

**Standar 2  
Kondisi Kerja**

Guru dan tenaga kependidikan lainnya diberikan kondisi kerja dan kompensasi yang layak.

**Standar 3  
Dukungan dan  
Pengawasan**

Mekanisme dukungan dan pengawasan untuk guru dan tenaga kependidikan lainnya yang tepat.

**G**uru dan tenaga kependidikan lainnya menyediakan kebutuhan pendidikan anak dan pemuda dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan. Status profesional mereka mungkin berbeda, mulai dari pegawai negeri dengan gelar akademik sampai relawan atau pendidik berbasis masyarakat dengan pendidikan formal minim. Istilah guru dan tenaga pendidikan lainnya meliputi:

- Guru kelas dan asisten guru kelas;
- Guru-guru pra-sekolah atau pendidikan anak usia dini;
- Pendidik orang berkebutuhan khusus;
- Pelatih spesialis subjek dan pelatih kejuruan;
- Fasilitator ramah anak;
- Relawan komunitas, pemuka agama dan instruktur ketrampilan hidup;
- Kepala guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan pejabat pendidikan lainnya.

Peran dan tanggung jawab guru dan tenaga kependidikan lainnya tergantung pada jenis pendidikan (formal atau non-formal) dan jenis lingkungan belajar. Partisipasi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengambilan keputusan dan pengembangan profesi mereka sendiri adalah komponen penting dalam desain proyek pendidikan situasi darurat.

Identifikasi, rekrutmen dan seleksi guru dan tenaga kependidikan lainnya harus non-diskriminatif, partisipatif dan transparan. Diperlukan keseimbangan gender dan keterwakilan masyarakat. Guru dan tenaga kependidikan lainnya harus memiliki pengalaman dan keterampilan yang relevan dan harus mendapat kompensasi yang tepat. Mereka harus mempunyai kebebasan untuk bergabung atau membentuk serikat buruh. Kode etik, peran dan tanggung jawab, mekanisme pengawasan, kondisi kerja, pengaturan kontrak, kompensasi dan hak kerja berkembang dengan baik jika dikonsultasikan dengan masyarakat yang terkena dampak.

Dalam situasi krisis, guru dan tenaga kependidikan lainnya memerlukan dukungan untuk menghadapinya, membangun kembali dan menyembuhkannya. Pendidikan dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan memperkuat ketahanan dengan menyediakan anak-anak, pemuda dan masyarakat melalui informasi bertahan-hidup, kesempatan

belajar dan dukungan sosial yang menuju masa depan yang lebih positif. Guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan kontributor penting untuk pendidikan dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan. Mereka juga memiliki hak untuk dukungan dan bimbingan diri-sendiri.

## Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya Standar 1: Rekrutmen dan Seleksi

Jumlah guru yang berkualitas dan tenaga kependidikan lainnya yang cukup tepat direkrut melalui proses partisipatif dan transparan, berdasarkan kriteria seleksi yang mencerminkan keragaman dan keadilan.

### **Aksi Kunci** (untuk dibaca bersama dengan Catatan panduan)

- Sebelum proses perekrutan, deskripsi pekerjaan dan pedoman dikembangkan secara jelas, tepat, non-diskriminatif (lihat Catatan Panduan 1).
- Suatu komite seleksi memilih guru dan tenaga kependidikan lainnya berdasarkan kriteria yang transparan dan penilaian kompetensi, dengan mempertimbangkan penerimaan komunitas, gender dan keanekaragaman (lihat Catatan Panduan 2-4).
- Jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya yang direkrut dan dikerahkan cukup untuk menghindari kelas yang terlalu besar (lihat Catatan Panduan 5).

### **Catatan Panduan**

1. **Deskripsi pekerjaan** tidak diskriminatif atas dasar gender, etnis, agama, kebutuhan khusus atau keanekaragaman. Mencakup sekurang-kurangnya:
  - Peran dan tanggung jawab;
  - Jalur pelaporan yang jelas;
  - Kode etik. (Lihat juga Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya standar 2, Catatan Panduan 1 pada halaman 122).
2. **Pengalaman dan kualifikasi:** Penting untuk merekrut guru berkualitas dengan kredensial yang diakui. Mereka membutuhkan keterampilan untuk memberikan dukungan psikososial bagi peserta didik dan untuk mengajar pelajar berkebutuhan khusus. Jika guru berkualitas tidak lagi memiliki sertifikat atau dokumen lainnya karena situasi darurat, keterampilan mengajar mereka harus dikaji. Jika guru yang berkualitas tidak cukup tersedia, yang sedikit atau tidak memiliki pengalaman mengajar mungkin perlu dipertimbangkan. Pelatihan akan diperlukan

bagi guru-guru, berdasarkan penilaian terhadap tingkat pendidikan dan pengalaman mengajar mereka.

Bila memungkinkan, guru yang dapat berbicara dengan bahasa ibu peserta didik harus direkrut. Jika diperlukan dan sesuai, dianjurkan untuk diberikan kursus bahasa secara intensif di negara tuan rumah (lihat juga belajar-mengajar, Standar 1, Catatan Panduan 7 pada halaman 102).

Dalam beberapa situasi, mungkin perlu untuk bekerja secara proaktif terhadap keseimbangan gender dalam perekrutan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Termasuk penyesuaian kriteria rekrutmen yang dikonsultasikan dengan panitia seleksi. Usia minimum untuk guru dan tenaga kependidikan lainnya adalah 18 tahun, sesuai dengan instrumen hukum dan peraturan perburuhan internasional dan hak asasi manusia. Mungkin perlu sesekali untuk merekrut orang muda sebagai fasilitator, asisten atau tutor.

### 3. **Kriteria pemilihan guru** mungkin termasuk yang berikut:

- Atribut dan kualifikasi profesional;
- Latar belakang akademik;
- Pengalaman mengajar, termasuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus;
- Kepekaan terhadap kebutuhan psikososial anak dan pemuda;
- Pengalaman dan keterampilan dalam perdagangan atau keterampilan teknis lainnya;
- Kemampuan bahasa yang relevan, yang mungkin termasuk pengetahuan bahasa isyarat lokal dan Braille.

Kualifikasi personal:

- Usia dan gender, menjaga keseimbangan gender dalam pikiran;
- Toleransi;
- Latar belakang etnis dan agama;
- Keragaman yang mencerminkan kondisi masyarakat. Penting untuk mempertimbangkan ketegangan sosial yang mendasari dan ketidaksetaraan yang berlangsung lama, yang dapat berpengaruh pada proses perekrutan (lihat juga Belajar-mengajar standar 1, Catatan Panduan 8 pada halaman 102-103).

Kualifikasi lainnya:

Guru dan tenaga kependidikan lainnya harus berinteraksi dengan masyarakat dan dapat diterima oleh mereka. Mereka harus dipilih, jika memungkinkan, terutama dari masyarakat yang terdampak karena pemahaman mereka tentang masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik lokal yang dihadapi. Jika guru dan tenaga kependidikan lainnya diambil dari luar, perlu untuk mempertimbangkan kompensasi tambahan seperti transportasi dan akomodasi. Jika tempat belajar ditetapkan untuk pengungsi atau penyintas, memperkerjakan guru yang memenuhi syarat dan tenaga kependidikan lainnya dari masyarakat setempat dapat membantu dalam membina hubungan baik (lihat juga *Catatan Panduan INEE tentang Kompensasi Guru*, tersedia dalam *Toolkit* INEE: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit)).

4. **Referensi:** Bila memungkinkan, referensi dari semua guru dan tenaga kependidikan lainnya yang direkrut harus diperiksa untuk memastikan bahwa peserta didik tidak berisiko.
5. **Ukuran Kelas:** Penting untuk mengatur batas realistis ukuran kelas yang ditentukan secara lokal, yang memungkinkan masuknya semua anak dan pemuda, termasuk yang berkebutuhan khusus. Jumlah guru yang direkrut harus cukup untuk menjamin rasio guru-murid yang sesuai. Pemangku kepentingan harus mempertimbangkan instruksi standar nasional dan lokal yang relevan untuk rasio guru-murid. Dalam beberapa kasus, organisasi kemanusiaan mungkin memiliki standar mereka sendiri atas rasio guru-murid. Dalam beberapa kasus, direkomendasikan rasio 1 sampai 40. Namun, para pemangku kepentingan didorong untuk meninjau dan menentukan apa yang tepat dan realistis secara lokal (lihat juga Pendahuluan pada halaman 17-19 untuk contoh Kontekstualisasi Standar Minimum dan standar Belajar-mengajar pada halaman 93-114).

## Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya Standar 2: Kondisi Kerja

Guru dan tenaga kependidikan lainnya sudah memahami kondisi kerja dan mendapat kompensasi yang tepat.

### Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Sistem Kompensasi dan kondisi kerja terkoordinasi antara semua pihak terkait (lihat Catatan Panduan 1-2).
- Kompensasi dan kondisi kerja dijelaskan dalam kontrak, dan kompensasi diberikan secara berkala (lihat Catatan Panduan 2).
- Guru dan tenaga kependidikan lainnya diizinkan untuk menegosiasikan syarat dan kondisi.
- Suatu kode etik, yang mencakup petunjuk pelaksanaan yang jelas, ada dan dihormati (lihat Catatan Panduan 3).

### Catatan Panduan

1. **Kondisi kerja:** Deskripsi kerja, deskripsi kondisi kerja dan kode etik harus dimasukkan dalam kontrak. Hal ini membantu untuk memprofesionalisasi peran guru dalam lingkungan belajar dan masyarakat. Di dalamnya termasuk mendefinisikan layanan yang diharapkan dari para guru sebagai timbal-balik atas kompensasi dari masyarakat, otoritas pendidikan dan pemangku kepentingan lain, dan menyediakan kerangka kerja bagi perilaku guru yang tepat sesuai yang diharapkan. Kontrak harus menetapkan:
  - Tugas pekerjaan dan tanggung jawab;
  - Kompensasi;
  - Syarat kehadiran;
  - Jam dan hari kerja;
  - Panjang kontrak;
  - Kode etik;
  - Dukungan, pengawasan dan mekanisme penyelesaian sengketa. (Lihat juga Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 119).
2. **Kompensasi:** kompensasi yang memadai memungkinkan guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk fokus pada pekerjaan profesional

mereka tanpa harus mencari sumber tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apabila diperlukan, sistem pembayaran yang sesuai untuk guru dan tenaga kependidikan lainnya harus ditata kembali atau dikembangkan sesegera mungkin. Sistem pembayaran harus menyatakan bahwa otoritas pendidikan memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kompensasi. Koordinasi antar pemangku kepentingan yang relevan, termasuk otoritas pendidikan, serikat pekerja, anggota masyarakat, komite dan asosiasi, badan-badan PBB dan LSM, meletakkan dasar untuk kebijakan kompensasi yang berkelanjutan dan praktik, dan membantu dalam transisi dari tahap pemulihan sampai tahap pembangunan.

Kompensasi dapat berbentuk moneter maupun non-moneter. Sistem ini harus adil dan berkelanjutan. Setelah diimplementasikan, kebijakan kompensasi menjadi preseden bahwa guru dan tenaga kependidikan lainnya akan dipertahankan. Dalam situasi pengungsian, guru yang berkualitas dan tenaga kependidikan lainnya mungkin lebih cenderung bergerak di mana ada upah yang lebih tinggi, bahkan jika itu berarti melintasi perbatasan. Penting untuk memperhitungkan kekuatan pasar seperti:

- Biaya hidup;
- Permintaan untuk guru dan profesional lainnya;
- Tingkat upah di kualifikasi profesi serupa, seperti perawatan kesehatan;
- Ketersediaan guru berkualitas dan tenaga kependidikan lainnya.

(Lihat juga *Jaringan Minimum Standar untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, Standar Penciptaan Pekerjaan).

Kompensasi tergantung pada kondisi kerja dan kode etik. Konflik kepentingan harus dihindari, termasuk situasi dimana guru mungkin memungut secara pribadi biaya siswa untuk mengajar dan les (lihat juga Koordinasi standar 1, Catatan panduan 2 pada halaman 41-42 dan *Catatan Panduan INEE tentang Kompensasi Guru*, tersedia dalam *Toolkit INEE*: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit)).

3. Suatu kode etik yang jelas menetapkan standar perilaku untuk guru dan tenaga kependidikan lainnya. Standar-standar ini berlaku di lingkungan belajar dan selama acara dan kegiatan pendidikan. Kode etik menentukan konsekuensi wajib bagi orang-orang yang tidak mematuhi. Ini mencakup komitmen bahwa guru dan tenaga kependidikan lainnya akan:

- menghormati, melindungi dan, dalam kemampuan mereka, memenuhi hak-hak pendidikan peserta didik;
- mempertahankan standar yang tinggi atas sikap dan etika perilaku;
- aktif menghilangkan hambatan untuk pendidikan untuk memastikan lingkungan non-diskriminatif di mana semua peserta didik diterima;
- mempertahankan lingkungan yang sehat, inklusi, dan melindungi, bebas dari pelecehan seksual dan lainnya, eksploitasi tenaga kerja peserta didik atau bantuan seksual, intimidasi, pelecehan, kekerasan dan diskriminasi;
- tidak mengajarkan atau mendorong pengetahuan atau tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip non-diskriminasi;
- menjamin kehadiran yang teratur dan ketepatan waktu.

(Lihat juga contoh kode etik dalam *Toolkit* INEE: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit); Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan panduan 4 dan 9 pada halaman 81-82 dan 84-85, dan Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya standar 3, Catatan Panduan 4 pada halaman 126).

## Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya Standar 3: Dukungan dan Pengawasan

Dukungan dan mekanisme pengawasan untuk guru dan tenaga kependidikan lainnya berfungsi secara efektif.

### Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Pengajaran, bahan ajar, dan ketersediaan ruang memadai (lihat Catatan panduan 1).
- Guru dan tenaga kependidikan lainnya dilibatkan dalam pengembangan yang profesional, memberikan kontribusi terhadap dukungan dan motivasi mereka (lihat Catatan Panduan 2-3).
- Suatu mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel disiapkan demi dukungan, penilaian, dan pemantauan secara reguler bagi para guru dan tenaga kependidikan lainnya (lihat Catatan Panduan 2-3).
- Penilaian kinerja untuk guru dan tenaga kependidikan lainnya dilakukan, didokumentasikan dan didiskusikan secara teratur (lihat Catatan Panduan 4).
- Siswa secara teratur memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang kinerja guru dan tenaga kependidikan lainnya (lihat Catatan Panduan 5).
- Dukungan psikososial praktis yang tepat dan dapat diakses tersedia bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya (lihat Catatan Panduan 6).

### Catatan Panduan

1. **Materi dan ruang belajar-mengajar** harus memadai sehingga memungkinkan guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mengajar dan bekerja secara efektif (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 3 pada halaman 86-91; Belajar-mengajar standar 1 Catatan Panduan 9 pada halaman 103, dan Belajar-mengajar standar 2, Catatan Panduan 5, di halaman 107).
2. **Dukungan dan mekanisme pengawasan:** pengawasan, akuntabilitas, dan manajemen yang efektif sangat penting untuk memberikan dukungan profesional dan motivasi guru dan menjaga kualitas

pengajaran. Sistem harus dikembangkan sejauh mungkin di bawah kepemimpinan dari otoritas pendidikan yang relevan dan dengan partisipasi serikat pendidikan, anggota masyarakat, komite dan asosiasi, badan-badan PBB dan LSM. Bimbingan dan dukungan sebaya dapat memotivasi guru dan tenaga kependidikan lainnya dengan membantu mereka untuk menetapkan tujuan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja mereka (lihat juga Partisipasi Masyarakat standar 1, Catatan Panduan 1-5 pada halaman 28-34; Belajar-mengajar standar 2, Catatan Panduan 3 pada halaman 106-107, dan Rekomendasi UNESCO / ILO tentang Status Guru (1966)).

**3. Peningkatan kapasitas, pelatihan dan pengembangan profesional:**

Sangat penting untuk berkonsultasi dengan guru dan tenaga kependidikan lainnya tentang insentif, motivasi, kebutuhan dan prioritas mereka untuk peningkatan kapasitas. Hal ini membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan sebelum masa pengabdian dan dalam masa pengabdian serta peluang untuk pengembangan profesional. Peningkatan kapasitas, pelatihan dan pengembangan profesional harus disediakan dalam cara yang tidak diskriminatif (lihat juga Belajar-mengajar standar 2, Catatan Panduan 3 pada halaman 106-107).

**4. Penilaian Kinerja:** Penilaian kinerja yang benar mendukung kinerja yang baik. Penilaian efisiensi dan efektivitas guru dan tenaga kependidikan lainnya termasuk diskusi dengan masing-masing individu untuk mengidentifikasi isu dan menyetujui tindak lanjut kegiatan. Proses penilaian kinerja bisa meliputi:

- Mengembangkan kriteria untuk mendukung observasi kelas dan evaluasi;
- Memberikan umpan balik;
- Menetapkan tujuan dan target untuk mengukur pertumbuhan dan kemajuan.

(Lihat juga Catatan Panduan 5 di bawah ini dan Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya standar 2, Catatan Panduan 3 pada halaman 124).

5. **Partisipasi Pembelajar:** Pelibatan peserta didik dalam proses penilaian dan evaluasi adalah penting. Ini membantu dalam memahami semua aspek dari lingkungan belajar dan dalam menjamin kualitas. Peserta didik secara berkala dapat memberikan umpan balik kepada pihak netral sebagai bagian dari proses penilaian kinerja. Topik dapat mencakup kinerja pengajaran, perilaku, kekhawatiran tentang lingkungan pengajaran dan isu-isu perlindungan.
  
6. **Dukungan psikososial dan kesejahteraan:** bahkan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang terlatih dan berpengalaman sekalipun dapat kewalahan dalam situasi krisis. Mereka menghadapi tantangan baru dan tanggung jawab dan mungkin mengalami penderitaan. Kemampuan mereka untuk mengatasi dan memberikannya untuk pelajar tergantung pada kesejahteraan mereka sendiri dan ketersediaan dukungan (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 8-9 pada halaman 84-85, Akses dan Lingkungan Belajar standar 3, Catatan Panduan 8 pada halaman 91, dan Belajar-mengajar standar 1, Catatan Panduan 6 pada halaman 101-102).

# T

**Untuk Alat-alat yang dapat membantu Anda dalam penerapan standar tersebut, kunjungi *Toolkit INEE*: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit)**

## *Toolkit INEE*

- ↳ Standar Minimum INEE
  - ↳ Alat-alat Penerapan
    - ↳ Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya

# 5

**DOMAIN LIMA:**

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

**Standar-standar Dasar:  
Partisipasi Masyarakat, Koordinasi, Analisis**

**Kebijakan Pendidikan Lainnya**

**Standar 1  
Hukum dan  
Perumusan Kebijakan**

Otoritas pendidikan memprioritaskan kontinuitas dan pemulihan kualitas pendidikan, termasuk akses bebas dan inklusi ke sekolah.

**Standar 2 Perencanaan dan Pelaksanaan**

Kegiatan Pendidikan mempertimbangkan kebijakan pendidikan, hukum, standar, rencana nasional dan internasional, serta populasi belajar.

Deklarasi dan instrumen hukum Internasional menyatakan bahwa mendapatkan pendidikan adalah hak semua individu. Adalah tugas otoritas nasional dan masyarakat internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak ini.

Hak untuk kebebasan berekspresi, non-diskriminasi dan untuk memiliki suara dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan sosial dan pendidikan merupakan bagian integral dari hak untuk pendidikan.

Dalam situasi tanggap darurat sampai tahap pemulihan, adalah penting bahwa hak-hak dilindungi. Untuk mendukung hal ini, otoritas pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya harus mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pendidikan situasi darurat. Rencana ini harus:

- mempertimbangkan kebijakan dan standar pendidikan internasional dan nasional;
- menunjukkan komitmen atas hak untuk pendidikan;
- menunjukkan ketanggapan terhadap kebutuhan belajar dan hak-hak orang yang terkena dampak krisis;
- mencakup langkah-langkah untuk memastikan akses terhadap pendidikan berkualitas untuk semua orang;
- menunjukkan dengan jelas hubungan antara kesiapsiagaan situasi darurat, tanggap darurat dan pembangunan jangka panjang.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi, program dan kebijakan sangat penting untuk keberhasilan kesiapsiagaan dan respon darurat.

Untuk memastikan promosi kesetaraan gender dan menghargai perbedaan, kebijakan pendidikan darurat dan program sepenuhnya harus memasukkan ketentuan-ketentuan Konvensi tentang Hak-hak Anak dan mencerminkan Pendidikan untuk Semua serta kerangka kerja *Millenium Development Goals*. Instrumen ini mendukung dan mempromosikan hukum dan kebijakan pendidikan yang melindungi terhadap segala bentuk diskriminasi dalam pendidikan, termasuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin, agama, bahasa, etnis dan berkebutuhan khusus.

## Kebijakan Pendidikan Standar 1: Perumusan Hukum dan Kebijakan

Otoritas pendidikan memprioritaskan keberlanjutan dan pemulihan pendidikan yang berkualitas, termasuk akses inklusi dan bebas ke sekolah.

### Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Undang-undang, peraturan, dan kebijakan pendidikan nasional menjunjung status yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional atas fasilitas pendidikan, pelajar, guru dan tenaga kependidikan lainnya (lihat Catatan Panduan 1).
- Undang-undang, peraturan dan kebijakan pendidikan nasional menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan dan menjamin kelangsungan pendidikan (lihat Catatan Panduan 1-2).
- Hukum, peraturan dan kebijakan memastikan bahwa setiap fasilitas pendidikan yang dibangun kembali atau diganti adalah aman (lihat Catatan Panduan 2-3).
- Hukum, peraturan dan kebijakan didasarkan pada analisis konteks yang dikembangkan melalui proses partisipatif dan inklusi (lihat Catatan Panduan 4).
- Kebijakan pendidikan nasional didukung dengan rencana tindakan, hukum dan anggaran yang memungkinkan respon yang cepat untuk situasi darurat (lihat Catatan Panduan 5-6).
- Hukum, peraturan dan kebijakan memperbolehkan sekolah untuk pengungsi menggunakan kurikulum dan bahasa negara atau daerah asal (lihat Catatan Panduan 7).
- Hukum, peraturan dan kebijakan memungkinkan pelaku organisasi non-pemerintah (ornop), seperti LSM dan badan-badan PBB, untuk mendirikan pendidikan di program darurat (lihat Catatan Panduan 8).

### Catatan Panduan

1. **Tugas otoritas nasional adalah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan** sesuai dengan instrumen hak asasi manusia internasional (lihat Pendahuluan di halaman 1). Instrumen-instrumen hak asasi manusia ini termasuk aturan internasional tentang penanganan populasi, dengan penekanan

pada anak dan pemuda. Bahasannya meliputi gizi, rekreasi, budaya, pencegahan kekerasan, dan pendidikan anak usia dini untuk anak-anak berusia di bawah enam tahun. Konvensi Hak Anak sangat penting karena mencakup hak anak-anak atas pendidikan dan hak-hak mereka dalam proses pendidikan, seperti hak untuk diajak berkonsultasi terhadap keputusan yang mempengaruhi mereka, hak untuk diperlakukan dengan hormat dan hak untuk tahu tentang hak-hak mereka (lihat juga Partisipasi Masyarakat standar 1, Catatan Panduan 5 pada halaman 32-34, Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan Panduan 1-2 pada halaman 71-74, dan Belajar-mengajar standar 1, Catatan Panduan 5-6 pada halaman 100-102).

Pelajar, guru dan tenaga kependidikan memiliki status sipil, seperti halnya bangunan pendidikan. Mereka dilindungi dari serangan bersenjata di bawah Konvensi Jenewa, yang merupakan bagian dari hukum humaniter internasional yang diakui oleh setiap negara. Otoritas nasional dan pemangku kepentingan internasional harus mendukung usaha-usaha untuk membangun status perlindungan ini ke dalam praktik dan hukum nasional, dan untuk mencegah penggunaan fasilitas pendidikan untuk tujuan militer.

Saat kekerasan mengancam kelangsungan pendidikan dan perlindungan anak, advokasi untuk mempromosikan pendidikan, hak asasi manusia dan hukum humaniter yang relevan dengan pendidikan merupakan prioritas. Pemantauan dan pelaporan serangan terhadap peserta didik, tenaga pendidikan dan fasilitas atau pendudukan fasilitas pendidikan sangat penting. Ini menghormati martabat korban dan mengarah ke investigasi, respon, dan penuntutan yang terkoordinasi (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 1, 3-4 dan 6-7 pada halaman 78-84).

2. **Hukum dan kebijakan pendidikan nasional harus menjamin keberlanjutan pendidikan** untuk semua. Rencana kontinjensi sekolah lokal maupun nasional harus mencakup bahaya yang dikenal, diprediksi dan kemunculan yang berulang. Ini termasuk bencana skala kecil, seperti banjir, yang menyebabkan dampak negatif kumulatif

pada pendidikan. Kebutuhan khusus anak-anak yang rentan dan pemuda harus dimasukkan. Di negara-negara dimana tidak ada hukum atau aturan situasi darurat untuk pendidikan, situasi darurat ini dapat memberikan kesempatan untuk menyusunnya (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 47-49, Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan panduan 11 di halaman 85, dan Belajar-mengajar standar 2, Catatan Panduan 6 pada halaman 107).

Pelayanan pendidikan anak usia dini untuk anak-anak di bawah usia sekolah dan orang tua atau wali harus disertakan dalam program dan kebijakan pendidikan. Layanan dapat termasuk:

- perawatan dini dan kelompok orangtua;
- kelompok bermain;
- ruang kegiatan yang aman;
- hubungan dengan kesehatan, nutrisi dan layanan lainnya.

Di negara-negara dengan kebijakan pemuda nasional, situasi darurat memberikan kesempatan untuk memperkuat kerja lintas-sektoral yang berfokus pada pendidikan pemuda. Di negara-negara tanpa suatu kebijakan pemuda nasional, para pemangku kepentingan yang relevan harus menentukan *focal point* untuk masalah pemuda dalam suasana krisis. Harus ada kerja kolaboratif dalam kebijakan lintas sektoral, perencanaan dan pelaksanaan program yang mempertimbangkan masalah kepemudaan.

Jika kebijakan pemuda nasional dikembangkan, maka harus didasarkan pada analisis dari beragam kepentingan dan pengaruh antara sub-kelompok pemuda dan peluang serta risiko berbagai bentuk partisipasi pemuda. Suatu kebijakan pemuda nasional melengkapi kerangka kerja nasional tentang:

- Pendidikan;
- Pendidikan teknik dan pelatihan kejuruan;
- Kesiapsiagaan darurat.

Lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan panduan 2 pada halaman 73-74 dan *Jaringan Standar Minimum untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis* SEEP, Standar Penciptaan Ketenagakerjaan).

3. **Keamanan sekolah-sekolah baru dan yang dibangun kembali:** lokasi sekolah harus dipilih demi keselamatan dari ancaman dan bahaya yang diketahui, dan dirancang serta dibangun untuk menjadi tangguh. Ruang yang cukup harus direncanakan sedemikian rupa sehingga pendidikan tidak terganggu jika sekolah diperlukan sebagai tempat penampungan darurat sementara (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan Panduan 9 pada halaman 76-77, Akses dan Lingkungan Belajar standar 3, Catatan Panduan 1 - 2 pada halaman 87-88, dan *Catatan Pedoman INEE tentang Konstruksi Sekolah Aman*, tersedia dalam *Toolkit INEE*: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit)).
4. **Analisis konteks:** Aturan dan kebijakan pendidikan harus mencerminkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek sosial, ekonomi, keamanan, lingkungan dan dinamika politik dalam konteks situasi darurat. Dengan cara ini, perencanaan dan program pendidikan dapat memenuhi kebutuhan dan hak peserta didik dan masyarakat yang lebih luas, dan menghindari perpecahan sosial atau konflik.

Konteks mungkin termasuk pengkajian konflik, pengkajian hak asasi manusia serta analisis risiko dan kesiapsiagaan bencana. Otoritas pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya harus berkontribusi dalam analisis konteks untuk memastikan bahwa isu-isu pendidikan termasuk dalam tinjauan. Analisis Konteks melibatkan konsultasi luas dengan masyarakat. Otoritas pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya harus mengadvokasi analisis tersebut untuk ditindak-lanjuti dan dimasukkan sebagai bagian dari review sektor pendidikan reguler dan proses reformasi (lihat juga Analisis Standar 1, Catatan Panduan 3-6 pada halaman 47-51).

Analisis risiko mencakup analisis risiko korupsi dalam administratif, politik dan lingkungan kemanusiaan. Diskusi tentang korupsi harus terbuka mungkin dalam perencanaan dan pelaksanaan respon pendidikan situasi darurat. Diskusi yang terbuka adalah cara terbaik untuk pengembangan kebijakan anti-korupsi yang kuat. Pembahasan isu-isu korupsi tidak berarti memaafkan korupsi atau menyiratkan kerentanan tertentu seorang aktor (lihat juga Analisis Standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 47-49).

5. **Berbagi informasi dan sistem informasi:** Mereka yang terlibat dalam kebijakan pengembangan pendidikan dan implementasi seharusnya berbagi informasi mengenai kebijakan dan tanggapan strategis. Hal ini sangat penting dalam mengurangi konflik dan bencana. Informasi harus mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua (lihat juga Koordinasi standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 42). Hukum, peraturan dan kebijakan harus dikembangkan berdasarkan informasi yang akurat. Data manajemen sistem informasi pendidikan harus dihubungkan dengan informasi mengenai wilayah dan kelompok penduduk yang rentan terhadap jenis situasi darurat tertentu. Ini adalah strategi kesiapsiagaan yang dapat memberikan masukan untuk perencanaan pendidikan lokal dan nasional. Bila memungkinkan, data pendidikan yang dikumpulkan oleh masyarakat harus dimasukkan ke dalam manajemen sistem informasi pendidikan nasional (lihat juga Analisis Standar 3, Catatan Panduan 3 pada halaman 61-62).
6. **Kerangka kerja kesiapsiagaan terhadap bencana:** Pendidikan harus menjadi bagian integral dari kerangka kerja kesiapsiagaan bencana nasional. Sumber daya harus diamankan untuk memberikan respon pendidikan yang tepat waktu dan efektif. Pemangku kepentingan Internasional, pendukung program pendidikan lokal atau nasional, harus mempromosikan kesiapsiagaan untuk pendidikan tanggap darurat sebagai komponen program pembangunan. Kerangka kerja kesiapsiagaan harus membuat ketentuan eksplisit untuk partisipasi anak dan pemuda dalam upaya respon pada tingkat masyarakat (lihat juga Partisipasi Masyarakat Standar 1, Catatan Panduan 4-5 pada halaman 31-34; Partisipasi Masyarakat Standar 2, Catatan Panduan 5 pada halaman 38-39; Akses dan lingkungan pembelajaran standar 2, catatan Panduan 11 pada halaman 85, dan Belajar-Mengajar standar 2, Catatan Panduan 6 pada halaman 107).
7. **Non-diskriminasi:** Otoritas pendidikan harus menjamin pendidikan yang menjangkau semua kelompok dengan cara yang adil. Menurut hukum internasional, pengungsi harus memiliki hak pendidikan yang sama seperti warga negara setempat di tingkat sekolah dasar. Pada tingkat yang lebih tinggi, pengungsi harus memiliki akses pada studi,

pengakuan sertifikat, ijazah dan gelar, pengampunan biaya, biaya dan akses untuk beasiswa yang sepadan dengan warga negara tuan rumah. Pelajar pengungsi internal mempunyai hak-hak pendidikan yang sama seperti warga negara yang tidak mengungsi. Mereka dilindungi oleh hukum hak asasi manusia nasional dan internasional dan Panduan prinsip-prinsip bagi Pengungsian Internal (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan Panduan 1-2 dan 4 pada halaman 71-75, Belajar-Mengajar Standar 1, Catatan Panduan 3 dan 7-8 pada halaman 98-99 dan 102-103; dan Belajar-Mengajar Standar 2, Catatan Panduan 5 pada halaman 107).

8. **Pelaku non-pemerintah dan PBB** seharusnya diizinkan untuk melengkapi kebutuhan pendidikan nasional untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan dan hak-hak semua peserta didik terpenuhi. Akses mereka untuk mendirikan program dan fasilitas dan untuk merespon dengan cepat dan aman untuk situasi darurat harus difasilitasi oleh negara tuan rumah. Ini mungkin termasuk kemudahan mendapatkan visa dan peraturan bea cukai khusus untuk bahan bantuan serta bahan ajar.

## Kebijakan Pendidikan Standar 2: Perencanaan dan Implementasi

Kegiatan pendidikan mempertimbangkan kebijakan, hukum, standar, dan rencana pendidikan nasional dan internasional, dan kebutuhan belajar masyarakat yang menjadi korban.

### Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Program pendidikan formal dan non-formal mencerminkan kebijakan dan kerangka kerja hukum nasional maupun internasional (lihat Catatan Panduan 1).
- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan terintegrasi dengan sektor tanggap situasi darurat lainnya (lihat Catatan Panduan 2).
- Program pendidikan situasi darurat dikaitkan dengan strategi dan rencana pendidikan nasional dan diintegrasikan ke dalam pembangunan jangka panjang sektor pendidikan.
- Otoritas pendidikan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pendidikan lokal dan nasional yang mempersiapkan merespon dan situasi darurat saat ini dan di masa mendatang (lihat Catatan Panduan 3).
- Sumber daya keuangan, teknis, bahan dan sumber daya manusia dijamin cukup untuk penyusunan kebijakan pendidikan yang efektif dan transparan, dan untuk perencanaan serta pelaksanaan program pendidikan (lihat Catatan Panduan 4-5).

### Catatan Panduan

1. **Rapat hak dan tujuan pendidikan:** program pendidikan formal dan non-formal harus menyediakan kegiatan pendidikan inklusi yang memenuhi tujuan dan hak-hak pendidikan. Mereka harus sesuai dengan kerangka hukum nasional dan internasional (lihat Akses dan Lingkungan Belajar Standar 1, Catatan Panduan 1-2 dan 4 pada halaman 71-75 dan Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan Panduan 1 dan 7 pada halaman 132-133 dan 136-137).
2. **Hubungan inter-sektoral:** Pendidikan dalam kedaruratan, termasuk pendidikan anak usia dini dan kegiatan pemuda, harus dikaitkan

dengan kegiatan yang dilakukan di sektor lain seperti penyediaan air, sanitasi dan promosi kebersihan, gizi, ketahanan pangan dan bantuan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan pemulihan ekonomi (lihat juga Analisis Standar 1, Catatan Panduan 6 pada halaman 50; Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan Panduan 9 pada halaman 76-77, Akses dan Lingkungan Belajar standar 3 pada halaman 86-91, Buku Pegangan Sphere, dan *Jaringan Standar Minimum untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, Standar Penciptaan Ketenagakerjaan dan Standar Pengembangan Usaha).

3. **Rencana pendidikan lokal dan nasional** harus menunjukkan tindakan yang akan diambil dalam situasi darurat saat ini atau masa depan. Mereka harus menentukan mekanisme pengambilan keputusan, koordinasi, keamanan dan perlindungan untuk koordinasi antar-sektoral. Rencana harus didasarkan pada pemahaman menyeluruh tentang konteks dan harus mencakup indikator dan mekanisme peringatan dini bencana dan konflik. Mereka harus didukung oleh kebijakan pendidikan dan kerangka kerja yang tepat. Harus ada sistem untuk merevisi secara teratur rencana pendidikan lokal dan nasional (lihat juga Partisipasi Masyarakat standar 1, Catatan Panduan 4 pada halaman 31-32; Partisipasi Masyarakat standar 2 pada halaman 36-39; Koordinasi standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 40-41; Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 47-49, dan Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan Panduan 4 pada halaman 135).
4. **Sumber daya:** Pemerintah nasional, lembaga kemanusiaan, donor, LSM, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama untuk menjamin pendanaan yang memadai untuk penyediaan kebutuhan pendidikan darurat. Koordinasi sumber daya harus dipimpin pemerintah dan terintegrasi dengan mekanisme koordinasi yang ada. Dimana secara kontekstual layak, alokasi sumber daya harus seimbang antara:
  - Elemen fisik, seperti ruang kelas tambahan, buku pelajaran dan bahan-bahan Belajar-mengajar;
  - Komponen kualitatif, seperti guru dan pelatihan pengawasan, pengajaran dan bahan belajar.

Sumber daya harus dialokasikan untuk pelaporan yang sistematis dan terpusat atas serangan terhadap pendidikan serta pengumpulan, analisis dan berbagi data pendidikan (lihat juga Partisipasi Masyarakat Standar 2, Catatan Panduan 1 pada halaman 36-37; Koordinasi Standar 1, Catatan Panduan 1-2 pada halaman 40-42; Analisis standar 1 pada halaman 45-52; Analisis standar 2, Catatan Panduan 2 pada halaman 54; Analisis standar 3, Catatan Panduan 3 pada halaman 61-62; Analisis standar 4, Catatan panduan 3-4 pada halaman 64-65, dan Akses dan pembelajaran lingkungan Standar 2, Catatan Panduan 4 dan 7 pada halaman 81-84).

5. **Transparansi dan akuntabilitas:** informasi yang relevan atas perencanaan kebijakan dan implementasi, termasuk praktik untuk mencegah korupsi (baik dalam bentuk moneter maupun non-moneter), harus dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan kemanusiaan lainnya. Transparansi sangat penting untuk pemantauan yang efektif dan akuntabel. Harus ada sistem yang aman dan sesuai dengan budaya dalam menangani pengaduan korupsi. Ini termasuk kebijakan-kebijakan untuk mendorong orang agar melaporkan korupsi dan melindungi mereka yang berbuat demikian (lihat juga Koordinasi standar 1 Catatan Panduan 5 pada halaman 43; Analisis Standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 47-49, dan Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan Panduan 4 pada halaman 135). Untuk membantu Anda dalam penerapan standar tersebut, silahkan kunjungi *Toolkit* INEE: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit).



**Untuk Alat-alat yang dapat membantu Anda dalam penerapan standar tersebut, kunjungi *Toolkit* INEE: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit)**

*Toolkit* INEE

↳ Standar Minimum INEE

↳ Alat-alat Penerapan

↳ Kebijakan Pendidikan

# Lampiran 1: DAFTAR ISTILAH

**Access / Akses:** kesempatan untuk mendaftar di, menghadiri dan menyelesaikan program pendidikan formal atau non-formal. Ketika akses tidak dibatasi, itu berarti bahwa tidak ada hambatan praktis, keuangan, fisik, terkait keamanan, struktural, institusional atau sosial-budaya yang mencegah peserta didik dari berpartisipasi dalam dan menyelesaikan program pendidikan.

**Accountability / Akuntabilitas:** penjelasan tentang makna dan alasan untuk tindakan dan keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan, keprihatinan dan kapasitas dan situasi pihak yang terkena dampak. Akuntabilitas adalah tentang transparansi pengelolaan proses termasuk penggunaan sumber daya keuangan, tentang hak untuk didengar dan kewajiban untuk menanggapi.

Dalam dunia pendidikan, akuntabilitas berarti percaya penyelenggara pendidikan bertanggung jawab atas kualitas pelayanan mereka dalam hal keterampilan, pengetahuan dan sikap mahasiswa, perilaku guru dan kinerja sekolah atau sistem.

**Assessment / Penilaian:** 1) penyelidikan yang dilakukan sebelum merencanakan kegiatan pendidikan dan intervensi dalam situasi darurat untuk menentukan kebutuhan, kesenjangan dalam respon dan sumber daya yang tersedia; 2) tes dari 'kemajuan dan prestasi peserta didik. 'Sebuah' penilaian hasil belajar adalah bentuk penilaian yang ditentukan oleh program pendidikan. Sejumlah alat penilaian dapat ditemukan dalam *Toolkit* INEE: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit).

Alat penilaian harus selalu disesuaikan untuk mencerminkan informasi yang dibutuhkan dalam konteks atau lingkungan tertentu.

**Capacity / Kapasitas:** kombinasi dari atribut, kekuatan, dan sumber daya individu atau yang tersedia dalam suatu masyarakat, komunitas atau organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang disepakati.

**Capacity building / Pengembangan kapasitas:** penguatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan perilaku untuk membantu orang dan organisasi mencapai tujuan mereka.

**Child-friendly spaces and schools / Sekolah dan ruang yang ramah-anak:** sekolah-sekolah dan tempat yang aman dimana masyarakat membuat lingkungan untuk mengasuh anak-anak untuk mengakses dan bermain bebas terstruktur, rekreasi, waktu luang dan kegiatan belajar. Ruang yang ramah-anak dapat menyediakan

kesehatan, gizi dan dukungan psikososial dan kegiatan lain untuk memulihkan normalitas dan kontinuitas. Mereka dirancang dan dioperasikan secara partisipatoris. Mereka mungkin melayani kelompok anak-anak usia tertentu atau berbagai rentang usia. Ruang ramah-anak dan sekolah penting dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan.

**Child protection / Perlindungan anak:** kebebasan dari segala bentuk pelecehan, eksploitasi, pengabaian dan kekerasan, termasuk *bullying*, eksploitasi seksual, kekerasan dari teman sebaya, guru atau tenaga kependidikan lainnya; bahaya alam; senjata dan amunisi, ranjau darat dan artileri yang tidak meledak, personil bersenjata; lokasi baku tembak; politik dan militer ancaman, dan perekrutan ke dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata.

**Children / Anak-anak:** semua orang yang berusia antara 0 dan 18 tahun. Kategori ini termasuk pemuda (10-19 tahun). Ini tumpang tindih dengan kategori muda (15-24 tahun) (lihat juga definisi untuk 'pemuda' di bawah).

**Children associated with armed forces and armed groups / Anak-anak yang berhubungan dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok**

**bersenjata:** anak mungkin diculik atau direkrut secara paksa, atau mungkin bergabung dengan kekuatan tempur 'sukarela'. Mereka tidak selalu mengangkat senjata. Mereka mungkin bertindak sebagai kuli, mata-mata, tukang masak atau korban kekerasan seksual. Anak-anak ini kehilangan kesempatan untuk mendapat pendidikan.

Selama proses reintegrasi dan demobilisasi, perhatian khusus harus diberikan untuk kebutuhan khusus pendidikan mereka, termasuk pendidikan formal dan non-formal, percepatan belajar, keterampilan hidup dan pelatihan kejuruan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak perempuan, yang seringkali terabaikan dan dihilangkan dari program rehabilitasi.

**Cognitive / Kognitif:** proses mental seperti pikiran, imajinasi, persepsi, memori, pengambilan keputusan, penalaran dan pemecahan masalah.

**Community education committee / Komite pendidikan masyarakat:** Suatu komite, baik yang sudah ada maupun yang baru terbentuk, yang mengidentifikasi dan menangani kebutuhan pendidikan masyarakat. Anggotanya mencakup perwakilan dari orang tua dan wali, guru, pelajar, pemimpin dan organisasi masyarakat, kelompok marjinal, asosiasi masyarakat sipil, kelompok pemuda dan petugas kesehatan.

**Conflict mitigation / Mitigasi konflik:** tindakan dan proses yang 1) sensitif terhadap konflik dan tidak meningkatkan ketegangan atau sumber kekerasan; dan 2)

bertujuan untuk mengatasi penyebab konflik dan mengubah cara bertindak mereka yang terlibat dan merasakan masalah.

Kegiatan kemanusiaan, pemulihan dan pengembangan ditelaah atas efek mereka pada konteks konflik di mana mereka mengambil tempat dan kontribusi mereka terhadap stabilitas dan perdamaian jangka panjang. Pendekatan mitigasi konflik dapat digunakan untuk pencegahan konflik dan intervensi dalam konflik dan situasi-situasi pasca-konflik.

**Disability / Cacat:** fisik, mental, intelektual atau gangguan indera dan hambatan dari sikap dan lingkungan yang mencegah partisipasi penuh dan efektif dari individu-individu dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain.

**Disaggregated data / data terpilah:** informasi statistik yang dipisahkan menjadi beberapa bagian. Sebagai contoh, penilaian data dari populasi atau sampel dapat dianalisis menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah geografis.

**Disaster / Bencana:** gangguan serius terhadap fungsi suatu komunitas atau masyarakat luas yang melibatkan manusia, material, kerugian ekonomi atau lingkungan serta dampaknya; masyarakat yang terkena dampak, dengan kemampuan dan sumber dayanya sendiri tidak mampu mengatasinya.

**Disaster risk reduction / Pengurangan risiko bencana:** konsep dan praktik untuk mengurangi risiko melalui upaya yang sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana, termasuk mengurangi paparan bahaya, mengurangi kerentanan orang dan harta benda, manajemen tanah dan lingkungan yang bijak, dan kesiapsiagaan yang baik untuk peristiwa yang merugikan.

**Discrimination / Diskriminasi:** Memperlakukan orang dengan cara yang berbeda-beda yang mengarah ke penyangkalan akses ke fasilitas, layanan, kesempatan, hak atau partisipasi atas dasar jenis kelamin, agama, orientasi seksual, usia, etnis, status HIV atau faktor lainnya.

**Distress / Distress:** situasi sedang marah, cemas dan labil. Hal ini dapat terjadi sebagai tanggapan terhadap kondisi hidup yang sulit seperti kemiskinan dan kepadatan penduduk atau terkena ancaman terhadap keamanan atau kesejahteraan.

**Do No Harm:** suatu pendekatan yang membantu untuk mengidentifikasi dampak negatif atau positif yang tidak disengaja dan pengembangan intervensi kemanusiaan dalam pengaturan di mana ada konflik atau risiko konflik. Pendekatan ini dapat diterapkan pada saat perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa intervensi tidak memperburuk konflik melainkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan intervensinya. Dianggap sebagai dasar penting untuk pekerjaan organisasi yang beroperasi dalam situasi konflik.

**Early childhood development / Pendidikan Anak Usia Dini:** proses dimana anak-anak, usia 0-8 tahun, mengembangkan kesehatan fisik, kewaspadaan mental, kepercayaan diri emosional, kompetensi sosial dan kesiapsiagaan untuk belajar mereka secara optimal. Proses ini didukung oleh kebijakan sosial dan keuangan dan program yang komprehensif yang mengintegrasikan kesehatan, gizi, air, sanitasi, kebersihan, pendidikan dan layanan perlindungan anak. Semua anak-anak dan keluarga mendapat manfaat dari program-program berkualitas tinggi, namun kelompok yang kurang beruntunglah yang akan mendapat manfaat paling banyak.

**Education authorities / Otoritas pendidikan:** pemerintah dengan kementerian, departemen, lembaga dan instansi terkait yang bertanggung jawab untuk menjamin hak atas pendidikan.

Mereka menjalankan otoritas penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional, kabupaten dan tingkat lokal. Dalam konteks di mana kewenangan pemerintah terganggu, pelaku non-pemerintah, seperti LSM dan badan-badan PBB, kadang-kadang dapat memikul tanggung jawab ini.

**Education Cluster / Klaster Pendidikan:** sebuah mekanisme koordinasi antar-lembaga untuk lembaga dan organisasi dengan keahlian dan mandat untuk respon kemanusiaan dalam sektor pendidikan dan dalam situasi pengungsian internal. Didirikan pada tahun 2007 melalui IASC (lihat entri terpisah), Klaster Pendidikan dipimpin oleh UNICEF dan Save the Children di tingkat global. Pada tingkat nasional / negara, lembaga-lembaga lain dapat berperan sebagai pemimpin dan melibatkan pelayanan nasional pendidikan secara aktif. Dalam konteks pengungsian, UNHCR merupakan lembaga utama. Klaster Pendidikan bertanggung jawab untuk memperkuat kesiapsiagaan kapasitas teknis untuk merespon situasi darurat kemanusiaan. Selama dalam tahap respons kemanusiaan, kepemimpinan dan akuntabilitas harus terjamin di sektor pendidikan.

**Education in emergency / Pendidikan dalam situasi darurat:** kesempatan belajar yang berkualitas bagi semua umur dalam situasi krisis, termasuk pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, lanjutan, non-formal, teknis, kejuruan, tingkat pendidikan orang dewasa dan yang lebih tinggi. Pendidikan dalam situasi darurat menyediakan perlindungan fisik, psikososial dan kognitif yang dapat mempertahankan dan menyelamatkan nyawa.

**Education Response / Respon Pendidikan:** penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan hak atas pendidikan dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan.

**Emergency / Darurat:** sebuah situasi di mana masyarakat terganggu dan belum kembali ke stabilitas.

**Formal education / Pendidikan Formal:** kesempatan belajar yang diberikan dalam sistem sekolah, perguruan tinggi, universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Umumnya melibatkan pendidikan penuh-waktu untuk anak-anak dan pemuda, dimulai di antara usia lima dan tujuh tahun dan berlanjut hingga 20 atau 25 tahun. Hal ini biasanya dikembangkan oleh departemen-departemen nasional pendidikan, namun dalam situasi darurat mungkin didukung oleh para pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

**Gender:** peran, tanggung jawab dan identitas perempuan dan laki-laki dan bagaimana dinilai dalam masyarakat. Secara khusus untuk budaya yang berbeda dan berubah dari waktu ke waktu. Identitas gender menentukan bagaimana masyarakat mengharapkan perempuan dan laki-laki untuk berpikir dan bertindak. Perilaku ini dipelajari dalam keluarga dan di sekolah-sekolah dan melalui pengajaran agama, juga media. Peran, tanggung jawab dan identitas gender dapat berubah karena secara sosial mereka selalu dipelajari.

**Gender balance / Keseimbangan gender:** jumlah yang kurang lebih sama antara laki-laki dan perempuan dan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini dapat merujuk pada partisipasi dan masukan ke dalam kegiatan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa baik kepentingan laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi. Juga dapat merujuk pada jumlah laki-laki dan perempuan yang dipekerjakan oleh otoritas pendidikan dan oleh badan-badan internasional dan nasional. Hal ini penting terutama dalam perekrutan tenaga kerja guru. Keseimbangan antara laki-laki dan perempuan di semua tingkat menciptakan lebih banyak kemungkinan untuk membahas dan menyikapi dampak yang berbeda dari kebijakan dan program terhadap laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan.

**Gender-based violence / Kekerasan berbasis gender:** setiap tindakan berbahaya berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dalam banyak hal, perempuan lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender karena status mereka yang lebih rendah dalam masyarakat. Laki-laki dan anak laki-laki juga dapat menjadi korban, terutama dalam kekerasan seksual. Sifat dan tingkat kekerasan berbasis gender bervariasi di seluruh budaya, negara dan wilayah. Contoh-contohnya termasuk:

- ◆ kekerasan seksual seperti eksploitasi dan pelecehan seksual, pelacuran paksa, dan perkawinan paksa dan anak-anak;
- ◆ kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan fisik, emosional dan psikologis;
- ◆ praktik-praktik budaya atau tradisional yang berbahaya seperti mutilasi alat kelamin perempuan,
- ◆ pembunuhan sebagai sebuah kehormatan terhadap janda, biasanya oleh laki-laki dari keluarga suami yang mati.

**Hazard / Bahaya:** sebuah peristiwa yang berpotensi merusak secara fisik, fenomena atau aktivitas manusia yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau luka, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi atau kerusakan lingkungan. Bahaya dapat muncul secara alami atau karena ulah manusia atau kombinasi dari semuanya. Risiko yang ditimbulkan oleh bahaya tergantung pada seberapa besar kemungkinan terjadinya, dimana, seberapa sering dan bagaimana intensitasnya. Sebagai contoh, sebuah gempa kecil di daerah gurun yang terjadi sekali dalam 100 tahun menimbulkan risiko yang sangat rendah untuk orang-orang. Sebuah banjir perkotaan yang terjadi dengan ketinggian hingga 3 meter dalam waktu 48 jam, meskipun munculnya sekali setiap 5 -10 tahun, memiliki probabilitas relatif tinggi dan membutuhkan langkah-langkah mitigasi.

**HIV prevention, treatment, care and support / Pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan terhadap HIV:** kombinasi intervensi hukum, struktural, perilaku, dan biomedis yang diperlukan untuk mengurangi jumlah infeksi HIV baru dan dampak HIV dan AIDS pada mereka yang terinfeksi dan terpengaruh. Pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan terhadap HIV harus didasarkan pada pemahaman epidemi, siapa saja yang paling berisiko terkena infeksi dan perilaku yang mengarah ke infeksi baru. Umumnya perilaku yang berisiko adalah hubungan seks laki-laki dengan laki-laki; penggunaan narkoba melalui suntikan, seks demi uang atau materi lainnya, kumpul kebo, dan perbedaan usia dalam hubungan. Situasi sosial ekonomi juga berdampak pada pencegahan, perawatan pengobatan dan dukungan terhadap HIV.

**Human rights / Hak asasi manusia (HAM):** suatu cara bagi kehidupan yang bermartabat. Hak asasi manusia bersifat universal dan mutlak: mereka tidak dapat diberikan, atau diambil. Dalam konteks situasi darurat, hak asasi manusia yang penting, seperti non-diskriminasi, perlindungan dan hak untuk hidup, mendapat prioritas utama, sedangkan realisasi progresif hak-hak lainnya dapat bergantung pada sumber daya yang tersedia. Dikarenakan pendidikan adalah instrumental untuk perlindungan, non-diskriminasi dan kelangsungan hidup, maka pendidikan harus dilihat sebagai salah satu hak asasi manusia yang penting. Hukum HAM internasional adalah badan dari perjanjian hukum internasional dan standar-standar normatif yang mengatur kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak manusia di setiap waktu, termasuk selama situasi darurat. Selama konflik, hukum humaniter dan pidana internasional juga tetap berlaku. Perjanjian dan standar ini mengatur permusuhan, melindungi warga sipil dan tempat bertugas pelakunya yang mungkin menantang, menggantikan atau bertindak atas nama negara.

Hukum Pengungsi menetapkan kewajiban pemerintah terhadap orang-orang terlantar yang melintasi batas internasional karena takut akan penganiayaan atau konflik bersenjata.

***Inclusive education / Pendidikan Inklusi:*** menjamin keberadaan, partisipasi dan prestasi dari semua individu dalam kesempatan belajar. Untuk memastikan bahwa kebijakan, praktik dan fasilitas pendidikan dapat menanggapi keragaman individu dalam konteks.

Pengecualian dari pendidikan dapat muncul akibat dari diskriminasi, kurangnya dukungan untuk menghilangkan hambatan atau penggunaan bahasa, isi atau metode pengajaran yang tidak menguntungkan semua pelajar. Orang dengan kebutuhan khusus fisik, sensorik, mental dan intelektual sering masuk dalam kelompok yang paling dikecualikan dari pendidikan. Situasi darurat berdampak pada pengecualian. Beberapa orang yang sebelumnya mampu mengakses pendidikan mungkin dikecualikan karena faktor sosial, budaya, fisik atau infrastruktur. Pendidikan Inklusi memastikan bahwa hambatan partisipasi dan belajar dihilangkan dan bahwa metodologi pengajaran dan kurikulum dapat diakses dan sesuai bagi siswa berkebutuhan khusus. Semua individu disambut dan didukung untuk membuat kemajuan, dan prasyarat masing-masing ditangani.

***Information management / Manajemen Informasi:*** meliputi penilaian kebutuhan, kapasitas dan cakupan serta pemantauan dan evaluasi terkait, penyimpanan data, analisis data, dan sistem untuk berbagi informasi. Alat dan sistem manajemen informasi membantu pemangku kepentingan untuk menentukan pengumpulan fakta dan data, memproses dan berbaginya, dengan siapa, kapan, untuk tujuan apa, dan bagaimana.

***Instruction and learning processes / Instruksi proses belajar:*** interaksi antara peserta didik dan guru. Instruksi direncanakan sesuai dengan kurikulum, berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi melalui pengkajian, dan dimungkinkan melalui pelatihan guru. Instruksi proses belajar yang inklusi, partisipatoris, dan berpusat pada pelajar melibatkan masyarakat luas dalam menyediakan dan mendukung pendidikan.

***Inter-Agency Standing Committee (IASC):*** suatu forum antar-lembaga untuk koordinasi, pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam bantuan kemanusiaan. IASC didirikan pada bulan Juni 1992 sebagai respon terhadap Resolusi Majelis Umum PBB pada penguatan bantuan kemanusiaan. IASC melibatkan mitra-mitra kemanusiaan utama PBB dan non-PBB.

***Internally displaced person (IDP)/ Penyintas (IDP):*** orang yang terpaksa meninggalkan rumah atau daerahnya demi menemukan tempat yang aman didalam negaranya, daripada melintasi perbatasan internasional. Penyintas sering lari untuk alasan yang sama dengan pengungsi, seperti konflik bersenjata, bencana, kekerasan umum atau pelanggaran hak asasi manusia. Namun, secara hukum mereka tetap di bawah perlindungan pemerintah mereka sendiri, meskipun pemerintah mereka yang mungkin menjadi penyebabnya. Sebagai warga negara, mereka tetap mempunyai hak-hak mereka, termasuk untuk perlindungan, di bawah hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

***Learners / Pelajar:*** Orang, termasuk anak-anak, pemuda dan dewasa, yang berpartisipasi dalam program pendidikan. Termasuk siswa di sekolah formal, peserta pelatihan dan pendidikan kejuruan teknis dan peserta program pelatihan dan pendidikan non formal, seperti kelas berhitung dan membaca, kursus keterampilan hidup di masyarakat serta kelompok belajar, *peer-to-peer*.

***Learning outcomes / Hasil pembelajaran:*** pengetahuan, sikap, keterampilan dan kemampuan yang dicapai siswa sebagai akibat dari mengambil bagian dalam program kursus atau pendidikan. Hasil pembelajaran biasanya digambarkan sebagai apa yang siswa harus tahu dan mampu melakukan sebagai hasil dari instruksi dan proses belajar.

***Learning sites / Lokasi belajar:*** lokasi ruang belajar.

***Learning spaces / Ruang belajar:*** tempat di mana belajar-mengajar terjadi. Contohnya termasuk rumah-rumah pribadi, pusat perawatan anak, pra-sekolah, bangunan sementara dan sekolah.

***Life skills / Keterampilan hidup:*** keterampilan dan kemampuan untuk berperilaku secara positif yang memungkinkan individu untuk beradaptasi dan menangani tuntutan serta tantangan hidup sehari-hari secara efektif. Membantu agar orang berpikir, merasa, bertindak dan berinteraksi sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang berpartisipasi. Ada tiga kategori keterampilan hidup: kognitif, kepribadian atau emosional, dan sosial atau antar-pribadi. Keterampilan hidup secara umum misalnya, menganalisis dan menggunakan informasi, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Tetapi keterampilan hidup bisa juga tentang bidang tertentu seperti pengurangan risiko, perlindungan lingkungan, promosi kesehatan, pencegahan HIV, pencegahan kekerasan atau menjaga perdamaian. Dalam situasi krisis, kebutuhan atas keterampilan hidup sering meningkat, yang memerlukan peningkatan penekanan pada membangun kecakapan hidup yang relevan dan dapat diterapkan dalam konteks lokal dan darurat.

**Livelihood / Mata Pencapaian:** kemampuan, aset, peluang dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai sarana untuk hidup. Aset meliputi keuangan, alam, fisik, sosial dan sumber daya manusia.

Contohnya termasuk toko-toko, tanah dan akses ke pasar atau sistem transportasi. Sebuah mata pencapaian dapat berlanjut jika bisa mengatasi dan pulih dari stress dan guncangan, menjaga atau meningkatkan kemampuan dan aset dan memberikan kesempatan mata pencapaian yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya.

**Non-formal education / Pendidikan non formal:** kegiatan pendidikan yang tidak sesuai dengan definisi pendidikan formal (lihat entri terpisah di atas). Pendidikan non-formal terjadi baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan dan melayani orang dari segala usia dan tidak selalu mengarah pada sertifikasi. Program pendidikan non-formal ditandai oleh berbagai fleksibilitas dan kemampuan mereka dalam merespon dengan cepat kebutuhan baru pendidikan anak-anak atau orang dewasa. Sering dirancang untuk kelompok pelajar tertentu seperti mereka yang terlalu tua untuk tingkat kelas mereka, mereka yang tidak bersekolah formal, atau orang dewasa.

Kurikulum mungkin didasarkan pada pendidikan formal atau pendekatan baru. Contohnya, pembelajaran yang dipercepat, program setelah-sekolah, membaca dan menghitung. Pendidikan Non-formal memungkinkan suatu keterlambatan dalam proses belajar-mengajar, untuk dapat masuk dalam program pendidikan formal. Kesempatan ini sering disebut sebagai 'pendidikan kesempatan-kedua'.

**Participation / Partisipasi:** terlibat dalam dan memengaruhi proses, keputusan dan kegiatan. Partisipasi adalah hak untuk semua dan merupakan dasar untuk bekerja dengan masyarakat dan program pengembangan. Partisipasi bervariasi menurut kapasitas yang berkembang. Semua kelompok, termasuk orang dewasa, anak-anak, pemuda, orang berkebutuhan khusus dan anggota kelompok rentan dapat berpartisipasi dengan cara yang berbeda sejak awal. Tidak boleh ada sekelompok orang yang harus ditolak kesempatannya untuk partisipasi hanya karena mereka sulit dijangkau. Partisipasi adalah sukarela. Orang-orang diundang dan didorong untuk berpartisipasi, tidak dipaksa atau dimanipulasi. Partisipasi dapat mencakup berbagai kegiatan dan pendekatan. Peran pasif termasuk menggunakan jasa, memberikan kontribusi sumber daya material, menerima keputusan yang dibuat oleh orang lain dan konsultasi dengan cara yang minimal. Contoh partisipasi aktif termasuk menyumbangkan waktu, terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pendidikan.

**Participatory learning / Pembelajaran partisipatif:** pendekatan untuk belajar-mengajar yang berfokus pada pelajar. Hal ini mendorong belajar dengan melakukan

hal-hal secara nyata, berkelompok-kelompok kecil, menggunakan bahan nyata, pertanyaan terbuka dan pengajaran secara peer. Sebagai contoh, pelajar menggunakan kegiatan praktis untuk memahami konsep-konsep matematika atau bekerja sama untuk memecahkan masalah dengan bertanya dan menjawab pertanyaan. Pembelajaran partisipatif kontras dengan metodologi berfokus guru, yang dicirikan oleh peserta didik pasif duduk di meja, menjawab pertanyaan tertutup dan menyalin dari papan tulis. Pembelajaran partisipatif juga dapat memanfaatkan guru dan otoritas pendidikan untuk mendukung mereka dalam menganalisis kebutuhan mereka, mengidentifikasi solusi dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi. Dalam konteks ini, mungkin termasuk partisipasi, koordinasi dan analisis masyarakat.

**Preparedness / Kesiapsiagaan:** pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, organisasi respon dan pemulihan profesional, masyarakat dan individu untuk secara efektif mengantisipasi, merespon dan memulihkan diri dari kemungkinan dampak bahaya.

**Prevention / Pencegahan:** tindakan yang diambil untuk menghindari dampak buruk dari bahaya dan bencana yang terkait (lihat entri terpisah untuk istilah-istilah ini).

**Protection / Perlindungan:** kebebasan dari segala bentuk pelecehan, eksploitasi kekerasan dan penelantaran.

**Psychosocial support / Dukungan psikososial:** proses dan tindakan yang mempromosikan kesejahteraan orang secara menyeluruh di dunia sosial mereka. Ini termasuk dukungan yang diberikan oleh keluarga dan teman-teman. Contoh dari dukungan keluarga dan masyarakat mencakup upaya untuk menyatukan kembali anak yang terpisah dan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam situasi darurat.

**Quality education / Pendidikan berkualitas:** pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dapat diakses, peka gender dan merespon keragaman. Ini mencakup 1) lingkungan yang aman dan ramah-pelajar; 2) guru yang kompeten dan terlatih yang memiliki pengetahuan dalam materi pelajaran dan pedagogi, 3) kurikulum yang sesuai secara spesifik sesuai dengan konteks yang relevan secara budaya, bahasa dan sosial dan dipahami peserta didik, 4) bahan ajar yang memadai untuk belajar-mengajar; 5) instruksi bermetode partisipatif dan proses pembelajaran yang menghormati martabat pelajar; 6) ukuran kelas dan rasio guru-murid yang tepat, dan 7) penekanan pada rekreasi, bermain, olahraga dan kegiatan kreatif di samping bidang seperti membaca, berhitung dan keterampilan hidup.

**Recovery / Pemulihan:** restorasi dan perbaikan fasilitas, mata pencaharian, kondisi hidup atau kesejahteraan psikososial masyarakat yang terkena dampak, termasuk upaya untuk mengurangi faktor risiko bencana.

**Refugee / Pengungsi:** sesuai dengan Konvensi Pengungsi tahun 1951, pengungsi adalah seseorang yang karena ketakutan dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negaranya, dan tidak dapat, atau karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan dirinya dari perlindungan negaranya.

**Relevant education / Pendidikan relevan:** kesempatan belajar yang sesuai untuk pelajar. Pendidikan yang relevan memperhitungkan tradisi dan institusi lokal, praktik-praktik budaya yang positif, sistem kepercayaan dan kebutuhan masyarakat. Ini mempersiapkan anak-anak untuk masa depan yang positif dalam masyarakat, dalam konteks nasional dan internasional. Pendidikan yang relevan adalah elemen kualitas pendidikan dan mengacu pada apa yang dipelajari, bagaimana dipelajari dan bagaimana belajar yang efektif.

**Resilience / Ketahanan:** kapasitas komunitas, sistem atau individu yang berpotensi terkena bahaya untuk beradaptasi. Adaptasi ini berarti menolak atau mengubah untuk mencapai dan mempertahankan tingkat dari fungsi dan struktur yang dapat diterima. Ketahanan tergantung pada mekanisme penanggulangan dan kecakapan hidup seperti pemecahan masalah, kemampuan untuk mencari dukungan, motivasi, optimisme, iman, ketekunan dan akal. Ketahanan terjadi ketika faktor pelindung yang mendukung kesejahteraan lebih kuat daripada faktor risiko yang menyebabkan bahaya.

**Risk / Risiko:** produk dari ancaman eksternal seperti bencana alam, prevalensi HIV, kekerasan berbasis gender, serangan bersenjata dan penculikan, dikombinasikan dengan kerentanan individu seperti kemiskinan, berkebutuhan khusus fisik atau mental atau keanggotaan dalam kelompok yang rentan.

**Risk assessment / Penilaian risiko:** metodologi untuk menentukan sifat dan tingkat risiko dengan menganalisa potensi bahaya dengan mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada yang dapat menimbulkan potensi ancaman atau kerusakan pada manusia, properti, mata pencaharian dan lingkungan di mana mereka bergantung.

**Safety / Keselamatan:** situasi bebas dari bahaya fisik atau psikososial.

**Security / Keamanan:** perlindungan dari ancaman, bahaya cedera atau kerugian.

**Stakeholder / Pemangku kepentingan:** seseorang, kelompok atau lembaga dengan kepentingan dalam suatu proyek atau program.

**Vulnerability / Kerentanan:** karakteristik dan situasi individu atau kelompok yang mengakibatkan mereka menjadi rentan terhadap serangan, bahaya atau kesulitan.

Contoh kelompok-kelompok rentan termasuk anak-anak tanpa pendamping, orang berkebutuhan khusus, kepala rumah tangga tunggal dan anak-anak yang sebelumnya terkait dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata.

**Well-being / Kesejahteraan:** kondisi kesehatan menyeluruh dan proses mencapai kondisi ini. Hal ini mengacu pada kesehatan fisik, emosional, sosial dan kognitif. Kesejahteraan mencakup apa yang baik bagi seseorang: berpartisipasi dalam peran sosial; perasaan bahagia dan penuh harapan, hidup menurut nilai-nilai yang baik, sebagaimana didefinisikan secara lokal; memiliki hubungan sosial yang positif dan lingkungan yang mendukung; menghadapi tantangan melalui penggunaan keterampilan hidup secara positif; memiliki keamanan, perlindungan dan akses terhadap pelayanan yang berkualitas (lihat juga entri untuk 'kognitif').

**Youth and adolescents / Pemuda dan remaja:** pemuda adalah orang dengan usia antara 15 dan 24 tahun dan remaja adalah orang-orang dengan usia antara 10 dan 19. Bersama mereka membentuk kategori terbesar orang-orang muda, mereka yang berusia antara 10 dan 24 tahun. Akhir dari masa pemuda dan awal kedewasaan bervariasi. Dalam suatu negara atau budaya, bisa ada perbedaan penentuan umur di mana seorang individu dianggap cukup dewasa untuk dipercaya oleh masyarakat dengan tugas-tugas tertentu. Dalam situasi darurat, pemuda memiliki kebutuhan yang berbeda dari anak-anak muda dan orang dewasa. Pemuda mengacu pada periode kemajuan terhadap tanggung jawab secara independen. Definisi bervariasi dari satu konteks ke yang lain tergantung pada factor-faktor budaya, kelembagaan, ekonomi, politik, dan sosial.

Anda dapat menemukan daftar yang lebih luas mengenai istilah kunci dalam *Toolkit* INEE: [www.ineesite.org/toolkit](http://www.ineesite.org/toolkit).

## Lampiran 2: SINGKATAN

AIDS	: Acquired Immune Deficiency Syndrome
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
IASC	: Inter-Agency Standing Committee
IDP	: Internally displaced person
ILO	: International Labour Organization
INEE	: Inter-Agency Network for Education in Emergencies
MFA	: Ministry of Foreign Affairs
NGO	: Non-government organisation
NORAD	: Norwegian Agency for Development
SEEP	: Small Enterprise Education and Promotion
UN	: United Nations
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
UNHCR	: United Nations High Commission for Refugees
UNICEF	: United Nations Children's Fund

# Lampiran 3: INDEKS

## A

akses 2, 3, 4, 6, 9, 12, 29, 31, 33, 34, 36, 45, 51, 55

akses dan keamanan 37

aksi kunci 4, 10, 12, 14

Aksi Kunci 28, 36, 40, 45, 53, 59, 63, 71, 78, 86, 97, 104, 108, 111, 119, 122, 125, 132, 138

akuntabilitas 4, 8, 17, 20, 25, 37, 40, 43, 50, 59, 125, 140, 141

anak 1, 6, 10, 17, 22, 29, 30, 34, 36, 42, 51, 56, 70, 72, 74, 81

anak-anak dan pemuda 1, 3, 25, 28, 30, 32, 33, 37, 60, 74, 79, 81, 145

analisis 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, 28, 30, 34, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 64, 76, 80, 87, 95, 132, 134, 135, 139, 140, 147, 150

analisis konflik 47, 48

analisis konteks 10, 11, 28, 45, 47, 53, 132, 135

audit sosial 34

## B

bahan ajar 98, 107, 108, 112, 125, 137, 150

bahaya 1, 3, 26, 29, 47, 48, 54, 69, 78, 80, 82, 88, 91, 95, 104, 107, 133, 135, 142, 143, 146, 150, 151

belajar aktif 152

belajar-mengajar 31, 36, 49, 57, 60, 62, 69, 75, 76, 84, 88, 91, 95, 97, 98, 103, 105, 107, 108, 120, 121, 125, 126, 127, 133, 134, 136, 137, 139, 148, 149, 150

bencana 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 46, 48, 49, 56, 57, 59, 60, 71, 73, 76, 78, 85, 86, 87, 95, 97, 100, 104, 105, 107, 133, 135, 136, 139, 143, 148, 150

berbagi informasi dan sistem informasi 136

berhitung 3, 97, 98, 100, 105, 110, 148, 150

berkebutuhan khusus 3, 11, 28, 37, 38, 48, 56, 61, 71, 72, 85, 86, 88, 103, 108, 112,  
117, 119, 120, 121, 131, 147, 149, 151, 152

bermain 74, 84, 108, 134, 141, 150

## C

catatan panduan 4, 10, 12, 15, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49,  
50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85,  
86, 87, 88, 91, 97, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 119, 120,  
122, 123, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140

## D

darurat 1, 2, 4, 6, 8, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 33, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 56,  
59, 61, 65, 69, 71, 76, 85, 95, 101, 106, 110, 117, 131, 135, 137, 142, 144, 146,  
152

data dasar 57, 58

data kualitatif 64

data kuantitatif 64

data terpilih 45, 46, 51, 60, 75, 143

definisi 22, 75, 76, 81, 122, 142, 149, 152

desain dan konstruksi 87, 88

desain dan pemeliharaan ruang belajar 89

deskripsi pekerjaan 119

diskriminasi 2, 32, 55, 59, 70, 71, 72, 73, 84, 87, 97, 105, 124, 131, 143, 147

domain 6, 9, 10, 15, 17

dukungan dan pengawasan 125

## E

evaluasi 5, 16, 21, 25, 27, 28, 33, 34, 42, 44, 45, 54, 58, 63, 64, 65, 95, 99, 111, 112, 126,  
143, 147

## F

fasilitas 2, 18, 38, 51, 69, 76, 77, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 106, 109, 132, 133, 137, 143, 147  
fleksibilitas 54, 74, 149

## G

gender 10, 15, 19, 26, 28, 29, 47, 51, 54, 60, 70, 81, 82, 91, 97, 103, 105, 117, 119, 120,  
131, 145, 150  
guru dan tenaga kependidikan 13, 17, 32, 33, 41, 42, 59, 60, 64, 69, 78, 80, 81, 83, 84,  
85, 86, 87, 89, 91, 95, 101, 103, 104, 105, 106, 112, 117, 119, 120, 121, 122, 123,  
124, 125, 126, 132  
Guru dan tenaga kependidikan 118

## H

hak asasi manusia 1, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 22, 32, 43, 60, 73, 80, 83, 95, 100, 103, 105, 120,  
124, 132, 133, 135, 137, 146, 148  
hak atas pendidikan 6, 8, 22, 32, 40, 46, 72, 73, 144  
hasil belajar 9, 95, 111, 141  
hubungan antar-sektoral 10, 20  
hubungan strategis 4, 19  
hukum dan kebijakan 131, 132, 133

## I

instruksi dan proses belajar 108, 148  
instrumen hukum internasional 7, 131  
Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) 4  
Inter-Agency Standing Committee (IASC) 4, 147

## K

kapasitas 11, 12, 16, 21, 25, 26, 28, 33, 40, 48, 54, 61, 74, 97, 106, 126, 141  
kapasitas lokal 38, 45, 55

keamanan 9, 19, 26, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 45, 47, 48, 49, 55, 57, 59, 60, 74, 75, 76, 78,  
79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 135, 139, 141, 143, 151, 152

keamanan dan keselamatan 45, 78

keamanan dari serangan 31

keamanan sekolah 85, 135

keanekaragaman 102, 103, 119

kebijakan pendidikan 6, 10, 15, 25, 32, 33, 37, 39, 41, 42, 49, 50, 56, 61, 64, 65, 73, 74,  
75, 77, 81, 82, 88, 99, 101, 131, 132, 134, 138, 139, 140

kebutuhan pendidikan dan psikososial 51

kebutuhan psikososial 51, 97, 101, 120

kekerasan berbasis gender 29, 60, 81, 82, 105, 145, 151

kelangsungan pendidikan 31, 40, 69, 132, 133

kemampuan baca tulis 3, 8

kerentanan 11, 12, 26, 46, 48, 75, 135, 143, 151

kesehatan dan gizi 90, 91

keseimbangan gender 117, 120, 145

kesejahteraan 9, 33, 36, 60, 69, 74, 78, 79, 84, 86, 91, 97, 102, 127, 143, 150, 151, 152

kesetaraan akses 71

kesiapsiagaan 4, 5, 12, 13, 16, 20, 21, 38, 43, 46, 48, 49, 56, 57, 76, 85, 107, 131, 134,  
135, 136, 143, 144, 150

kesiapsiagaan bencana 4, 16, 135, 136

kesiapsiagaan tanggap darurat 56

ketahanan 3, 11, 25, 32, 48, 91, 117, 139, 151

keterampilan hidup 57, 74, 84, 97, 98, 100, 103, 105, 142, 148, 150, 152

keterlibatan masyarakat 131

klaster pendidikan 12, 13, 20, 21, 26, 41, 43, 52, 144

kode etik 81, 83, 84, 112, 122, 123, 124

kolaborasi 4

komite koordinasi antar-lembaga 40, 45, 106

komite pendidikan masyarakat 29, 30, 31, 83, 89, 142

kompensasi guru 15, 32, 41, 42, 121, 123

kompetensi dasar 100, 110

kondisi kerja 117, 122, 123

konten pembelajaran 95, 98

kontrak 117, 122

koordinasi 2, 4, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 26, 32, 35, 40, 41, 43, 45, 52, 57, 61, 65, 76, 82,  
87, 91, 99, 106, 109, 123, 136, 139, 140, 144, 147, 150

korupsi 47, 135, 140

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 72

kriteria pemilihan 120

kurikulum 2, 3, 9, 30, 31, 34, 83, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 107, 108, 110, 112, 132,  
147, 149, 150

## **L**

layanan 4, 11, 22, 25, 32, 46, 50, 51, 56, 57, 71, 79, 80, 86, 87, 90, 91, 102, 105, 106,  
112, 122, 134, 143, 144

lingkungan belajar 101, 104, 105, 107, 109, 112, 117, 122, 124, 125, 127, 133, 135,  
137, 138, 139

lokasi 29, 45, 51, 56, 71, 75, 78, 80, 82, 87, 90, 111, 135, 142, 148

lokasi belajar 75, 78, 90, 148

## **M**

manajemen informasi 42, 147

manajemen kelas 84, 105

marabahaya 91

mata pencaharian 33, 56, 95, 100, 149, 150, 151

materi belajar-mengajar 107

memperbarui strategi respon 55

menggunakan 6, 8, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 36, 43, 55, 64, 77, 79, 82, 88, 89, 90, 91, 101,  
102, 104, 107, 108, 112, 132, 148, 149, 150

mitigasi konflik 10, 12, 28, 36, 38, 59, 88, 142, 143

mobilisasi sumber daya 25, 32, 37, 38, 40, 41

## **N**

non-diskriminasi 8, 47, 124, 131, 136, 146

## O

orang dengan berkebutuhan khusus 72, 85, 88

organisasi non-pemerintah 7, 60, 132

otoritas pendidikan 8, 12, 26, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 71, 75, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 112, 122, 123, 126, 131, 135, 136, 138, 144, 145, 150

## P

partisipasi 3, 8, 9, 17, 22, 25, 28, 32, 33, 34, 38, 49, 50, 72, 76, 82, 85, 117, 126, 127, 134, 136, 140, 143, 145, 147, 149

partisipasi masyarakat 17, 22, 25, 28, 32, 46, 54, 82, 85, 126, 133, 140

pelajar 1, 2, 3, 26, 36, 37, 47, 48, 61, 62, 64, 69, 71, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 90, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 112, 113, 119, 127, 132, 142, 147, 148, 149, 150

pelaku non-pemerintah dan PBB 137

pelanggaran 34, 51, 60, 80, 83, 148

pelatihan dan pengembangan profesional 126

pelatihan kejuruan 57, 100, 134, 142

peluang 2, 33, 71, 74, 104, 111, 126, 134, 149

pemangku kepentingan 3, 5, 8, 13, 16, 26, 28, 29, 32, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 50, 53, 54, 60, 63, 64, 76, 77, 97, 102, 106, 109, 121, 122, 123, 131, 133, 134, 136, 140, 145, 147, 151

pemantauan 21, 25, 28, 31, 32, 33, 37, 43, 44, 45, 49, 59, 60, 62, 63, 84, 102, 104, 112, 125, 133, 140, 147

pembangunan 2, 4, 5, 6, 16, 26, 32, 33, 36, 42, 51, 55, 56, 57, 62, 74, 76, 83, 86, 90, 101, 123, 131, 136, 138

pembangunan jangka panjang 131, 138

pembelajaran aktif 108

pembelajaran jarak jauh 75, 79

pembelajaran partisipatif 149, 150

pemuda 79, 86, 89, 99, 117, 120, 121, 133, 134, 136, 138, 142, 145

pemulihan 1, 3, 4, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 34, 41, 42, 49, 55, 56, 57, 59, 61, 69, 76, 95, 98, 99, 101, 103, 107, 117, 118, 123, 131, 132, 139, 142, 143, 144, 150

penampungan sementara 51, 76, 77, 79  
pencegahan 3, 26, 48, 50, 57, 85, 90, 97, 104, 105, 107, 133, 143, 146, 148, 150  
pendaftaran 17, 56, 64, 71, 73, 89  
pendanaan 22, 41, 42, 56, 139  
pendidikan anak usia dini 1, 6, 10, 36, 37, 41, 56, 57, 74, 102, 117, 133, 134, 138, 144  
pendidikan berkualitas 3, 8, 13, 16, 20, 36, 41, 69, 131, 150  
pendidikan dalam situasi darurat 1, 3, 6, 8, 16, 20, 59, 69, 72, 76, 117, 118, 144, 150  
pendidikan formal 31, 71, 74, 97, 98, 99, 103, 109, 112, 117, 138, 141, 142, 145, 149  
pendidikan inklusi 3, 10, 15, 53, 54, 56, 105, 138, 147  
pendidikan non formal 148, 149  
pendidikan yang relevan 41, 71, 75, 99, 103, 104, 126, 151  
pengakuan dan akreditasi 107  
pengakuan kontribusi 38  
pengalaman dan kualifikasi 119  
pengantar 15  
pengembangan profesional 9, 95, 104, 126  
pengungsi 3, 6, 7, 22, 56, 71, 97, 99, 102, 103, 106, 107, 112, 121, 123, 132, 136, 137, 147, 148, 151  
pengungsi internal 3, 137  
pengurangan risiko bencana 3, 10, 12, 28, 29, 31, 36, 38, 56, 57, 59, 78, 85, 97, 100, 104, 105, 143  
Penilaian 152  
penilaian kinerja 125, 126  
penilaian risiko 151  
peningkatan kapasitas 16, 25, 26, 29, 35, 53, 54, 64, 126  
peran dan tanggung jawab 30, 38, 41, 117, 119  
perencanaan dan pelaksanaan 10, 21, 25, 33, 34, 131, 134, 135, 138  
perlindungan 1, 2, 7, 8, 10, 36, 37, 42, 60, 69, 73, 76  
Perlindungan anak 100  
perlindungan dan kesejahteraan 78  
Pertimbangan etis 47  
peserta 56, 57, 62  
peserta didik 3, 4, 28, 30, 47, 56, 57, 62, 64, 69, 72, 75  
peserta didik dewasa 56, 57  
prioritas pendidikan 75

promosi kebersihan 19, 32, 90, 139  
proses belajar 95, 108, 109, 147, 148  
Proyek Sphere 7, 19, 20

## R

referensi 15, 42, 121  
rekrutmen dan seleksi 10, 117  
rekrutmen dan seleksi guru 117  
rencana aksi pendidikan lokal 31  
rencana pendidikan lokal dan nasional 138, 139  
respon donor 55  
respon kemanusiaan 4, 5, 11, 49, 144  
respon kesiapsiagaan 38  
respon pendidikan 20, 25, 26, 27, 29, 36, 40, 43, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 135, 136, 144  
risiko 1, 2, 5, 10, 12, 21, 28, 29, 31, 36, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 65, 69, 70, 76, 78, 80, 82, 85, 87, 95, 97, 100, 104, 105, 107, 121, 134, 143, 146, 148, 151  
ruang belajar 2, 3, 29, 36, 37, 48, 64, 69, 78, 86, 89, 148  
ruang ramah anak 74, 78  
rute akses 78, 82

## S

sanitasi 2, 4, 9, 10, 19, 32, 42, 51, 77, 86, 88, 90, 139, 144  
serangan 29, 31, 32, 60, 78, 82, 83, 84  
standar 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 146  
standar dasar 9, 10, 11, 15  
Standar Minimum INEE 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 43  
strategi respon 25, 53, 55

struktur 2, 40, 71, 77, 85, 86, 87, 88, 151

sumber daya 10, 11, 16, 22, 25, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 41, 45, 46, 49, 51, 54, 60, 62, 69,  
71, 76, 90, 109, 136, 139, 140, 141, 143, 146, 149

sumber daya masyarakat 36, 38

sumber informasi 2, 46

## **T**

tempat penampungan sementara 76, 77, 79

temuan 43, 48, 52, 53, 64, 65

tidak mencederai 26, 54

tim 45, 47, 51, 61

tinjauan dan pengembangan 98

transparansi 5, 17, 37, 40, 111, 140, 141

transparansi dan akuntabilitas 37, 140

tujuan belajar 98, 112

## **U**

ukuran kelas 89, 121, 150

untuk pelatihan guru 106

## **V**

validitas data 49, 59

# Lampiran 4: FORM UMPAN-BALIK

Informasi Kontak	
Tanggal:	Nama:
Organisasi dan Jabatan:	
Alamat:	
Telepon:	
E-mail:	

1. Silakan dituliskan cara-cara yang dipakai oleh Anda atau organisasi Anda dalam menggunakan Standar Minimum. Tulislah serinci mungkin dan mencakup cara (jika ada) di mana Anda menyesuaikan aksi kunci dibuku pegangan untuk konteks Anda dan pekerjaan proyek Anda / organisasi / struktur koordinasi dan lain-lain.

---

---

---

---

---

---

---

2. Tantangan-tanntangan apa saja yang telah anda alami ketika menggunakan buku pedoman ini dan bagaimana cara Anda mengatasinya?

---

---

---

---

---

---

---

3. Dapatkah Anda berbagi pengalaman dan / atau contoh-contoh praktik yang baik setelah menggunakan buku ini? Apa saja dampak yang terjadi dalam pekerjaan Anda setelah menggunakan buku pegangan ini pada pekerjaan Anda?

---

---

---

---

---

4. Berdasarkan pengalaman Anda, informasi tambahan dan / atau alat apa saja yang akan membuat buku ini lebih efektif dan relevan?

---

---

---

---

---

5. Silahkan memberikan komentar tambahan atau umpan balik tentang buku ini.

---

---

---

---

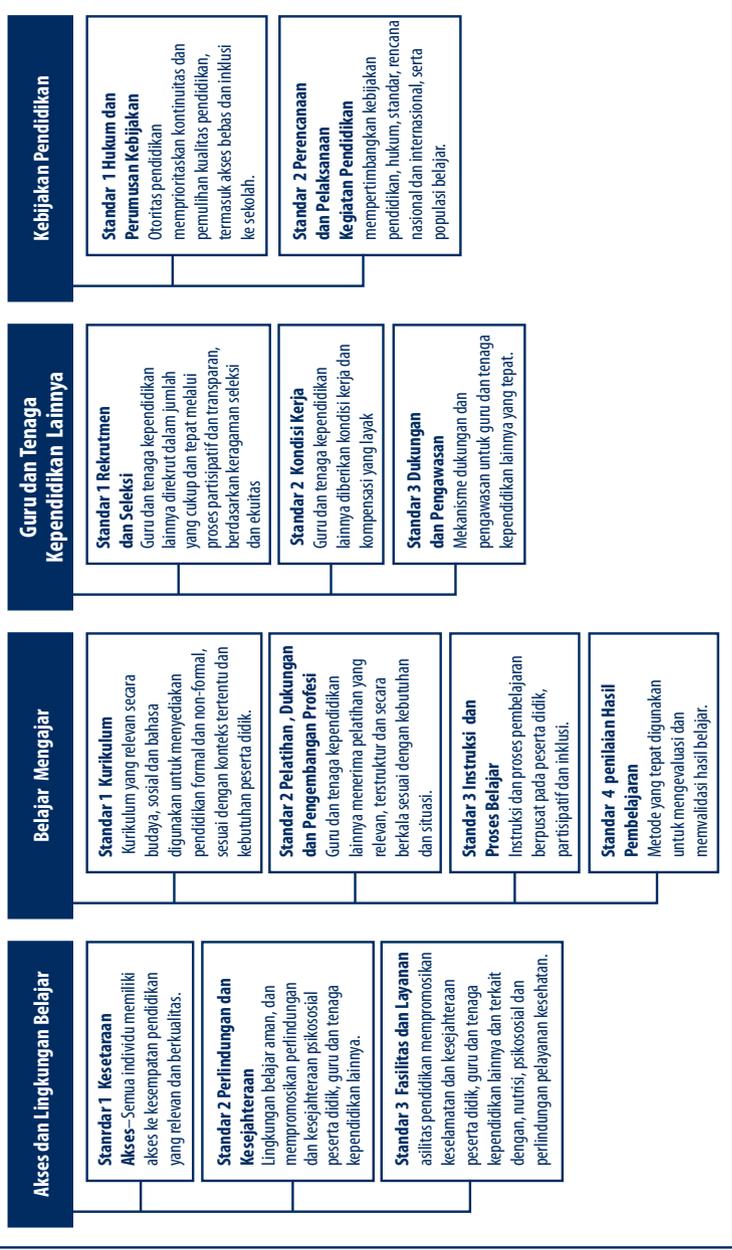
---

---

Terima kasih telah berbagi pengalaman Anda atas penggunaan Standar Minimum Pendidikan: Kesiapsiagaan, Respon, Pemulihan. Umpan balik ini akan menginformasikan update dan strategi untuk promosi Standar Minimum. Silahkan mengisi kuesioner ini dan email ke [minimumstandards@ineesite.org](mailto:minimumstandards@ineesite.org) atau kirim melalui surat ke INEE Coordinator for Minimum Standards, c/o UNICEF – Education Section, 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA. Anda juga dapat mengisi formulir ini Komentar online di: [www.ineesite.org/feedback](http://www.ineesite.org/feedback).

## Standar-standar Dasar

Standar-standar Partisipasi Masyarakat : Partisipasi dan Sumber Daya – Standar-standar Koordinasi : Koordinasi – Standar-standar Analisis : Pengkajian, Strategi Respon, Pemantauan dan Evaluasi



**Isu-isu Tematis Kunci:** Mitigasi Konflik, Pengurangan Risiko Bencana, Pengembangan Anak Usia Dini, Gender, HIV, dan AIDS, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Inklusif, Keterkaitan Antar Sektoral, Perlindungan, Dukungan Psikososial dan Pemuda.

# INEE

Inter-Agency Network for Education in Emergencies  
Réseau Inter-Agences pour l'Éducation en Situations d'Urgence  
La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia  
Rede Inter-Institucional para a Educação em Situação de Emergência  
الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ

Standar minimum untuk pendidikan: kesiapsiagaan, respon, pemulihan mengungkapkan komitmen bahwa semua individu—anak, remaja dan orang dewasa—memiliki hak atas pendidikan. Standar mengartikulasikan tingkat minimum kualitas pendidikan dan akses dalam keadaan darurat hingga pemulihan. Mereka dapat digunakan sebagai alat pembangunan kapasitas dan pelatihan bagi badan-badan kemanusiaan, pemerintah dan penduduk setempat untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas dari bantuan pendidikannya. Standar Minimum ini juga dapat membantu untuk meningkatkan akuntabilitas dan kemampuan membuat perencanaan di kalangan para pekerja kemanusiaan dan meningkatkan koordinasi di antara mitra, termasuk otoritas pendidikan.

Tahun 2003-2004 INEE telah memfasilitasi sebuah proses konsultasi tingkat tinggi untuk mengembangkan Standar Minimum, dan memperbaruinya pada tahun 2009-2010. Standar Minimum dibuat berlandaskan pada Konvensi tentang Hak-hak Anak, Kesepakatan Dakar 2000 tentang tujuan dari Pendidikan untuk semua dan Piagam Kemanusiaan Proyek Sphere.



Proyek Sphere mengakui Standar Minimum Pendidikan:  
Kesiapsiagaan, Respon, Pemulihan sebagai Standar Pendamping untuk Piagam  
Kemanusiaan Proyek Sphere dan Standar Minimum dalam Respon Bencana.